LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

TAHUN 2010 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BEKASI

TAHUN 2005 – 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bekasi mempunyai peran dan fungsi penting dalam perencanaan pembangunan untuk jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang adil, makmur dan sejahtera;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional *juncto* Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka agar kegiatan pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005–2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Bekasi.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

(1) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan untuk periode 20 tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

(2) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 3

(1) Penjabaran dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, proses penyusunan RPJP Daerah, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penyusunan RPJP Daerah.

BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BEKASI
Berisi tentang kondisi fisik alam, kondisi penduduk, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban umum, pemerintahan dan aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB III : ANALISA DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN BEKASI
Berisi tentang analisa potensi dan masalah serta analisa terhadap isu-isu strategis

BAB IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BEKASI
Berisi tentang visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah beserta penjelasannya.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
Berisi tentang arah pembangunan dan sasaran pembangunan lima tahunan.

BAB VI : PENUTUP

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

(1) RPJP Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah.

(2) Dalam penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH MASA TRANSISI

Pasal 5

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Bupati berikutnya.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan, penyusunan rencana pembangunan daerah telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Tahun 2005-2006 dan Rencana Strategis Daerah Tahun 2002-2006. Sedangkan untuk Tahun 2007-2010 program pembangunan dan rencana strategis daerah masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2012.

Pasal 8

(1) Ketentuan mengenai RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 3

D A F T A R I S I

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Proses Penyusunan RPJPD Daerah 4

1.3 Maksud Dan Tujuan 5

1.3.1 Maksud 5

1.3.2 Tujuan 6

1.4 Landasan Hukum 6

1.5 Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 7

1.6 Sistematika 10

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BEKASI 11

2.1 Kondisi Fisik Alam 11

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif 11

2.1.2 Topografi 11

2.1.3 Iklim 12

2.2 Kondisi Penduduk 12

2.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 12

2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 13

2.2.3 Kehidupan Beragama 15

2.2.4 Pemberdayaan Perempuan 15

2.2.5 Kepemudaan dan Olah Raga 15

2.2.6 Kebudayaan 16

2.2.7 Kesejahteraan Sosial 16

2.3 Ekonomi 16

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi 17

2.3.2 Pertanian, Perikanan dan Kelautan 17

2.3.3 Perindustrian 18

2.3.4 Perdagangan dan Penanaman Modal 19

2.3.5 Pariwisata 20

2.3.6 Keuangan Daerah 20

2.3.7 Kemiskinan dan Pengangguran 21

2.4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 22

2.5 Sarana dan Prasarana 22

2.6 Politik 24

2.7 Hukum 25

2.8 Ketentraman dan Ketertiban Umum 26

2.9 Pemerintahan dan Aparatur 26

2.10 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah 27
2.11 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 28

BAB III ANALISA DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN BEKASI 29

3.1 Analisa Terhadap Potensi dan Masalah 29
3.1.1 Analisa Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 29
3.1.2 Analisa Kondisi Demografis 30
3.1.3 Analisa Ekonomi dan Sumber Daya Alam 31
3.1.4 Analisa Sektor Pertanian 32
3.1.5 Analisa Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 34
3.2 Analisa Terhadap Isu-Isu Strategis 38
3.2.1 Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya 38
3.2.2 Ekonomi 39
3.2.3 Sarana dan Prasarana 40
3.2.4 Politik, Hukum dan Aparatur 41
3.2.5 Tata Ruang Wilayah 42
3.2.6 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 43

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BEKASI 44

4.1 Visi Pembangunan Daerah 44
4.1.1 Misi 47

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI 55

5.1 Arah Pembangunan 55
5.2 Sasaran Pembangunan Lima Tahunan 62

BAB VI PENUTUP 89

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 yang berisi tentang latar belakang, proses penyusunan, maksud dan tujuan, landasan hukum,serta hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penyusunan RPJP.

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman presiden untuk menyusun rencana pembangunan, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk memperoleh harmoni dan keselarasan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antardaerah. Revitalisasi perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional, serta dapat mendorong efektivitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah membawa perubahan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dibanding dengan Sistem Perencanaan sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain terletak pada penamaan dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan selama ini. Sebelumnya, di tingkat daerah dikenal dokumen perencanaan berupa Pola Dasar atau Garis-Garis Besar Haluan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang rentang waktu berlakunya masing-masing lima tahun. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dikenal dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang rentang waktu berlakunya dua puluh tahun dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang rentang waktu berlakunya lima tahun.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Daerah dalam sistem pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan tujuan tersebut harus dilaksanakan melalui rencana pembangunan yang dituangkan dalam RPJP. Kabupaten Bekasi harus bisa menyusun sebuah perencanaan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakatnya dan melakukan pembangunan yang cukup pesat agar dapat menjadi percontohan di Provinsi Jawa Barat khususnya sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Ibukota negara yaitu Provinsi DKI Jakarta.

RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah serta tahapan-tahapan pencapaian setiap lima tahunnya. Kepala Daerah dengan DPRD bersama seluruh unsur masyarakat selaku pelaku pembangunan menyusun RPJPD melalui proses partisipasif.

Pemerintah Daerah menghadapi perubahan dan tantangan kondisi sosial politik, pasar domestik maupun lingkungan strategis global yang menuntut komitmen dalam bentuk visi, misi strategis yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD. Upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, memiliki konsekuensi bahwa seluruh pemerintah daerah baik Provinsi serta Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam bentuk RPJPD dan RPJMD.

Sejalan dengan perspektif di atas, perencanaan daerah jangka panjang di Kabupaten Bekasi perlu mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan daerah. Pada akhirnya melalui proses penyepakatan seluruh pemangku kepentingan, maka rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bekasi secara konseptual substansinya tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, arah pembangunan yang disusun memuat kebijakan nasional dan provinsi sebagai dasar dalam penetapan arah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Karakteristik sosial ekonomi Kabupaten Bekasi yang berbasis religius, kultural, dan memiliki aneka ragam sumber daya alam, dengan adanya ketentuan termaksud akan lebih mampu mendorong terwujudnya tujuan jangka panjang Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bekasi adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bekasi untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat, analisa lingkungan strategis, arah kebijakan dan program yang disertai *Key Performance Indicator* (KPI).

Gambar 1.1.

Pola hubungan RPJPD Kabupaten Bekasi dari Visi-Misi, *Road Map* dan KPI-Target Kinerja

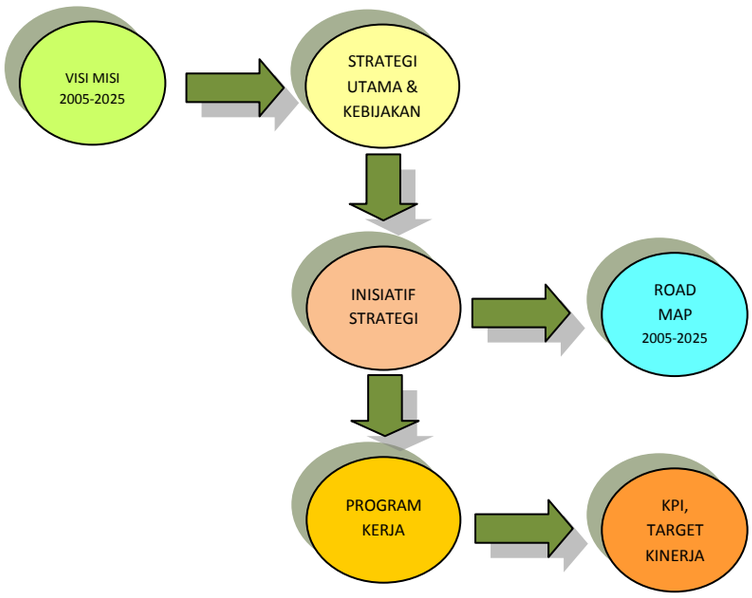

Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari kawasan strategis tata ruang nasional yang dalam hierarki pembangunan nasional merupakan bagian dari kawasan perkotaan metropolitan Jabodetabek pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letaknya yang strategis menyebabkan berbagai kegiatan dan fasilitas sosial ekonomi yang sifatnya pendukung, tumbuh dan berkembang pesat, hal itu menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah tujuan yang memberikan berbagai kemudahan, mulai dari ketersediaan sumber daya alam dan manusia, hingga tingginya aksesibilitas.

Melimpahnya potensi sumber daya yang dimiliki memerlukan sistem pengelolaan yang terintegrasi sehingga dapat dicapai hasil secara optimal dalam bentuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tingginya akssesibilitas berpengaruh pada tingginya angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) akibat migrasi datang, yang pada akhirnya berujung pada munculnya berbagai permasalahan demografi. Diyakini permasalahan demografi akan mengakibatkan berbagai persoalan, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, hingga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berangkat dari potensi dan permasalahan di atas, pendekatan sistem pengelolaan didasarkan pada upaya pengembangan nilai manfaat dari potensi yang tersedia, serta eliminasi semaksimal mungkin permasalahan yang ditimbulkan. Untuk itu diperlukan sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang memberikan arah dan kebijakan yang didalamnya memuat tahapan pelaksanaan pembangunan secara sistematis dan komprehensif, selanjutnya diwujudkan dalam dokumen RPJP Daerah Kabupaten Bekasi.

Dengan mencermati hal tersebut, maka berbagai langkah perlu ditempuh untuk menjamin terlaksananya pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kerangka dasar pemikiran dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi didasarkan pada kecenderungan tersebut untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.2. PROSES PENYUSUNAN RPJP DAERAH

RPJPD Kabupaten Bekasi merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bekasi untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat kondisi umum, visi, misi, arah pembangunan serta tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bekasi tahun 2005 sampai dengan 2025.

Dalam penyusunan RPJPD perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. RPJPD Provinsi mengacu pada RPJP Nasional;
2. RPJPD Kabupaten/Kota mengacu pada RPJPD Provinsi;
3. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJD;
4. Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJPD Provinsi dan atau RPJPD Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi;
5. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Nasional. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota dilakukan, selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJPD Provinsi.
6. Bagi Daerah yang belum dapat menyelesaikan penyusunan dan atau penetapan RPJPD, maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban melanjutkan penyelesaiannya. Khusus bagi daerah-daerah yang sedang mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Langsung, kegiatan penyusunan Rancangan RPJPD dapat dilaksanakan oleh Penjabat (*caretaker*) Kepala Daerah.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Sedangkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda, sebelum ditetapkan.

RPJP Daerah disusun melalui proses sebagai berikut :

1. Mempersiapkan Rancangan RPJPD.

Perlu disiapkan rancangan awal untuk mendapatkan gambaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah, dibawah koordinasi Kepala Bappeda. Selanjutnya rancangan awal ini menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang RPJPD. Isi dari Rancangan RPJPD ini harus dilampiri dengan analisis yang menggambarkan kondisi umum menyangkut masalah ekonomi dan sosial daerah dalam periode 20 tahun kedepan.

2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD.

Musrenbang RPJPD merupakan forum konsultasi dengan para pemangku-kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi Kepala Bappeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan komitmen para pemangku-kepentingan pembangunan sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJPD.

3. Penyusunan rancangan akhir RPJPD.

Penyusunan rancangan akhir RPJPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dengan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

4. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka RPJPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Nasional. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJPD Provinsi. Dengan demikian, RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Gambar 1.2

Proses Penyusunan dan Penetapan RPJPD

RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

RPJPD Kabupaten Bekasi merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 2025, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 adalah :

1. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
2. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bekasi.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 adalah :

1. Untuk menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bekasi.
2. Untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional.
4. Untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Untuk mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.

1.4. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2003 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan wilayah Kabupaten Bekasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

1.5. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi sebagai salah satu bentuk dokumen perencanaan daerah memiliki keterkaitan serta rangkaian yang tak terpisahkan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM - Daerah**), merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Pembangunan Daerah setiap lima tahun sekali.

2. **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD**), merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan

untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda.

3. **Rencana Kerja SKPD (Renja - SKPD),** merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai derivasi Renstra SKPD yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan.

4. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),** merupakan dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun sebagai perencanaan pembangunan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi.

RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 merupakan pedoman umum bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2005-2025. RPJPD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kabupaten Bekasi dengan tetap memperhatikan arah RPJP Nasional dan Propinsi, dan selanjutnya berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Dokumen RPJPD Kabupaten Bekasi disusun dengan mengacu, merujuk, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJPD Propinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Barat, RTRW Kabupaten Bekasi dan *hinterlendnya*. Hal ini dimaksudkan agar RPJPD Kabupaten Bekasi menjadi dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu, baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

RPJPD Kabupaten Bekasi tahun 2005-2025 memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lain serta dokumen perencanaan tata ruang lainnya. Secara diagramatis pola hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3

Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

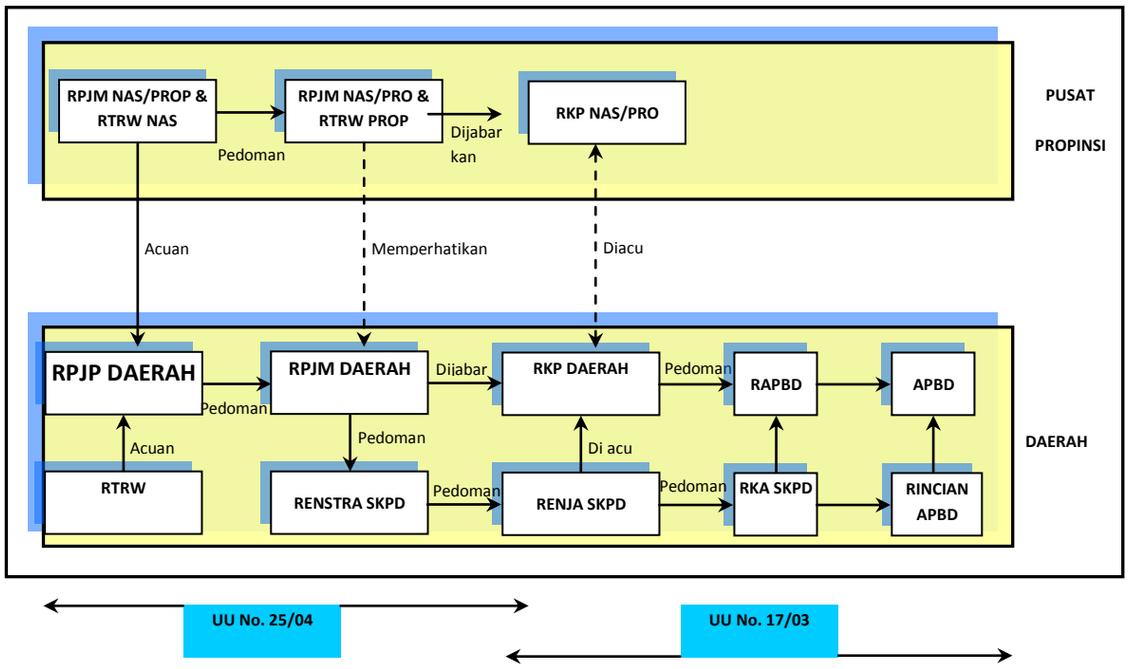

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun RPJPD untuk 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk ikut mencapai tujuan nasional. Dalam rangka ikut mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005 - 2025. Keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 1.4

Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

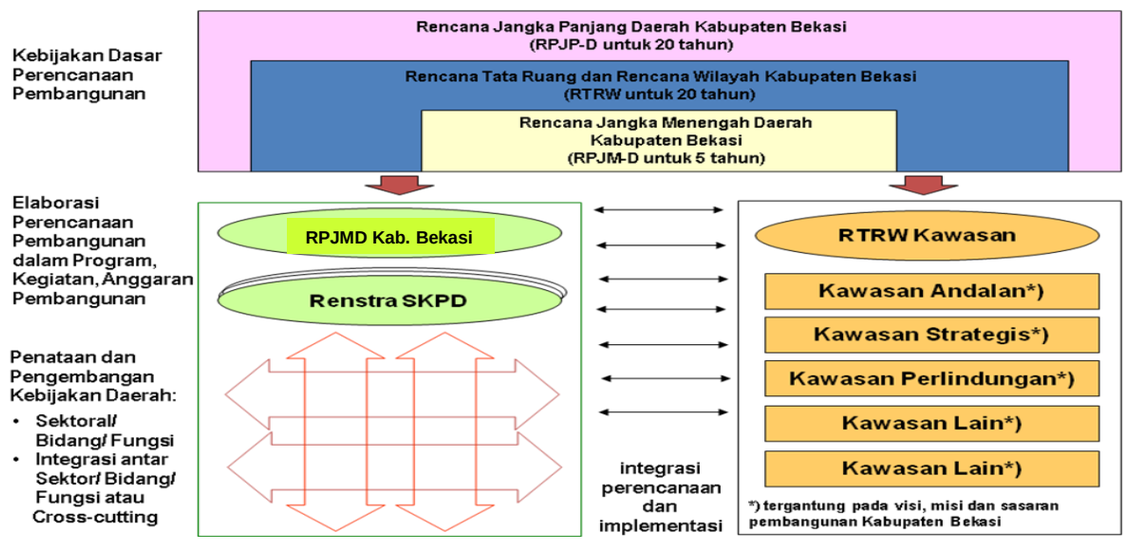

1.6. SISTEMATIKA

RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang menjelaskan perkembangan Kabupaten Bekasi serta latar belakang yang menjelaskan perlunya disusun RPJPD. Pada bagian ini juga dijelaskan maksud dan tujuan RPJP Daerah, proses penyusunan, landasan hukum penyusunan RPJPD dan hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penyusunan RPJPD.

BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BEKASI

Dalam bagian ini menjelaskan tentang kondisi umum daerah berikut prediksi atau perkiraan kondisi daerah serta tantangan yang dihadapi dimasa yang akan datang. Kondisi umum juga merupakan gambaran potensi daerah baik dari aspek geomorfologi, lingkungan, kependudukan, ekonomi maupun sumber daya alam. Disamping itu juga memuat tentang kondisi dan potensi sosial budaya seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, agama, dan kebudayaan juga kondisi dan potensi sarana dan prasarana baik pemerintahan umum, prasarana dasar masyarakat seperti listrik, air bersih dan lain-lain yang dilengkapi dengan tantangan yang dihadapi dua puluh tahun ke depan dan modal dasar pembangunan.

BAB III. ANALISA DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN BEKASI

Memuat isu strategis yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi yang akan direncanakan. Isu yang disajikan berupa kekuatan atau potensi, kelemahan, peluang dan tantangan. Identifikasi dari isu menghasilkan rumusan permasalahan dari kondisi yang ada di daerah.

BAB IV. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pada bagian ini merupakan isi pokok dari RPJP Daerah yang memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah beserta penjelasannya.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pada bagian ini memuat arah pembangunan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 20 tahun serta arah kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian arah pembangunan secara umum juga dilengkapi dengan arah pembangunan menurut periode pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD ke-1, RPJMD ke-2, RPJMD ke-3, RPJMD ke-4 dan RPJMD ke-5.

BAB VI. PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bagian penutup yang menjelaskan kaedah umum pelaksanaan RPJP Daerah yang mencakup penegasan tentang peranan RPJPD dalam pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini berisi uraian gambaran umum wilayah Kabupaten Bekasi. Gambaran umum ini terkait dengan kondisi fisik alam, kondisi penduduk, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, hukum, ketentraman dan ketertiban umum, pemerintahan dan aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat dengan ibukotanya di Cikarang Pusat. Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah 1.273,88 km² yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 182 desa serta 5 kelurahan. Jumlah desa yang terdapat disetiap kecamatan di Kabupaten Bekasi terdiri dari 5 sampai 13 desa. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan Cikarang Pusat, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00 % dari luas Kabupaten Bekasi, selebihnya adalah Kecamatan Setu (6.216 Km²), Serang Baru (6.380 Km²), Cikarang Pusat (4.760 Km²), Cikarang Selatan (5.174 Km²), Cibarusah (5.039 Km²), Bojongmangu (6.006 Km²), Cikarang Timur (5.131 Km²), Kedungwaringin (3.153 Km²), Cikarang Utara (4.330 Km²), Karang Bahagia (4.610 Km²), Cibitung (4.530 Km²), Cikarang Barat (4.369 Km²), Tambun Selatan (4.310 Km²), Tambun Utara (3.442 Km²), Babelan (6.360 Km²), Tarumajaya (5.463 Km²), Tambelang (3.791 Km²), Sukawangi (6.719 Km²), Sukatani (3752 Km²), Sukakarya (4.240 Km²), Pebayuran (9.634 Km²), dan Cabangbungin (4.970 Km²).

2.1. KONDISI FISIK ALAM

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administratif

Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat, yang secara geografis terletak pada 106˚ 58’ 5” – 107˚ 17’ 45” BT dan 05˚ 54’ 50” – 06˚ 29’ 15” LS, serta memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Kabupaten Bogor
- Barat : DKI Jakarta , Kota Bekasi dan Laut Jawa
- Timur : Kabupaten Karawang

2.1.2. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi adalah dataran rendah dengan bagian selatan yang berbukit-bukit. Kabupaten Bekasi terletak pada ketinggian antara 0-115 m di atas permukaan laut dengan kondisi kemiringan tanah antara 0-25%. Kondisi alam Kabupaten Bekasi terdiri atas daerah pantai dan dataran rendah. Di Kabupaten Bekasi

terdapat 16 aliran sungai besar yaitu: Sungai Citarum, Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai Ciherang, Sungai Belencong, Sungai Jambe, Sungai Sadang, Sungai Cikedokan, Sungai Ulu, Sungai Cilemahabang, Sungai Cibeet, Sungai Cipamingkis, Sungai Siluman, Sungai Serengseng, Sungai Sepak dan Sungai Jaeran. Lebar sungai tersebut berkisar antara 3 sampai 80 meter.

Kabupaten Bekasi memiliki 13 situ yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu : Situ Tegal Abidin, Situ Bojongmangu, Situ Bungur, Situ Ceper, Situ Cipagadungan, Situ Cipalahar, Situ Ciantra, Situ Taman, Situ Burangkeng, Situ Liang Maung, Situ Cibeureum, Situ Cilengsir dan Situ Binong. Luas situ tersebut berkisar antara 3 - 40 Ha.

Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar merupakan air tanah dangkal yang berada pada kedalaman 5 – 25 meter dari permukaan tanah, sedangkan air tanah dalam pada umumnya diperoleh pada kedalaman antara 90 – 200 meter.

Suhu udara di Kabupaten Bekasi tergolong cukup panas dengan rata-rata suhu 28ºC – 32ºC dan memiliki curah hujan 86,37 mm per tahun dan Ketinggian lokasi berkisar antara 0 – 115 m dpl dan memiliki kemiringan tanah 0 sampai dengan 250.

Wilayah Kabupaten Bekasi mulai dari pantai sebelah utara merupakan daerah dataran rendah, dari sini kearah barat fisiknya merupakan dataran rendah. Pada bagian barat terdapat pantai mulai dari barat ke utara yang juga merupakan daerah dataran rendah, sedangkan bagian selatan terdiri dari perbukitan.

Data tahun 2007 menyebutkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi mencapai 127.388 ha, terdiri dari Lahan pekarangan/bangunan seluas 22.452 Ha, Tegalan/huma 13.109 Ha, Hutan Negara 234 Ha, rawa-rawa 95 Ha, tambak 10.741 Ha, Penggembalaan 332 Ha, Kolam/empang 431 Ha, Tanah Kosong 1.551Ha, Hutan rakyat/Tanaman Kayu 4.065 Ha, Perkebunan 514 Ha dan Lainnya 18.944 Ha.

2.1.3. Iklim

Kabupaten Bekasi memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu udara antara 28ºC – 32ºC. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari. Dibandingkan tahun 2007, curah hujan dan jumlah hari hujan di tahun 2008 lebih sedikit. Sementara jumlah curah hujan pada tahun 2008 yang terendah pada Bulan Juli sebesar 3,1 mm sedangkan tertinggi 553,9 mm terjadi di Bulan Februari.

2.2. KONDISI PENDUDUK

2.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kabupaten Bekasi Secara rata rata pada tahun 2009 wilayah Kabupaten Bekasi dihuni sebanyak 2,225,177 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.747 jiwa per Km² bertambah 1,43 % bila dibandingkan tahun 2008 dengan jumlah penduduk 2.193.776 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.722 jiwa per Km². Kecamatan Tambun Selatan merupakan kecamatan yang terpadat sebesar 374.530 jiwa dengan tingkat kepadatan 8.690 jiwa per Km² disusul oleh Kecamatan Muaragembong dengan penduduk yang paling rendah kepadatan penduduknya yang hanya 282 jiwa per Km² dan Kecamatan yang jumlah penduduknya sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu yang memiliki jumlah penduduk sebesar 26.672 jiwa.

Penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) mencapai 1.513.029 orang atau 68,97 %. Sedangkan penduduk yang belum produktif (<10 tahun) 399.134 orang atau 18,19 % dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) 67.005 orang atau 3,05 % (Tabel 3.1.3.). Sehingga beban ketergantungan sebesar 44,99.

Angka kemiskinan dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2,5% yaitu pada tahun 2007 turun sebesar 21,99%, kemudian pada tahun 2008 sebesar 21,49%, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 20,99%. Untuk tahun 2010 penurunan angka kemiskinan adalah sebesar 20,49%, tahun 2011 sebesar 19,99% dan pada tahun 2012 angka kemiskinan diprediksikan akan turun hingga 19,49%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi tahun 2009 menunjukkan realisasi angka kemiskinan mencapai 17,34% yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 385.845,69 jiwa dari total penduduk sebesar 2.225.177 jiwa.

Kualitas penduduk mengalami peningkatan dilihat dari perkembangan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bekasi dimana pada tahun 2007 sebesar 71,55 menjadi 72,08 pada tahun 2008 dan menjadi 72,46 di tahun 2009. Ditinjau dari peringkatnya, angka IPM Kabupaten Bekasi untuk Jawa Barat pada tahun 2007 berada pada peringkat 11 dimana Angka harapan hidup di Kabupaten Bekasi pada 2007 adalah 72.38 tahun.

Angka melek huruf penduduk 15 tahun keatas pada tahun 2008 mencapai 94,02 % dan pada 2007 adalah 93,67%. Tingkat enrollment rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2009 selama 8,21 tahun. Rata-rata lama sekolah ini masih dibawah target yang telah ditetapkan pada tahun 2009 yaitu 9,78 tahun.

Faktor lain yang menentukan pembangunan manusia adalah tingkat pengeluaran riil perkapita berdasarkan hasil perhitungan IPM 2009, paritas daya beli di Kabupaten Bekasi adalah sebesar Rp.634.370,- dan paritas daya beli penduduk ini meningkat cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu sebesar Rp.632.420,- dan angka ini telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target RPJMD pada tahun 2009 sebesar Rp. 631,270,-. Daya beli merupakan indikator yang paling sensitif terhadap perubahan yang terjadi. Setiap perubahan kebijakan makro ekonomi nasional ternyata berdampak sangat serius terhadap ketatnya perkembangan daya beli masyarakat. Kondisi eksternal seperti kebijakan fiskal, moneter dan kenaikan harga BBM serta inflasi (naik-turunnya harga barang & jasa) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap naik turunnya daya beli masyarakat. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan kinerja pembangunan guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor perekonomian, terutama yang berbasis ekonomi kerakyatan.

2.2.2. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menunjukkan pencapaian pembangunan sumber daya manusia dengan memperhatikan rata-rata indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli. Capaian IPM Kabupaten Bekasi pada tahun 2008 sebesar 72,08 menjadi 72,46 di tahun 2009. (terjadi kenaikan pencapaian pembangunan manusia sebesar 0.38 poin).

Kenaikan angka IPM ini terutama didukung oleh meningkatnya realisasi pencapaian angka indeks pendidikan dari 80,45 pada tahun 2008 menjadi 80,70 pada tahun 2009, telah terjadi kenaikan sebesar 0,34 poin.

Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan pada komponen indeks pendidikan, yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indeks pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun 2009 menurut Klasifikasi UNDP dan Klasifikasi Jawa Barat tergolong tinggi artinya indeks pendidikan termasuk baik dan terus mengalami peningkatan.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan komponen IPM di bidang pendidikan yang menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Pencapaian Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memberantas buta huruf mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2009. Target tahun 2009 sebesar 93,87 % dengan realisasi yang sama.

Untuk mencapai target AMH Tahun 2009 dilaksanakan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) dan pemberdayaan peran serta masyarakat melalui kelompok Majelis Taklim, Muslimat NU, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Kelompok PKK dan Dharma Wanita. Hal ini sesuai dengan perluasan akses pendidikan dalam rangka pelayanan dan peningkatan angka Melek Huruf (AMH) dan pada akhirnya ditujukan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pintar dan benar. Pembentuk komponen indeks pendidikan lainnya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2009 selama 8,21 tahun. Rata-rata lama sekolah ini masih dibawah target yang telah ditetapkan pada tahun 2009 yaitu 9,78 tahun. Hal ini menjadi catatan khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk terus meningkatkan upaya-upaya yang dapat mendorong masyarakat untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun, maka perlu perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Antara lain melalui penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas dan unit sekolah baru disemua jenis dan jenjang pendidikan formal termasuk SMP Terbuka. Pada bidang pendidikan non formal perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan, Pemberantasan Buta Huruf dan Pencapaian Program Wajar Dikdas 9 Tahun melalui kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Belajar Paket Kesetaraan (Paket A, B, C) dan Keaksaraan Fungsional.

Selain didukung oleh peningkatan indeks pendidikan, peningkatan IPM ini ditandai oleh terjadinya peningkatan nilai komponen lain dari IPM. Komponen yang menjadi dasar perhitungan IPM seperti harapan hidup, dan pengeluaran riil perkapita semuanya relatif terus membaik.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan komponen IPM dibidang kesehatan yang menggambarkan rata-rata lamanya hidup dari seorang bayi (0 tahun) sampai mencapai umur tertentu. Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bekasi memperlihatkan adanya peningkatan. Realisasi AHH pada tahun 2009 sebesar 68,92 tahun dan telah mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2009 sebesar 68,90, artinya meningkat sebesar 0,02 poin dan jika dibandingkan dengan capaian AHH tahun 2008 yaitu sebesar 68,68 tahun telah terjadi kenaikan sebesar 0,24 tahun. Indikator AHH ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi dan anak, karena kematian pada saat itu berarti hilangnya peluang untuk hidup yang lebih panjang. Makin rendah angka kematian bayi, makin tinggi rata-rata angka harapan hidup. Sebaliknya, makin tinggi tingkat kematian bayi, makin rendah angka harapan hidup.

Tercapainya target AHH disebabkan berhasil ditekannya angka kematian bayi dan anak serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2008 angka kematian bayi yaitu 98 dan pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 75. Sedangkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat lainnya dapat dilihat dari:

- Menurunnya jumlah Ibu Hamil Resiko Tinggi (Bumil Resti) dari 2.624 orang pada tahun 2008 menjadi 1.079 orang pada tahun 2009.
- Meningkatnya jumlah dan kualitas pelayanan puskesmas. Antara lain meningkatnya jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar, yang ditandai dengan tersedianya sarana puskesmas sebanyak 39 buah dan 3 buah UPTD Pelayanan kesehatan. Dari 39 puskesmas tersebut sudah 8 puskesmas yang bisa melayani rawat inap dan 6 puskesmas yang mampu melayani Pelayanan Obstestri Neonatal Emergency Dasar (PONED). Selain itu pelayanan kesehatan dasar turut didukung oleh tersedianya 47 Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar di seluruh kecamatan.
- Bertambahnya sarana kesehatan posyandu dari 2.046 posyandu tahun 2008 menjadi 2.100 posyandu pada tahun 2009.

2.2.3. Kehidupan Beragama

Dalam kehidupan beragama, Kabupaten Bekasi dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang religius. Sarana ibadah di Kabupaten Bekasi terdiri dari masjid 1.136, mushola 348, langgar 2.216, gereja 16, pure 3, dan vihara 2 (terdapat di Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia dan Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah); sedangkan vihara terdapat 3 buah vihara (Desa Babelan Kota Kec. Babelan, Desa Karangasih Kec. Cikarang Utara dan Desa Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin).

2.2.4. Pemberdayaan Perempuan

Pada sidang umum PBB tentang *Women* 2000 telah dihasilkan "Deklarasi Millenium" bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan sebagai cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan. Deklarasi ini telah diadopsi hampir semua negara termasuk Pemerintah Indonesia.

Salah satu aspek pemberdayaan perempuan adalah mengenai kualitas kesehatan perempuan. Berdasarkan data Periode tahun 2000 - 2010, penduduk perempuan usia 15- 49 tahun di wilayah Kabupaten Bekasi dari 2000 sampai 2010, diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat. Pada tahun 2000, jumlah penduduk perempuan usia 15 - 49 tahun sebesar 496.295 jiwa meningkat menjadi 672.214 jiwa pada tahun 2010. Peningkatan jumlah penduduk perempuan di usia reproduksi (15-49 tahun) mengindikasikan perlunya persiapan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pelayanan kesehatan terutama kesehatan perempuan terutama seputar kesehatan reproduksi mereka. Selain kesehatan reproduksi, pelayanan Keluarga Berencana (KB) juga perlu mendapat perhatian agar jumlah kelahiran tetap dapat dikendalikan. Dalam memfasilitasi kesehatan masyarakat, selain usaha Pemerintah Kabupaten Bekasi juga perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta.

2.2.5. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan potensi yang sangat berharga bagi proses pembangunan suatu daerah, sehingga partisipasi pemuda dalam pembangunan sangat diharapkan. Oleh karena itu, pemuda dalam konteks pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak boleh menjadi sumber kendala. Keterampilan yang dimiliki pemuda senantiasa harus menjadi sumber kontribusi bagi pemerintah daerah dalam peningkatan IPM. Begitu pula dalam

peningkatan prestasi olah raga di Kabupaten Bekasi, karena pemuda merupakan tumpuan pemerintah untuk meningkatkan prestasi. Menurut data BPS tahun 2008 jumlah Karang Taruna Tahun 2007 mencapai 210 karang taruna yang tersebar di 23 kecamatan. Ini artinya organisasi kepemudaan seperti karang taruna menjadi wadah bagi partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan di wilayahnya. Selain karang taruna juga terdapat 37 organisasi sosial dan 35 organisasi dunia usaha yang masing-masing memiliki peran terhadap kemajuan pemuda di Kabupaten Bekasi.

2.2.6. Kebudayaan

Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Bekasi ditandai dengan keberadaan beberapa jenis kesenian yang tumbuh di Kabupaten Bekasi. Jenis kesenian yang ada di Kabupaten Bekasi antara lain: kesenian Gambang Kromong 6 group, Topeng Bekasi 50 group, Gamelan Salendro/Tanjidor 5 Group, Wayang Ajen 3 Group, Ujungan 5 Group, Marawis 40 Group, Calung 5 Group dan Kecapi Suling 3 Group.

2.2.7. Kesejahteraan Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan klasik yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Dalam konteks Kabupaten Bekasi, permasalahan kesejahteraan sosial perlu mendapatkan perhatian lebih serius untuk mengatasi permasalahan yang ada maupun pencegahan meluasnya permasalahan kesejahteraan sosial. Pada Tahun 2007, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bekasi meliputi : anak balita terlantar 1.181 orang, anak terlantar 2.691 orang, wanita rawan sosial ekonomi 6.860 orang, penyandang cacat 10.905 orang, lanjut usia terlantar 2.775 orang, berumah tak layak huni 5.030 KK, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 1.562 KK dan keluarga fakir miskin 63.306 KK.

2.3. EKONOMI

Kabupaten Bekasi memiliki berbagai potensi ekonomi sebagai potensi unggulan daerah baik industri, jasa, perdagangan, sumber daya manusia, modal yang tersebar diberbagai wilayah dan sumber daya alam yang meliputi pertanian, pertambangan dan pariwisata. Indikator keunggulan ini dapat di lihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Kabupaten Bekasi.

Menurut perhitungan BPS pada tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Perkapita ADHB), menggambarkan nilai produksi barang dan jasa dari kegiatan ekonomi disuatu daerah. Pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp.36.661.560,-, realisasinya mencapai Rp. 41.136.500,-, sedangkan tahun 2008 realisasinya mencapai Rp. 37.824.077,-. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa capaian PDRB per kapita ADHB Kabupaten Bekasi pada tahun 2009 telah melampaui target yang ditetapkan, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 terdapat peningkatan sebesar 8,76 %.

Nilai PDRB Kabupaten Bekasi ADHB maupun konstan di Propinsi Jawa Barat cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, karena memberikan kontribusi 14,04% terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat. Penyumbang paling besar PDRB Kabupaten Bekasi adalah sektor industri, kemudian perdagangan, hotel dan restoran, bank dan lembaga keuangan lainnya serta pertanian. Hal tersebut dapat dilihat kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2008 mencapai angka sebesar 87,45 %.

Secara teoritis besarnya kenaikan pengeluaran pemerintah tersebut merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan pembangunan ekonomi melalui instrumen kebijakan fiskal yang mempunyai efek terhadap peningkatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Bekasi.

2.3.1. Pertumbuhan ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Tahun 2009 ditargetkan sebesar 6,30% realisasinya mencapai 6,04%. Pada tahun 2008 realisasi LPE mencapai 6,07% sedangkan tahun 2010 ditargetkan 6,35%. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada tahun 2009 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan pertumbuhan/output sektor industri tidak setinggi pada tahun 2008. PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2008, atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp.48.65 trilyun, dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp. 45.85 trilyun mengalami kenaikan sebesar 5,75 %.

Penurunan pertumbuhan sektor industri terjadi akibat krisis global, dimana di Kabupaten Bekasi sebagian besar perusahaan industri besar-sedangnya merupakan perusahaan penanaman modal asing dengan skala ekspor. Pertumbuhan Sektor industri pada tahun 2009 tertekan, sehingga tumbuh dibawah 6 %, sementara sektor perdagangan dan jasa rata-rata tumbuh diatas 6,5 %. Besarnya kontribusi sektor industri menjadikan total pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 6,04 %. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi tahun 2009 masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 4,50 %, dan Jawa Barat sebesar 4,42 %.

Dari sisi penggunaan atas dasar harga konstan, pengeluaran konsumsi pemerintah tahun 2006 sebesar Rp.796,27 milyar dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 864,48 milyar, atau mengalami kenaikan sebesar 8,57 persen. Secara teoritis besarnya kenaikan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi melalui instrumen kebijakan fiskal yang mempunyai efek terhadap peningkatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian daerah.

2.3.2. Pertanian, perikanan dan kelautan

Kabupaten Bekasi yang berlokasi dekat dengan ibukota dan didukung oleh kondisi lahan pertanian yang ada memiliki potensi dan prospek ekonomi untuk mengembangkan produk sektor pertanian. Disamping pasar yang sudah tersedia, Kabupaten Bekasi juga memiliki keunggulan dari sisi dekatnya dengan lokasi pasar yang menjadikan biaya transportasi rendah dan waktu penyimpanan yang pendek.

Pertanian masih merupakan potensi daerah dengan sumber daya lahan sawah yang ada di wilayah utara dengan dukungan teknis dari Perum Otorita Jatiluhur. Komoditas padi dan palawija merupakan potensi sektor pertanian. Lahan yang sudah dimanfaatkan untuk tanaman padi sawah pada tahun 2008 adalah seluas 55.074 ha atau 43,62 %.

Wilayah dengan tanah sawah yang luas adalah Kecamatan Pebayuran, Sukawangi, dan Sukakarya. Produksi padi sawah tahun 2008 meningkat 2,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen. Padi ladang produksinya menurun dikarenakan berkurangnya luas panen.

Selain padi, pada sub sektor tanaman pangan juga terdapat tanaman palawija, kecuali ubi kayu, ubi jalar, dan kedelai produksinya menurun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas panen. Produksi jagung turun 32,04%, ubi kayu naik 65,92 %, ubi

jalar naik 15,17 %, kacang tanah turun mencapai 15,19 %, sedangkan kedelai produksinya naik 336,36%.

Potensi produk tanaman pangan yang dimiliki Kabupaten Bekasi meliputi Jenis sayuran yang produksinya cukup besar yaitu kangkung (16,820 ton), bayam (15,884 ton) dan ketimun (10,341 ton). Sedangkan jenis buah- buahan yang cukup besar produksinya adalah mangga (7.201,49 ton) dan pisang (6.927,7 ton). Secara umum produksi sayur-sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tanaman perkebunan yang produksinya tinggi antara lain tanaman kelapa dan bambu. Kedua jenis tanaman itu produksi-nya masing-masing 1.315,64 ton dan 176.273,00 ton. Produksi kelapa tertinggi ada di kecamatan Sukakarya, yaitu sebanyak 223,07 ton, sedangkan produksi bambu terbanyak ada di Kecamatan Bojongmangu yaitu 130.000 ton.

Jenis ternak yang besar populasinya adalah domba 166.260 ekor dan kambing 98.208 ekor. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2007, yaitu domba 155.055 ekor dan kambing 96.894 ekor.

Populasi ayam buras meningkat dibandingkan tahun 2007 jumlahnya mencapai 822.427 ekor sedangkan ayam ras petelur mengalami penurunan mencapai 299.632 ekor.

2.3.3. Perindustrian

Data PDRB Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada total pendapatan rata-rata sebesar 80% selama tahun 2003–2007 dan pada tahun 2008 sebesar 78,63% sedangkan pada tahun 2009 sebesar 78,01%. Dalam sepuluh tahun terakhir, kawasan-kawasan industri maupun perusahaan-perusahaan yang berada di luar kawasan industri di Kabupaten Bekasi berkembang dengan pesat.

Selama sepuluh tahun terakhir ini, telah terjadi perkembangan yang pesat kawasan industri dan perusahaan-perusahaan diluar kawasan industry. Sampai tahun 2008 tercatat 18 kawasan industri di Kabupaten Bekasi dengan luas 6.214,2 Ha. Secara umum pertumbuhan industri besar didominasi oleh kelompok industri yang menghasilkan barang dari logam, mesin dan elektronik. Jumlah perusahaan besar dan sedang pada tahun 2008 sebanyak 752 perusahaan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 213.838 orang. Dari jumlah tersebut yang paling banyak adalah perusahaan industri yang paling banyak adalah kelompok industri yang menghasilkan barang-barang logam, mesin dan perlengkapannya sebanyak 346 perusahaan yang menyerap tenaga kerja hingga mencapai 107.446 orang atau 50,25 %.

Berkaitan dengan jumlah sentra industri kecil di Kabupaten Bekasi terdapat 64 sentra industri yang terdiri dari sentra – sentra kecil, non fasilitas maupun industri besar. Komoditi - komoditi yang menjadi unggulan Kabupaten Bekasi diantaranya adalah industri kecil komponen kendaraan bermotor (gasket), anyaman bambu, kerajinan eceng gondok, kulit kerang, kamasan, industri elektronika, dan lainnya. Berikut gambaran komoditas industri kecil yang cukup potensial.

Industri Gasket terdapat di Kecamatan Kedung Waringin yang bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 150 orang dari 8 unit usaha dan dipasarkan dalam lingkup regional maupun nasional, dengan kapasitas produksi sebanyak 118.000 buah per bulan, Kerajinan anyaman bambu ini terdapat di Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur dengan jumlah unit usaha sebanyak 189 unit dengan nilai penjualan yang terus

meningkat, Kerajinan eceng gondok ini terdapat di Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Kerajinan ini tidak menghasilkan produk akhir tetapi pengerjaannya dari bahan baku sampai bahan setengah jadi yang kemudian dipasarkan ke perusahaan berdasarkan pesanan dengan nilai penjualan mencapai Rp. 945.000.000, kerajinan kerang di Kecamatan Babelan dengan 7 unit usaha orientasi eksport ke Amerika Latin, Eropa, Jepang dan Korea dengan nilai penjualan mencapai Rp. 3 milyar. Selain itu kerajinan bata merah terdapat di Desa Wibawa Mulya, Sindang Mulya, Sirna Jati dan Cibarusah Jaya Kabupaten Bekasi. Kerajinan ini mempunyai 60 unit usaha dengan pemasaran di wilayah Kabupaten Bekasi dan Jakarta dengan nilai penjualan mencapai Rp. 23.8 milyar.

2.3.4. Perdagangan dan penanaman modal

Sektor perdagangan merupakan sektor kedua terbesar kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bekasi. Kontribusi sektor perdagangan mencapai 8,82 % pada tahun 2008. Kontribusi ini mengalami kenaikan sebesar 0,37 % dari tahun 2007 yang hanya mencapai angka 8,45 % saja. Kondisi ini diikuti dengan pergerakan angka indeks harga konsumen yang cukup tinggi dimana pada tahun 2006 hanya mencapai 146,44 point yang kemudian meningkat pada tahun 2007 yang mencapai angka 155,9 point. Angka ini menunjukan tingkat harga konsumsi kebutuhan barang/jasa rumah tanggga yang ada di Kabupaten Bekasi.

Pertumbuhan sektor perdagangan ini pun dapat dilihat dari data BPS tahun 2008 dimana sejak tahun 2002 sampai dengan 2004 jumlah kios dan pedagang yang tertampung tidak mengalami pertambahan yang signifikan. Baru pada tahun 2005 dan 2006 terdapat pertambahan jumlah kios/los dan pedagang yang tertampung. Data tahun 2007 menunjukkan terdapat 5.053 kios pasar dan 4.583 los milik Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jumlah pedagang yang tertampung pada kios dan los tersebut berjumlah 5.771 pedagang. Jumlah Koperasi Unit Desa sebanyak 15 koperasi tersebar di 23 Kecamatan dengan anggota 8.215 orang. Koperasi non KUD berjumlah 722 Koperasi yang beranggotakan 84.668 orang dengan tenaga kerja 1.890 orang dan uang simpanan tahun 2007 sebesar 534.098 Milyar dengan volume usaha sebesar 683, 850 Milyar.

Sementara itu realisasi investasi baik PMA maupun PMDN selama 2002 sampai dengan 2007 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Promosi dan Penanaman Modal Jawa Barat mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Pada tahun 2002 nilai investasi PMA dan PMDN mencapai Rp. 4,73 trilyun dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2003 mencapai Rp. 16,01 trilyun, kemudian pada tahun 2006 turun kembali menjadi Rp. 6,68 trilyun.

Sebagai dampak krisis perekonomian global pada tahun 2008, Kabupaten Bekasi turut mengalami imbasnya, hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor mengalami penurunan dari 3.74 milyar US$ pada tahun 2007 menjadi 2.10 milyar US$ pada tahun 2008. Nilai ekspor tertinggi dengan tujuan Uni Eropa. Namun demikian, nilai impor mengalami kenaikan dari 33.20 juta US$ di tahun 2007 menjadi 206.22 juta US$ pada tahun 2008. Nilai impor yang jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor menunjukkan Kabupaten Bekasi mempunyai nilai neraca perdagangan terhadap luar negeri mengalami defisit.

2.3.5. Pariwisata

Potensi pariwisata yang sedang dikembangkan di Kabupaten Bekasi sampai saat ini meliputi:

1. Potensi Pantai Muara Gembong

   a. Pantai Muara Beting, sepanjang 4 km dengan kosentrasi habitat burung migasi asal Cina Selatan & Pasific, terdapat lutung hitam (langka), buaya (rawa) dan hutan bakau sepanjang pantai berbatasan dengan Karawang.

   b. Pantai Muara Bendera berupa pantai terbuka berbentuk semenanjung menghadap ke laut Jawa, terdapat satu tempat terbit (*sun rise*) & tenggelam matahari (*sunset*), juga merupakan tempat pertemuan angin darat dan angin laut sehingga udara tidak panas.

   c. Muara Gobah merupakan Muara Sungai Citarum sepanjang 7 Km, lebar 40 m, relatif dekat dengan Jakarta dan terdapat banyak tambak & hasil ikan bandeng, udang, cumi–cumi, kerang, kakap, bawal, tenggiri, haremis, lobster, rumput laut dan lain-lain. Potensi wisata ini dapat dijadikan wisata kuliner sekaligus menyatu dengan daerah nelayan, imigrasi nelayan dan budaya nelayan.

2. Potensi Bojong Manggu (sebagai wisata pedesaan), obyek wisata yang ada di daerah ini antara lain :

   a. Bumi perkemahan pramuka Karang Kitri.
   b. Panorama Gunung Pangrango & Gunung Gede.
   c. Keberadaan Situ Abidin & Situ Bedeng.
   d. Jalan Kabupaten yang cukup memadai untuk dijadikan sarana olah raga (Fun Bike).
   e. View pertanian, peternakan , perkebunan rakyat.
   f. Wisata olah raga (*outbond*).

3. Potensi wisata air Kali Malang sepanjang Tegal Gede – Tegal Danas

4. Potensi wisata industri dalam kawasan industri. Wisata dalam rangka melihat proses produksi dan seluruh aktivitas dalam kawasan industri.

5. Potensi Desa Kertarahayu Kecamatan Setu (potensi obyek dan daya tarik wisata minat khusus), yang terdiri dari :

   a. Wisata minat khusus rekreasi air.
   b. Wisata minat khusus agro.
   c. Wisata minat khusus taman satwa dan flora.
   d. Wisata minat khusus tempat kerajinan (Kamasan)

2.3.6. Keuangan daerah

Pada Tahun anggaran 2008 penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.192.025.275.655 milyar atau naik 16,6 % dari tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan penerimaan ini disebabkan oleh adanya otonomi daerah yang menyebabkan berubahnya pos-pos penerimaan daerah. Penyumbang penerimaan daerah terbesar adalah dana perimbangan yang mencapai 977,738 Milyar terdiri dari bagi hasil Pajak 401.219 milyar, bagi hasil bukan pajak 43,048 milyar, Dana Alokasi Umum 525,365

milyar, Dana Alokasi Khusus Rp.8,105 milyar dan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi sebesar 36,222 Milyar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2009 sesuai target indikator makro pembangunan, PAD ditetapkan sebesar Rp.236.597.109.948,-, dan realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.289.882.982.295,- atau terdapat *over target* sebesar 122.52%. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja pengelolaan PAD setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 26.294.277.973,- realisasi mencapai 102,65% atau Rp. 26.991.358.363,- sehingga terdapat *over target* sebesar Rp. 697.080.390,-.

2.3.7. Kemiskinan dan Pengangguran

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi tahun 2009 menunjukkan realisasi angka kemiskinan mencapai 17,34% yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 385.845,69 jiwa dari total penduduk sebesar 2.225.177 jiwa. Angka Kemiskinan pada tahun 2009 di targetkan sebesar 20,98% dari total keluarga, Diharapkan rasio angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi dari tahun ketahun dapat mengalami penurunan, dengan program yang mengarah pada penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan, dan peningkatan nilai tambah (*value added*) pada produk yang dihasilkan. Selain itu diperlukan ketersediaan prasarana dan sarana fisik yang memadai sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Keluarga Pra Sejahtera, merupakan keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, sedangkan Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Pada tahun 2009 persentase keluarga Pra Sejahtera ditargetkan sebesar 27,50% dalam RPJMD, sedangkan realisasi berdasarkan hasil pendataan keluarga oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2009 adalah sebesar 26,18% (turun sebesar 1,32%).

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa capaian kinerja pembangunan daerah dalam rangka pengentasan keluarga pra sejahtera mencapai hasil yang diharapkan. Namun upaya untuk menurunkan jumlah keluarga pra sejahtera ini harus terus dilakukan dengan jalan memutus lingkaran kemiskinan melalui peningkatan aspek pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga pada akhirnya akan melahirkan generasi yang lebih berdaya guna.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menggambarkan proporsi jumlah penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2009, target yang ditetapkan sebesar 12,57%, sedangkan realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 13,29%, dari jumlah angkatan kerja sebanyak 912.637 tenaga kerja, dengan jumlah angka pengangguran sebanyak 137.974 orang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka TPT ini tetap, atau tidak mengalami perubahan. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi masih cukup

tinggi. Hal ini antara lain dikarenakan terjadinya ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Faktor migrasi ke Kabupaten Bekasi juga menjadi salah satu sebab tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya masalah pengangguran menjadi perhatian kita bersama.

Dari komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, pencari kerja masih didominasi lulusan SLTA umum non kejuruan dan lapangan pekerjaan yang ditekuni terlihat masih didominasi sektor pertanian dan jasa.

Tahun 2008 penduduk yang berumur 15 tahun ke atas adalah mereka yang tergolong penduduk usia kerja. Tahun 2008 kelompok usia ini berjumlah 1.513.029 orang atau sebanyak 69% dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Bekasi. Pencari kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sebanyak 27.938 orang dan secara keseluruhan kemampuan ekonomi Kabupaten Bekasi dalam menyerap tenaga kerja hanya 24.9%.

Sementara dilain pihak, Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta seringkali dianggap sebagai daerah tempat mencari mata pencaharian. Faktor urbanisasi ke Kabupaten Bekasi juga menjadi salah satu sebab tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya masalah pengangguran harus tetap menjadi perhatian yang serius.

2.4. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi bagi daerah serta kesiapan menghadapi globalisasi masih sangat rendah. Permasalahan ini utamanya bersumber pada kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, lingkungan yang belum kondusif untuk tumbuh berkembangnya kemampuan iptek daerah yang terkait dengan belum kuatnya kelembagaan dan kebijaksanaan operasional iptek di daerah, masih lemahnya keterkaitan inter dan antara lembaga litbang dan atau penyedia teknologi dengan dunia bermuara pada rendahnya aksesibilitas pengguna teknologi, khususnya kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) terhadap teknologi, manajemen dan sumber daya produktif lainnya, serta masih sangat terbatasnya proses penerapan, pemanfaatan, pemasyarakatan, pengembangan maupun penguasaan teknologi yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tumbuh berkembangnya teknologi dan produk unggulan daerah, proses nilai tambah, daya saing usaha dan produk, maupun efektivitas dan efisiensi proses pembangunan secara umum.

2.5. SARANA DAN PRASARANA

Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah dapat dilihat dari aspek perhubungan dan transportasi, sumber daya air, telekomunikasi, sarana dan prasarana dasar pemukiman, listrik dan energi.

Dari aspek perhubungan dapat dilihat dari perkembangan kondisi jalan. Pada tahun 2009, jalan Kabupaten Bekasi dalam kondisi mantap ditargetkan sepanjang 746 Km yang meliputi jalan kondisi baik 353 km dan kondisi sedang 393 km, realisasinya mencapai 704,56 km meliputi jalan kondisi baik 341,90 km dan kondisi sedang 362,64 km. Pembangunan jalan lingkungan pada Tahun 2009 cukup besar dengan jumlah sebanyak 564 ruas.

Fasilitas pelayanan bidang transportasi di Kabupaten Bekasi meliputi terminal dan stasiun kereta api. Keberadaan terminal memiliki peranan penting dalam mendukung pergerakan penumpang antarkota antarprovinsi maupun antarkecamatan dalam lingkungan Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi mempunyai terminal angkutan penumpang / umum yang terdiri dari terminal 1 lokasi dan sub terminal 4 lokasi, stasiun terminal non bus sebanyak 80 lokasi dan shelter bus sebanyak 20 lokasi. Stasiun kereta api meliputi Stasiun Tambun, Cibitung, Cikarang, Lemahabang dan Kedunggede. Dari kelima stasiun tersebut dapat membantu meringankan penyediaan sarana transportasi dan mobilisasi kebutuhan masyarakat dari dan ke Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi memiliki dua sistem pengendali banjir yaitu : (1) Sistem Flood Way Cikarang Bekasi Laut (CBL) dimulai dari bendung CBL pada Kali Cikarang mengalir ke arah Barat menampung aliran Kali Cikarang, Kali Sadang, Kali Jambe dan Kali Bekasi. (2) Sistem *Flood Way* Cilemahabang - Ciherang yaitu mulai dari Bendung Lemah Abang menampung aliran Kali Cilemahabang, Kali Wulu, Kali Beureum Dan Cipagadungan. Kondisi kedua pengendali banjir tersebut saat ini sudah mengalami sedimentasi yang tinggi sehingga menimbulkan banjir hampir setiap tahun di lima belas Kecamatan di Wilayah Utara Kabupaten Bekasi.

Jaringan irigasi teknis terbesar adalah di Daerah Irigasi (DI) Jatiluhur dengan cakupan pelayanan seluas 51.348 ha. Kondisi jaringan tersebut 36% baik, 35% rusak ringan dan sisanya 29% rusak berat. Kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi tersebut sesuai amanat Undang-Undang SDA nomor 7 Tahun 2004 menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Citarum dan Perum Jasa Tirta II. Lahan irigasi dibedakan antara irigasi teknis dan setengah teknis, target yang ditetapkan pada tahun 2009 yaitu irigasi teknis seluas 31.246 Hektar dan realisasinya seluas 35.727 Ha, sedangkan untuk irigasi setengah teknis target seluas 5.391 Ha terealisasi seluas 7.035 Ha. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan luas lahan sawah yang terairi secara irigasi teknis dan setengah teknis, berarti adanya peningkatan pemeliharaan saluran irigasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2008 yaitu 34.520 Ha untuk irigasi teknis dan 7.877 Ha untuk irigasi setengah teknis, penurunan irigasi setengah tekinis karena berubahnya fungsi saluran irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis.

Kerawanan air bersih terdapat di lima belas (15) Kecamatan di Kabupaten Bekasi, sumber kerawanan tersebut diantaranya yaitu tidak tersedianya sumber air baku permukaan setiap saat (tergantung pada musim), belum optimalnya pelayanan PDAM dan kondisi air tanah di wilayah tersebut kurang bagus. Saat ini daerah rawan air bersih memenuhi kebutuhannnya dengan membeli air galon isi ulang / tukang dorong.

Pelayanan air minum untuk penduduk Kabupaten Bekasi diselenggarakan oleh PDAM Bekasi yang saat ini melayani dua wilayah yaitu Kota dan Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi terdapat 10 (sepuluh) cabang/unit pelayanan dengan kapasitas total terpasang 555 liter/detik. Sumber air baku untuk penyediaan air minum berasal dari air permukaan yaitu dari Saluran Tarum Barat. Produksi air minum PDAM Bekasi untuk wilayah Kabupaten Bekasi pada tahun 2008 adalah 16.8 juta m^3, sedangkan volume air yang terjual 12.5 juta m^3, adapun sisanya yaitu 4.2 juta m^3 adalah berupa kebocoran, kesalahan pencatatan/administrasi dan pemeliharaan. Sampai dengan tahun 2008, daerah pelayanan PDAM Bekasi untuk Kabupaten Bekasi mencakup 9 kecamatan yaitu Cikarang Pusat, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Bojongmangu, Setu, Serang Baru, Cibarusah, Cikarang Timur dan Kedungwaringin. Jumlah penduduk yang terlayani oleh PDAM Bekasi sekitar 45.993 jiwa dari 2,225,177 jiwa (2,1%) penduduk Kabupaten Bekasi.

Tahun 2009 untuk pelayanan air bersih perkotaan ditargetkan 54.800 sambungan rumah (SR) realisasi 62.555 SR, sedangkan untuk pelayanan air bersih perdesaan target 7.120 kepala keluarga (KK) realisasi 6.550 KK. Capaian yang diperoleh tahun 2009 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti kecenderungan kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat dan kondisi hidrogeologi Kabupaten Bekasi yang kurang bagus, sehingga pemenuhan kebutuhan air bersih diupayakan melalui PDAM serta dukungan anggaran baik dari internal PDAM, APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi juga dari pinjaman Asia Development Bank (ADB).

Apabila melihat bahwa kondisi masih rendahnya cakupan pelayanan air minum bagi penduduk Kabupaten Bekasi, maka pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan cakupan penduduk yang dapat terlayani air minum. Keberadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Swasta di Kabupaten Bekasi relatif sedikit dan bersifat terbatas. Kehadiran SPAM milik swasta lebih disebabkan oleh kehadiran kawasan-kawasan industri yang memerlukan air bersih untuk kegiatannya sehingga hanya sedikit alokasi pasokan airnya untuk keperluan domestik. Ada tiga pengembang perumahan yang telah mengembangkan pelayanan air bersih untuk kebutuhan domestik walaupun terbatas hanya melayani perumahan yang yang berada di kawasan tersebut yaitu Lippo Cikarang, Jababeka dan Delta Mas. Kapasitas produksi dari sistem yang dimiliki oleh swasta cukup besar sekitar 1.958 liter/detik. Kapasitas tersebut terbesar untuk melayani kawasan inidustri sedangkan untuk perumahan hanya melayani 84.450 jiwa.

Sarana kebersihan yang dimiliki pemerintah daerah saat ini adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Burangkeng Kecamatan Setu dengan luas 7.6 Ha, dan saat ini sedang dalam tahap pembebasan seluas 5000 M². Pada akhir tahun 2008 kapasitas TPA Burangkeng sudah jenuh, sebagai gantinya pemerintah daerah masih memproses pembebasan lahan seluas 30 Ha di Kecamatan Bojongmangu.

Tahun 2008 jumlah pelanggan listrik PLN sebanyak 469.830 pelanggan, dengan jumlah gardu induk sebanyak 9 buah. Daya Terpasang listrik sebesar 999.522.340 KVA dengan pemakaian (daya terpasang) sebesar 2.831.406.247 KWH.

2.6. POLITIK

Proses demokratisasi diawali dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997 yang mendorong reformasi dalam segala bidang termasuk sistem politik. Perubahan politik secara besar-besaran terjadi dan tercermin pula dalam kehidupan politik di Kabupaten Bekasi. Untuk dan atas nama demokratisasi, proses perubahan politik berlangsung sedemikian cepat ke arah kebebasan. Perubahan tersebut membawa dampak positif yang mendorong paradigma penyelenggaraan pembangunan partisipatoris, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Kendati demikian, proses perubahan politik yang berorientasi kepada penataan ulang sistem penyelenggaraan negara tersebut telah berkembang nyaris tanpa kendali, karena diterjemahkan sebagai proses pembebasan. Kondisi yang mewujud kemudian adalah berkembangnya euforia yang mencerminkan kegamangan menghadapi perubahan. Euforia yang tanpa kendali menjadikan pembangunan politik masih mencari bentuk yang tepat. Dalam masa pencarian bentuk dan keseimbangan yang baru, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi telah berhasil menciptakan situasi yang kondusif, yang dapat dilihat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1999, Pemilu Tahun 2004, dan Pemilu Tahun 2009 baik dalam pemilihan Presiden maupun pemilihan anggota DPR dan DPD, serta DPRD.

Demikian pula pemilihan kepala daerah secara langsung, dapat berlangsung dengan tertib, meskipun terdapat beberapa kendala, tetapi dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu proses selanjutnya. Sepanjang kurun waktu 2005 - 2025 secara nasional akan terjadi penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Perkembangan demokrasi juga ditandai dengan adanya perubahan hubungan pusat dengan daerah dan perbedaan posisi DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam pemerintahan. Perubahan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri dan mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya juga mengatur hubungan kewenangan antar tingkat pemerintahan.

Sampai dengan saat ini, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah belum terlaksana secara optimal serta menghadapi beberapa kendala yang disebabkan oleh adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan dari berbagai tingkat pemerintahan serta belum adanya peraturan untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara komprehensif.

2.7. HUKUM

Pembangunan hukum di daerah selama ini lebih difokuskan pada penyusunan produk hukum daerah dalam upaya penguatan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, namun belum menyentuh substansi yang berkaitan erat dengan penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat adalah faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor yang terdapat di luar sistem hukum. Adapun faktor yang terdapat di dalam sistem hukum meliputi peraturan perundang-undangan, aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan faktor politik.

Permasalahan yang cukup krusial terjadi saat ini adalah faktor dari sistem hukum dan aparatur penegak hukum. Adapun dari sistem hukum yaitu peraturan perundang-undangan sering ditemui beberapa peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang tidak dapat sepenuhnya dioperasionalisasikan karena konsep yang tidak jelas juga karena keharusan untuk ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaannya yang acapkali terlalu lama sehingga kalaupun aturan pelaksanaan itu pada akhirnya keluar, maka sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Disamping itu masih adanya peraturan hukum yang saling bertentangan yang belum terevaluasi oleh pemerintah pusat sehingga daerah mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat berpengaruh pula dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun dari sisi yang lain yang ada keterkaitan dengan penegakan hukum adalah sumber daya aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum merupakan kunci karena dipundak mereka beban penegakan hukum diletakan. Keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum belum maksimal karena sistem hukum nasional yang kurang mendukung, tingkat kesadaran hukum masih rendah, dan kualitas aparat penegak hukum belum memadai. Pembangunan hukum dalam kerangka *good governance* diukur berdasarkan orientasi pemerintah *(government orientation)* yang

menunjukan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik dengan tolok ukur penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, konsistensi dalam penegakkan hukum dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemegang otoritas.

Dengan demikian, pembangunan hukum berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemberlakuan dan penegakkan berbagai aturan hukum guna melindungi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkeadilan. Berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, telah disusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menjadi acuan bagi semua pihak di daerah dalam implementasi peraturan perundangundangan mengenai HAM, terutama lembaga pemerintah yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan memenuhi hak asasi warga negara.

2.8. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum ditentukan oleh perkembangan kriminalitas, termasuk terkendali dan berkurangnya kecenderungan friksi dan konflik sosial berdasarkan perkembangan kepentingan masyarakat yang beragam. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum di Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi, antara lain dipengaruhi oleh letak geografis yang berbatasan dengan ibukota Jakarta dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen, terdapat kawasan dan zona industri serta banyaknya permasalahan kepemilikan lahan. Namun demikian tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum dimaksud, diharapkan dapat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini tergantung pada peran dan upaya pemerintah daerah dalam penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif di Kabupaten Bekasi.

Penciptaan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, juga berkaitan dengan konsistensi dalam penegakan hukum, dan supremasi hukum yang dihormati. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan faktor utama yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram, tertib dan damai, telah dibangun melalui peningkatan peran masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan.

2.9. PEMERINTAHAN DAN APARATUR

Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan sumber daya termasuk di dalamnya pengembangan organisasi, sistem remunerasi, sistem perencanaan dan pengembangan karir menjadi penting dan prioritas, khususnya dalam mewujudkan kondisi pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan. Bertolak dari pengalaman empirik penyelenggaraan pemerintahan, kelemahan yang dihadapi oleh sebagian besar organisasi pemerintah adalah struktur organisasi perangkat daerah cukup besar, aparatur belum didayagunakan secara optimal, dan pelayanan publik masih belum memuaskan.

Dalam rangka reformasi birokrasi yang ingin diwujudkan yaitu terjadinya perubahan kultur birokrasi yang mengarah kepada profesionalisme, beretika, impersonal dan taat aturan, permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan aparatur antara lain belum berlangsungnya proses perencanaan karir sesuai dengan kebutuhan organisasi dan manajemen pemerintahan serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur. Hal lainnya adalah pola mutasi berbasis promosi dan pertukaran antar fungsi untuk memperkaya pengalaman aparatur masih terkendala oleh proses regenerasi yang lamban. Apabila permasalahan tersebut tidak segera dibenahi, akan mempengaruhi kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.10. TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Dalam struktur tata ruang Kabupaten Bekasi sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dalam perkembangannya. Kabupaten Bekasi dalam kaitannya dengan kebijakan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek yang secara geografis lebih dekat aksesibilitasnya dengan DKI Jakarta memiliki perkembangan yang sangat pesat, namun demikian ditinjau dari aspek pemerataan pembangunan masih belum optimal. Kabupaten Bekasi bagian selatan berkembang sangat pesat, hal ini erat kaitannya dengan keberadaan kawasan industri dan jaringan jalan tol yang melintas di bagian Selatan Kabupaten Bekasi. Bagian utara Kabupaten Bekasi masih belum maksimal perkembangannya karena masih berupa wilayah perdesaan.

Selain itu, di wilayah Utara terdapat zona hutan lindung yang pengembangannya perlu diawasi dan perlu melibatkan berbagai instansi, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Barat. Selain masalah kesenjangan wilayah Utara dan Selatan, terdapat pula kesenjangan pada wilayah perbatasan, dimana penyediaan sarana dan prasarana wilayah di bidang permukiman, jalan dan drainase masih kurang memadai bila dibandingkan dengan wilayah perbatasannya terutama wilayah Kota Bekasi dan DKI Jakarta.

Sesuai dengan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari kawasan andalan Bodebekpunjur, yang diklasifikasikan sebagai wilayah yang dikendalikan pengembangannya dengan mendorong kegiatan perkotaan yang berdaya saing dan ramah lingkungan, membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan potensial yang menyebabkan alih fungsi lahan lindung dan sawah, membatasi pengembangan kegiatan perkotaan yang menarik arus migrasi tinggi serta mengembangkan sistem transportasi masal.

Pola tata ruang Kabupaten Bekasi sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Barat mengamanatkan proporsi kawasan lindung sebesar 12 % dari luas wilayah, yang terbagi menjadi kawasan hutan lindung seluas 6.434 ha dan kawasan lindung non hutan (budidaya) seluas 72.250 ha. Kawasan lindung tersebut berada di wilayah utara, tepatnya di Kecamatan Muaragembong. Penetapan wilayah konservasi ini menjadikan pemerintah perlu mengatur dan mengendalikan pertumbuhan lahan terbangun, sehingga ancaman terhadap daya dukung lingkungan menjadi terkendali. Pengendalian tersebut masih belum optimal karena setiap tahun masih terjadi bencana banjir yang mengancam daya dukung lingkungan. Pesatnya perkembangan di Kabupaten Bekasi menimbulkan kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman dan industri.

2.11. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai salah satu mitra DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi memiliki fungsi sebagai daerah permukiman, industri dan perdagangan. Dari sisi kualitas lingkungan, Kabupaten Bekasi mengalami penurunan kualitas yang ditunjukkan melalui penurunan kondisi udara, air, dan tanah. Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi kualitas kesehatan lingkungan. Pertama, faktor alam, kedua aktifitas industri dan ketiga aktifitas manusia.

Kualitas Lingkungan Hidup, menggambarkan kualitas air sungai dan udara terhadap baku mutu. Pengujian kualitas Air Sungai melalui pengukuran kualitas Biochemical Oxygen Demand / BOD (mg/l). BOD secara tidak langsung menunjukkan jumlah zat organik yang ditumpahkan ke badan air, semakin tinggi nilai BOD berarti kualitas air semakin rendah. Pada Tahun 2009 pengukuran BOD di DAS Kali Sadang dan Cikedokan ditargetkan 135 mg/L realisasinya 79,75 mg/L pada DAS Cikedokan dan 78,00 mg/L pada DAS Sadang, nilai tersebut merupakan nilai dari beberapa pengukuran di DAS Sadang dan Cikedokan. Walaupun nilai BOD masih dibawah target yang ditetapkan, namun apabila dibandingkan dengan hasil pengukuran pada tahun 2008, terdapat peningkatan Nilai BOD sehingga memerlukan peningkatan dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari IPAL Industri baik yang berlokasi di zona ataupun kawasan Industri. Selain itu limbah cair yang berasal dari kegiatan domestik dan kegiatan lainnya harus menjadi perhatian karena dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas air sungai. Pengujian juga dilakukan melalui pengukuran Chemical Oxygen Demand / COD (mg/l), dimana COD menunjukan jumlah bahan kimia secara total yang masuk ke badan air. Semakin tinggi nilai COD maka kualitas air semakin rendah. Tahun 2009 di DAS yang sama ditargetkan 240 mg/l realisasinya di DAS Cikedokan adalah 299,60 mg/l , sedangkan di DAS Sadang adalah 299 mg/l. Nilai COD pada kedua sungai tersebut telah melebihi target yang ditentukan, sehingga memerlukan perhatian yang lebih dalam hal pengendalian dan pengawasan, terhadap pembuangan air dari IPAL di Zona dan Kawasan Industri.

Kualitas Udara di Perkotaan Cikarang melalui pengukuran SO_2 tahun 2009 ditargetkan <30 µg/Nm^3 realisasinya mencapai <25,70 µg/Nm^3. Pb ditargetkan <0,33 µg/Nm^3 realisasinya <0,04 µg/Nm^3. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di perkotaan Cikarang masih dalam batas toleransi.

Hal-hal yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup diantaranya adalah semakin berkurangnya hutan mangrove di kawasan pantai utara Kabupaten Bekasi yang menyebabkan abrasi dan kerusakan ekosistem di pesisir. Berkurangnya ruang terbuka (*run off)*, alih fungsi situ dan sedimentasi drainase menyebabkan banjir dan berkurangnya cadangan air tanah sehingga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Aktivitas industri yang mempengaruhi kualitas lingkungan adalah pencemaran udara dan air, penggunaan air tanah dalam, serta pembuangan limbah industri. Aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan adalah rendahnya pengelolaan limbah domestik, sanitasi yang buruk dan penambangan liar.

BAB III

ANALISA DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN BEKASI

Bagian ini merupakan analisa dan prediksi kondisi umum di wilayah Kabupaten Bekasi yang berisi tentang analisa potensi dan masalah serta analisa terhadap isu-isu stategis sehingga mampu menggambarkan realitas yang ada pada saat sekarang dan 20 tahun kedepan.

3.1. ANALISA TERHADAP POTENSI DAN MASALAH

3.1.1. Analisa Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup

1) Proyeksi Peluang

Batas wilayah administrasi akan semakin jelas karena masing-masing daerah tetangga dalam era otonomi daerah akan lebih memperhatikan batas wilayah mereka sehingga tata ruang untuk Kabupaten Bekasi bisa diperjelas dan dipertegas.

2) Proyeksi Ancaman

Era otonomi daerah bisa menimbulkan ancaman atas batas wilayah laut Kabupaten Bekasi dengan daerah tetangga mengingat pengelolaan sumberdaya ikan laut, dll lintas batas cenderung mengaburkan perbatasan yang sesuai dengan wilayah administrasi.

Penggunaan lahan yang merupakan pekerjaan pemerintah pusat kemungkinan masih ada yang tanpa persetujuan daerah sesuai kewenangan masing-masing sehingga menggangu penerapan tata ruang yang sudah disepakati di daerah.

3) Proyeksi Keberhasilan

Masih tersedia lahan yang cukup untuk dapat dikembangkan secara optimal untuk mendukung berbagai sektor terutama sektor industri dan ada kecenderungan kecamatan dan desa semakin memperhatikan pemanfaatan lahan dan lingkungan masing masing, mengingat dampak pembangunan dimasa lalu kurang memberikan kontribusi yang positif kepada penduduk lokal.

Kepeduliaan masyarakat lewat LSM dan lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa terhadap lingkungan kecenderungannya meningkat dan hal ini mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan lingkungan menjadi lebih sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

4) Proyeksi Permasalahan

Kecenderungan dinamika perubahan kondisi geografis morfologis karena semakin pesatnya akselerasi pembangunan wilayah perkotaan mereduksi standar lingkungan yang sehat dan disisi lain tenaga kerja profesional cenderung meningkat dan tidak

sebanding dengan kebutuhan pembangunan/industri dan terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk konsisten dalam penerapan tata ruang wilayah.

3.1.2. Analisa Kondisi Demografis

1) Proyeksi Peluang

Interaksi yang lebih intens dengan dunia yang lebih luas baik regional maupun internasional membuka peluang terhadap akses ke sumber-sumber baru yang mungkin lebih baik dan lebih murah dimana sebelumnya tidak ada. Berbagai hasil informasi dan teknologi dapat menambah wawasan dan komitmen bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan spiritual.

2) Proyeksi Ancaman

Dalam dua dasawarsa kedepan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bekasi akan menghadapi era keterbukaan yang lebih luas. Era globalisasi makin kental dengan berbagai dampak yang dibawanya seperti budaya dan gaya hidup yang tidak cocok dengan akar budaya masyarakat yang kontraproduktif terhadap kualitas SDM.

Migrasi yang masuk akan bertambah deras termasuk yang berasal dari luar negeri pada era globalisasi. Umumnya migrasi masuk ditandai dengan keterampilan keahlian yang lebih baik dari penduduk lokal sehingga ini akan merebut kesempatan kerja yang memang sulit diisi oleh tenaga kerja lokal.

3) Proyeksi Permasalahan

Kualitas pembangunan manusia yang rendah seperti ditunjukkan posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bekasi menunjukkan gambaran beban yang semakin berat dalam menghadapi persaingan global.

Dari komposisi demografi Kabupaten Bekasi sudah dirasakan sedikit jebakan demografis sebagai dampak lain dari menigkatnya mutu kesehatan dalam bentuk menurunnya kematian bayi dan balita dibarengi dengan meningkatnya tingkat harapan hidup.

Meski angka pengangguran terbuka relatif rendah akan tetapi terdapat kecenderungan untuk meningkat terutama akibat dampak krisis moneter awal tahun 2009 dan perubahan harga-harga yang terjadi dalam tiga tahun terkhir yang mengakibatkan korporasi perlu mengkalkulasi ulang struktur biaya produksi perusahaan.

IPM Kabupaten Bekasi berada diurutan ke 11 dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Tingkat ini tidak rendah, namun untuk bersaing di tingkat nasional maupun global tentu masih perlu ditingkatkan. Meski terus membaik, indikator kesehatan seperti angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka kurang gizi pada balita di Kabupaten Bekasi harus terus ditingkatkan.

Pada aspek pendidikan, indikator melek huruf, enrollment serta capaian tingkat pendidikan tertinggi di Kabupaten Bekasi juga masih memerlukan optimalisasi yakni karena yang paling dominan hanya tamat SD. Hal ini harus segera ditingkatkan secara konsisten karena arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 menyangkut mutu SDM yang urgent dalam menjalankan pembangunan. Sementara penyediaan lapangan kerja untuk klasifikasi lulusan pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Fakta menunjukksn bahwa tingkat pengeluaran riil perkapita untuk Kabupaten Bekasi nilainya masih rendah, sehingga

menggambarkan bahwa tingkat hidup masyarakat Kabupaten Bekasi masih belum jauh dari tingkat kemiskinan.

4) Proyeksi Keberhasilan

Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif terkendali di Kabupaten Bekasi relatif lebih ringan bebannya dalam menghadapi desakan jumlah penduduk. Hal ini memberi kesempatan luas bagi daerah untuk menata pembangunannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Angka pengangguran terbuka yang selama ini dapat dikendalikan sehingga relatif rendah dapat menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya tingkat produktivitas dan produksi yang tinggi dalam ekonomi.

3.1.3. Analisa Ekonomi Dan Sumberdaya Alam

1) Proyeksi Peluang

Era otonomi daerah menciptakan kesempatan bagi Kabupaten Bekasi untuk secara mandiri mengelola perekonomiannya secara profesional untuk kepentingan masyarakat didaerahnya sendiri.

Globalisasi dan keterbukaan yang semakin meluas menjanjikan peluang bagi akses kepada sumber-sumber input baik kapital, teknologi dan skill secara bebas dan murah. Disamping itu juga, era ini membuka peluang pemasaran lebih luas bagi produk dan komoditas dengan daya saing tinggi. Trend kerjasama ekonomi dalam pengembangan strategi dan perangkat pendukungnya secara luas dalam hubungan dengan dunia luar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Kabupaten Bekasi.

2) Proyeksi Ancaman

Era otonomi daerah pada gilirannya juga menciptakan tantangan yang mesti di hadapi karena menuntut penanganan secara mandiri. Setiap negara didunia akan bersiap untuk menghadapi persaingan global yang makin bebas. Keunggulan skill, teknologi, dan kualitas produk yang dimiliki pihak luar dapat memasuki dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan produksi didaerah.

Ancaman kelangkaan energi dan sumber daya air di dunia mengharuskan Kabupaten Bekasi secara ekonomis mampu mengelola sumber-sumber dayanya secara efisien dan mencari berbagai alternatif pemenuhan hal tersebut.

3) Proyeksi Permasalahan

Kemampuan teknis, skill, teknologi dan profesionalitas yang masih rendah dimiliki oleh daerah menyebabkannya tidak mudah untuk mengontrol, merencanakan dan mengawasi secara optimal seluruh kegiatan eksporasi dan eksploitasi sumber daya alam sehingga terjadi berbagai aktifitas illegal di lapangan kehutananan, pertambangan dan perikanan.

Ketersediaan data dan informasi serta mutu perangkat teknologi informasinya yang masih ketinggalan menyebabkan sulitnya mengidentifikasi SDA yang dimiliki. Dampaknya adalah setiap kebijakan dan tindakan menjadi selalu terlambat.

Walaupun pendapatan perkapita terlihat terus meningkat serta tingkat pengangguran terbuka cenderung terus menurun, namun terdapat kecendrungan penyerapan tenaga kerja yang sangat lambat, sementara angkatan kerja pada periode yang sama tumbuh

dengan pesat. Gairah sektor industri terindikasikan menurun yang terlihat dari menurunnya jumlah unit industri serta lambatnya pertumbuhan produksi. Meski demikian pada 2008 sudah terlihat pulih bahkan menunjukkan peningkatan yang drastis.

Belum terbentuknya kawasan sentra industri dan perdagangan yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mampu bersaing di tataran regional, nasional, bahkan global. Perkembangan koperasi disemua sektor ekonomi pun terlihat semakin menurun. Hal ini dapat menjadi gambaran pola perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk UKM yang juga cenderung menurun. Padahal perkembangan UKM sebagai sarana otomatis pemerataan distribusi aset dan kesejahteraan bagi rakyat. Masih lemahnya struktur dan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat sehingga motivasi kewirausahaan dan tingkat partisipasi dalam gerak roda perekonomian sangat rendah.

Sektor pertanian diharapkan berperan besar namun produksi dan penyerapan terhadap tenaga kerjanya tumbuh lambat. Lambatnya perkembangan sektor pertanian dan UKM yang terdesak sektor industri membawa dampak pada lambatnya penyerapan tenaga kerja. Perlambatan ini juga mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. Jumlah penduduk miskin relatif masih tinggi dan perkembangannya cukup fluktuatif. Penurunan serupa juga dialami pada besarnya Dana Perimbangan dibanding periode sebelumnya.

Belum mapannya sarana-prasarana perekonomian bagi setiap kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi yang dapat menjamin terselenggaranya mobilitas yang cepat, lancar, layak dan optimal.

Penggunaan batubara sebagai bahan bakar alternatif setelah minyak bumi perlu dipikirkan agar pengelolaannya jangan membahayakan masa depan dan hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.

4) Proyeksi Keberhasilan

SDA yang melimpah merupakan potensi besar pengembangan ekonomi Kabupaten Bekasi. Kegairahan sektor produktif berupa tumbuhnya investasi bagi pengembangan SDA jika dikelola dengan profesional, akan menghasilkan rantai produksi dan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan.

Dominasi sektor pertanian dalam produksi dan penyerapan tenaga kerja saat ini merupakan potensi besar untuk pengembangan konsep agribisnis, terutama bagi sumberdaya pariwisata dan kelautan yang belum optimal dikembangkan. Peran sub sektor perkebunan dan perikanan yang besar dalam pertanian menjadi dasar yang kuat bagi perlunya komitmen untuk pengembangan agribisnis. Pertumbuhan Bank & Lembaga Keuangan lainnya dan Jasa lainnya yang tinggi menunjukkan ketersediaan sarana intermediasi sumber keuangan dan pelayanan yang dapat meningkatkan mobilisasi bagi pertumbuhan dunia usaha dan bidang lainnya.

3.1.4. Analisa Sektor Pertanian

1) Proyeksi Peluang

Kebijakan otonomi daerah (UU No.32 tahun 2004 dan PP No.25 tahun 2000 tentang Keuangan Daerah) memberikan kewenangan luas bagi daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan termasuk pertanian di daerahnya dan juga berkewajiban menjaganya agar kelestariannya terpelihara sehingga diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Melalui desentralisasi semakin besar peluang sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan pertanian di perdesaan. Dengan semangat baru ini sektor pertanian menjadi satu mencakup aktivitas-aktivitas yang terkait mulai dari subsistem hulu sampai subsistem hilir.

Adanya globalisasi berarti terciptanya pasar bebas dan mampu membuka peluang bagi usaha bidang pertanian/agribisnis dalam kemitraan maupun kesempatan pemasaran dan pembelian. Semakin meningkatnya permintaan terhadap produk-produk pertanian, perkebunan dan peternakan di masa mendatang, merupakan peluang pasar yang sangat besar.

2) Proyeksi Ancaman

Makin bertambahnya tingkat konsumsi, yang diindikasikan melalui peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi setiap tahunnya menyebabkan surplus beras selama kurun waktu lima tahun mengalami penurunan yang fluktuatif. Walaupun produksi padi selalu meningkat namun penambahan produksi tersebut masih di bawah peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Adanya globalisasi yang mengakibatkan semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan, berimplikasi akan semakin meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar (*market oriented*) dan semakin berperannya selera konsumen (*demand driven*) dalam menentukan aktivitas di sektor ini.

Kualitas produk pertanian yang berasal dari luar (*import*) karena berbagai faktor terutama faktor teknologi dan kebijakan internal negara masing-masing, hasilnya lebih baik dari yang dihasilkan daerah ini. Kondisi iklim yang kadang sulit diprediksi, merupakan ancaman tersendiri bagi pengembangan usaha di bidang pertanian. Persaingan antar daerah juga diindikasikan sebagai pemicu ancaman dalam bidang pertanian karena adanya otonomi daerah.

3) Proyeksi Keberhasilan

Adanya komitmen untuk merubah orientasi pembangunan pertanian dari pendekatan produksi menjadi “pendekatan agribisnis” sebagai bentuk “revitalisasi sektor pertanian”.

Tersedianya potensi dan sumberdaya pertanian yang cukup besar seperti masih tersedianya sumberdaya lahan pertanian yang belum dimanfaatkan serta banyaknya sumberdaya manusia atau angkatan kerja yang berusaha di sektor pertanian menciptakan potensi besar agribisnis di masa depan.

Pertumbuhan luas tanam, luas panen, dan produksi tanaman pangan (padi, palawija dan sayuran) dan perkebunan yang semakin meningkat, menjadikan Kabupaten Bekasi mengalami surplus beras pada tahun 1999-2003. Hal ini menunjukkan adanya potensi keunggulan dalam hal ketahanan pangan daerah melalui kegiatan agribisnis yakni subsistem agribisnis hulu (kegiatan ekonomi/industri) yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian.

4) Proyeksi Permasalahan

Data perkembangan keperluan dan penyediaan benih di Kabupaten Bekasi tahun 2004 menunjukkan bahwa persediaan benih yang ada di Kabupaten Bekasi masih belum mencukupi, sehingga untuk mencukupinya masih sangat tergantung dari luar.

Penggunaan Varietas Unggul dan benih bersertifikat masih terbatas. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman petani mengenai pentingnya benih bersertifikat. Penggunaan pupuk oleh petani belum memperhatikan tepat waktu, tepat dosis, dan tepat jenis.

Pada tanaman pangan, kehilangan hasil dalam menangani pasca panen masih cukup tinggi dari produksi yang dihasilkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan petani dalam penyediaan alat pasca panen sendiri. Organisme pengganggu tanaman (OPT), kekeringan dan kebanjiran juga merupakan salah satu penyebab kehilangan hasil. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sarana-prasarana dan akses petani bagi pengembangan sektor pertanian daerah, misalnya lantai jemur, gudang penyimpanan, kios saprodi, jalan usahatani, peralatan, mesin-mesin pertanian, dan sumber pembiayaan, serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas petugas/aparat dalam mendukung program pembangunan pertanian, seperti masih kurangnya tenaga penyuluh yang berperan penting bagi keberhasilan sektor pertanian.

Belum optimalnya pemanfaatan lahan disebabkan antara lain oleh:

- terbatasnya tenaga kerja (baik manusia, ternak kerja maupun mesin/traktor),
- tingkat kesuburan tanah yang rendah,
- belum tersedianya saluran irigasi &drainase yang baik dan memenuhi syarat,
- terbatasnya modal petani untuk mengelola usahataninya-dan
- adanya beberapa lahan yang cukup jauh dari domisili petani.

3.1.5. Analisa Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi

1) Analisa Terhadap Penggunaan Lahan

Kabupaten Bekasi membedakan Penggunaan tanah dibedakan atas tanah sawah dan tanah kering. Dengan luas wilayah 127.388 ha, persentase tanah sawah mencapai 43,23 % atau 55.074 ha, sisanya berupa tanah kering. Tanah sawah dengan irigasi teknis mencapai 65 %, setengah teknis 12,56 %, sederhana 1,48 % dan tadah hujan 13,81 %. Wilayah dengan tanah sawah yang luas yaitu Kecamatan Pebayuran, Sukawangi, dan Sukakarya, masing-masing 6.827 ha, 4.801 ha dan 3.802 ha. Penggunaan tanah kering paling banyak untuk bangunan dan halaman. Penggunaan tanah jenis ini paling luas di Kecamatan Cikarang Selatan, yaitu mencapai 1.955 ha, kemudian Kecamatan Cikarang Barat 1.856 ha

Penggunaan lahan tanah basah masih cukup besar meskipun menunjukkan penurunan sejak tahun 2002. Namun, lahan sawah yang tersedia masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan produksinya dan diharapkan dapat didorong untuk mendapatkan kembali predikat sebagai daerah lumbung padi di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi juga memiliki tambak yang terkonsentrasi di Kecamatan Tarumajaya dan Babelan. Rawa-rawa berdasarkan kecamatan terdapat cukup luas di kecamatan Setu, Bojongmangu dan Cikarang Utara.

Luas Tanah Menurut Penggunaannya Tahun 2003 – 2007

JENIS PENGGUNAAN	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Irigasi Teknis	37.493	37.483	35.286	34.520	34.352
Irigasi Setengah Tehnis	6.243	6.173	7.865	7.877	9.312
Irigasi Sederhana	3.300	3.300	3.065	3.662	701
Tadah Hujan	8.278	8.903	7.805	7.759	8.289
Lainnya	675	0	1.333	1.332	2.928
Jumlah Tanah Sawah	55.989	55.859	55.354	55.150	55.582
Pekarangan, Bangunan	22.206	21.830	21.426	20.330	19.925
Tegal, Kebun, Ladang, Huma	15.716	15.439	15.975	13.184	13.639
Hutan Negara	-	-	-	234	234
Rawa-rawa	161	139	139	116	100
Tambak	10.204	10.231	10.233	10.736	10.743
Penggembalaan	-	-	9.370	112	116
Kolam, Tebat, Empang	782	713	757	410	406
Tanah Sementara Tidak Diusahakan	1.264	713	1.031	1.551	1.551
Hutan Rakyat, Tanaman Kayu-kayuan	2.632	2.632	2.592	3.894	3.894
Perkebunan	1.013	1.013	1.013	-	631
Lainnya	17.417	18.819	18.868	21.046	20.567
Jumlah Tanah Kering	71.395	71.529	72.034	72.238	71.806
Jumlah / Total	127.384	127.388	127.388	127.388	127.388

Sumber : Kabupaten Bekasi dalam Angka 2008

Indikasi pesatnya perkembangan demografis dan ekonomi Kabupaten Bekasi dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu kecenderungan perkembangan kawasan terbangun, pola spasial izin lokasi untuk perumahan dan industri, serta dampaknya terhadap kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Sebagai salah satu kawasan yang lokasinya paling dekat, bahkan berbatasan, dengan Jakarta, Kabupaten Bekasi terkena imbas pesatnya perkembangan ekonomi dan sosial ibukota negara.

Tingginya tuntutan kebutuhan atas lahan perumahan menyebabkan perubahan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bekasi. Sawah, rawa, dan kawasan perkampungan penduduk asli berubah menjadi kawasan industri, kawasan perumahan permukiman realestate atau kawasan perumahan berkepadatan sedang-tinggi, dan penggunaan lahan non-pertanian lainnya. Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten

Bekasi berawal dari Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 yang menetapkan wilayah Bekasi sebagai salah satu wilayah pengembangan BOTABEK (Bogor-Tangerang-Bekasi), wilayah penyangga Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Penyangga dapat diartikan bahwa Bekasi harus "berperan serta" dalam menyediakan lahan perumahan bagi kebutuhan warga Jakarta. Perubahan penggunaan lahan ini bertambah semarak sejak dikeluarkannya Perda Provinsi Jawa Barat No. 13/1998, yang menetapkan Kabupaten Bekasi menjadi zona industri dan kawasan industri.

Perubahan penggunaan lahan ini tentu saja memberikan dampak pada pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bekasi. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Bekasi per tahun cukup tinggi, yakni 6,3%. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, dari 1,6 juta jiwa penduduk yang tercatat, 1,8% merupakan laju pertumbuhan alami. Sisanya 4,5% merupakan migrasi pendatang dari Jakarta dan daerah lain. Dari data kependudukan di tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi adalah 2,225,177 juta jiwa. Angka jumlah penduduk ini memperlihatkan semakin bertambahnya kawasan permukiman di Kabupaten Bekasi dan kawasan-kawasan pendukung aktivitas hunian.

Perkembangan fisik yang terjadi di Kabupaten Bekasi sejak ditetapkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Bekasi 2003-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2007, pada dasarnya merupakan wujud implementasi rencana tersebut dalam tahap pemanfaatan ruang. Perkembangan fisik tata ruang tersebut juga merupakan manifestasi perkembangan atau pertumbuhan wilayah secara ekonomi dan demografis, baik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal. Dengan melihat peta penggunaan lahan di tahun 2002 dapat disimpulkan bahwa perkembangan dan perubahan penggunaan lahan terpusat di sepanjang Jalan Tol Cikampek *(ribbon development),* atau yang dikenal dengan nama: Koridor Timur-Barat, Kawasan Perkotaan Cikarang. Penggunaan lahan disepanjang koridor ini adalah industri, permukiman dan tegalan, sementara di kecamatan-kecamatan lain masih didominasi oleh pertanian lahan basah. Berdasarkan pertimbangan atas perkembangan penggunaan lahan dan pusat perkembangan wilayah Kabupaten Bekasi inilah, Ibukota Kabupaten Bekasi dipindahkan ke Kawasan Perkotaan Cikarang, Kecamatan Cikarang Pusat, dimana perencanaannya menjadi satu kesatuan dengan kawasan pembangunan terpadu Delta Mas.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi terbagi atas klasifikasi lahan kering dan lahan basah. Penggunaan lahan kering terdiri dari tanah untuk bangunan, halaman, tegal, kebun, rawa-rawa, tambak, kolam, tebat, empang, dan lain-lain. Sedangkan penggunaan lahan basah terdiri dari irigasi teknis dan ½ teknis, irigasi sederhana dan tadah hujan.

2) Analisa Terhadap Kebijakan Tata Ruang

Kabupaten Bekasi yang termasuk dalam Kawasan Metropolitan yang diarahkan dengan fungsi kota sebagai PKN dengan jenis pelayanan berupa jasa pemerintahan, keuangan, perdagangan dan industri dengan strategi pengembangan berupa :

- Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan;
- Mendorong terselenggaranya pembangunan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah;
- Mendorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan;

- Mempertahankan fungsi Jabodetabek sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dan bahkan untuk seluruh wilayah nasional, dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional;
- Mendorong keterpaduan penataan kota antara Kota Jakarta sebagai kota inti dan kota-kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi sebagai kota satelit;
- Memantapkan pembagian peran dan fungsi kota Tangerang dan Bekasi sebagai pusat pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan permukiman, serta Bogor, Depok dan selatan Jakarta sebagai pusat permukiman, pendidikan, dan kegiatan pariwisata serta kegiatan perkotaan lainnya yang terkendali;
- Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (*Urban sprawl*) dan pertumbuhan menerus (*konurbasi*) melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota inti dan kota satelit disekitarnya.
- Meningkatkan aksesibilitas antara kota inti Jakarta dengan kota-kota satelitnya melalui penataan pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas pelayanan transportasi di sepanjang koridor Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi, Jakarta-Bogor, dan Jakarta-Depok.

Menurut arahan pengembangan Kabupaten Bekasi didalam Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Kawasan JABODETABEKPUNJUR, Kabupaten Bekasi termasuk kawasan Jabodetabekpunjur yang merupakan kawasan strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu.

Kawasan Jabodetabekpunjur mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yaitu sebagai pusat kegiatan nasional. Peran dan kedudukan Jabodetabekpunjur menjadi pusat kegiatan jasa, industri, pariwisata dan pintu gerbang nasional. Sebagai pintu gerbang nasional kawasan Jabodetabekpunjur berperan dalam hubungannya dengan dunia internasional. Peran sebagai pusat kegiatan jasa, industri, pariwisata memiliki skala pelayanan nasional, regional dan internasional. Dengan kedudukan dan peran tersebut, kawasan Jabodetabekpunjur dapat dijadikan indikator bagi pembangunan nasional.

Pusat-pusat permukiman di Kabupaten Bekasi berperan sebagai *counter magnet* untuk mengurangi tekanan penduduk dengan segala aktifitasnya ke DKI Jakarta. Pengembangan pusat-pusat permukiman di Kabupaten Bekasi dilakukan melalui pengembangan sektor industri yang terkait dengan sektor jasa yang telah berkembang saat ini dalam rangka penyediaan lapangan usaha dan kemandirian pusat permukiman tersebut. Pusat permukiman yang berkembang dan berdekatan dengan pusat permukiman yang lebih besar maka pusat permukiman tersebut akan menyatu dalam pelayanannya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan yaitu Lemahabang dan Cibitung dengan Cikarang.

Dalam rangka mewujudkan suatu kawasan yang mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya dan sinergi keselarasan pengembangan antar wilayah dan antar sektor, Propinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 7 Kawasan Andalan. Kabupaten Bekasi termasuk dalam Kawasan Andalan Metropolitan Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dengan sektor unggulan: industri manufaktur, pariwisata dan jasa.

Ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah Jawa Barat, sektor yang unggul (dominan) atau sektor yang memiliki peran relatif besar di Jawa Barat dan cenderung untuk terus berkembang untuk Kabupaten Bekasi adalah industri pengolahan. Sedangkan sektor potensial (berkembang) atau sektor yang perannya belum relatif besar namun cenderung berkembang adalah : listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

3.2. ANALISA TERHADAP ISU-ISU STRATEGIS

3.2.1. Sumber Daya Manusia Dan Sosial Budaya

Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Bekasi akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar dimana kemungkinan tahun 2025 dapat mencapai 3.139.046 jiwa. Namun berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting diperhatikan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk mendukung terjadinya jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

Perhatian terhadap komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bekasi yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator Millenium Development Goals (MDGs) harus menjadi agenda utama. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan secara merata, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan dan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan. Pencegahan terhadap peningkatan penyakit menular dan tidak menular serta penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang merupakan prioritas utama.

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih memerlukan perhatian optimal. Hal itu antara lain, ditandai oleh rendahnya keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan, tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak. Dengan demikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sementara itu, tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Tantangan lainnya adalah menurunkan beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai kearifan lokal, menurunkan ekses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana alam dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat Kabupaten Bekasi.

Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan Kabupaten Bekasi untuk dapat memanfaatkannya dalam mengembangkan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan penyerapan nilai-nilai universal yang berdasarkan pancasila.

3.2.2. Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi sampai saat ini, telah menghasilkan berbagai kemajuan, akan tetapi masih memerlukan waktu untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupeten Bekasi. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Secara eksternal, tantangan ekonomi Kabupaten Bekasi dihadapkan pada tingkat stabilitas ekonomi negara yang makin terintervensi oleh makin pesat dan meluasnya globalisasi, karena industri-industri sebagai penggerak ekonomi Kabupaten bekasi masih memiliki ketergantungan dengan investasi asing. Untuk masa depan perlu adanya komitmen perubahan perekonomian yang diarahkan untuk menciptakan produk-produk yang mengandalkan keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global dengan basis UKM. Perkembangan ekonomi di Jawa barat yang terimbas persaingan dan kompetisi global di masa depan, merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan secara cermat dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saing perekonomian daerah yang merujuk kepada agenda dan struktur ekonomi Jawa Barat dan Nasional. Dengan demikian terjadi integrasi perekonomian dalam proses globalisasi yang memanfaatkan potensi sebesar-besarnya dan meminimalkan dampak negatif yang muncul.

Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertambahan penduduk Kabupaten Bekasi yang masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif pada periode tahun 2005–2025. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2007 masih didominasi berpendidikan setingkat SMA/SMK, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat Diploma dan Sarjana. Dengan demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak dan sesuai kompetensi.

Tantangan internal yang penting lainnya adalah aglomerasi aktivitas perekonomian Kabupaten Bekasi yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidup. Pada masa yang akan datang, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional dan selaras dengan kualitas lingkungan. Selain itu, dengan menjaga keseimbangan industri dengan kualitas lingkungan, terutama di pusat-pusat pengembangan industri Kabupaten Bekasi akan berguna untuk memperkuat bidang pariwisata dan jasa yang berimbas kepada perbaikan kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat secara nasional.

Kemajuan ekonomi Kabupaten Bekasi perlu didukung oleh kemampuannya dalam mengembangkan potensi daerah untuk mewujudkan kemandirian. Agenda utama dalam

pembangunan tersebut adalah meningkatkan akselerasi dan kemampuan daya saing produk UKM dan mengurangi tingkat ketergantungan bantuan fiskal pemerintah pusat. Dengan pemahaman tersebut, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip *good governance*, serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Pemecahan masalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi perlu didasarkan pada pemahaman harapan masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi antara lain, yaitu kurangnya pemahaman terhadap harapan masyarakat miskin, minimnya komitmen dalam perencanaan dan penganggaran untuk masyarakat miskin, kurangnya koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan pemberdayaan yang disebabkan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan perkotaan dapat mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

3.2.3. Sarana Dan Prasarana

Kebutuhan penyediaan air permukaan dan tanah di sektor-sektor kehidupan dipenuhi dengan meningkatkan pasokan air baku melalui pengembangan prasarana pengelolaan dan penampungan air yang dikelola bersama oleh pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat secara bertanggungjawab. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir di Kabupaten Bekasi harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Tingkat sedimentasi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi memerlukan koordinasi vertikal dan horisontal yang intensif agar sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama pengembangan bangunan-bangunan pengendali sedimen yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi teknis diselenggarakan oleh Otorita Jatiluhur dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat petani dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak pengguna air irigasi. Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air dilakukan dengan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya lokal. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan transportasi di Kabupaten Bekasi maka dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta pemerintah Kabupaten Bekasi, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan tranportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Era globalisasi menyebabkan harus adanya integrasi antara kepentingan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan kepentingan masyarakat serta sektor-sektor strategis lainnya

yang memerlukan teknologi informasi. Perangkat teknologi informasi merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan utama yang dihadapi dalam sektor itu adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi masyarakat pengguna jasa.

Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah melakukan reformasi retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; dan melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah. Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

3.2.4. Politik, Hukum Dan Aparatur

Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan dengan melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan perlunya menyepakati pentingnya *check and balances* Pemerintah Daerah dengan DPRD dan Praturan Daerah yang lebih demokratis.

Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang meneguhkan kembali makna penting keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi aspek keadilan sosial dan masalah hubungan antar kelompok kepentingan di Kabupaten Bekasi.

Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya mereformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bekasi agar memenuhi syarat profesionalisme, kredibilitas dan kapasitas, serta efisiensi dan efektivitas. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah secara profesional.

Peran media massa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Selain itu, mengatasi berbagai dampak negatif perkembangan industri pers merupakan tantangan ke depan dan media masa harus pula mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Keseluruhan upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Tantangan ke depan dalam mewujudkan tata hukum yang mantap dengan mewujudkan sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tantangan lainnya adalah perubahan-perubahan peraturan dari pusat yang dioperasionalisasi di daerah harus mampu diadopsi tanpa harus banyak penundaan waktu operasionalisasi.

Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya dengan

desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi. Proses pendewasaan demokrasi yang telah berjalan membuat masyarakat semakin memahami akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengawasan terhadap eksistensi hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat di Daerah. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses berpemerintahan perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.

Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, dan meningkatkan keterukuran penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.

3.2.5. Tata Ruang Wilayah

Pengaturan tata ruang di daerah sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu, diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi arahan lokasi kegiatan, batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antar sektor, dengan tetap memerhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.

Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah bukan hanya untuk memeratakan pembangunan fisik di setiap wilayah, tetapi yang terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, di masing-masing wilayah pengembangan. Dalam kaitan itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di dalam setiap wilayah pengembangan.

Sementara itu, dari sisi eksternal secara pasti persaingan global akan semakin kuat berpengaruh pada pembangunan daerah, wilayah regional dan nasional pada masa yang akan datang. Perekonomian di Daerah secara langsung dan tidak langsung akan terpengaruh kuat oleh perekonomian nasional yang akan lebih terbuka. Sejak tahun 2003 dan tahun 2008, AFTA dan perdagangan bebas telah diberlakukan secara bertahap di lingkup negara-negara ASEAN. Lebih lanjut dari itu, mulai tahun 2010 perdagangan bebas di seluruh wilayah Asia Pasifik akan dilaksanakan. Hal ini merupakan tantangan bagi daerah-daerah dalam mempersiapkan diri menghadapi pasar global untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif.

Pemanfaatan potensi dan peluang keunggulan di masing-masing daerah dalam rangka mendukung daya saing nasional dapat meminimalkan dampak negatif globalisasi.

3.2.6. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada ancaman krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif ke industri, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Disisi lain, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan tanpa pengawasan intensif akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata guna air tanah.

Memburuknya kondisi wilayah konservasi tangkapan air yang meningkat pesat menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian. Akses terhadap air bersih di Kabupaten Bekasi memerlukan optimalisasi. Kerawanan air bersih masih mengancam Kabupaten Bekasi yang disebabkan ketersediaan sumber baku air permukaan tergantung pada musim.

Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan residu atau sampah perlu ditangani secara komprehensif, sinergi dan berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia.

Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*) yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari.

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BEKASI

Bagian ini merupakan isi pokok dari RPJP Daerah yang memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah beserta penjelasannya.

4.1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi Kabupaten Bekasi dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang dimasa depan, kekuatan dan kelemahan yang ada, faktor-faktor strategis yang muncul, amanat pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat 2005-2025 serta aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan atas faktor faktor diatas maka diperoleh rumusan visi Kabupaten Bekasi dalam waktu 20 tahun mendatang sebagai berikut yaitu :

"MASYARAKAT AGAMIS YANG UNGGUL DALAM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PARIWISATA"

Visi dimaksud mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Visi "**Masyarakat**" ini mencerminkan keinginan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat disini berperan sebagai tonggak pembangunan Kabupaten Bekasi, dimana pembangunan masyarakat Kabupaten Bekasi merupakan awal pembangunan Kabupaten Bekasi kedepan.

- Visi "**Agamis**" secara harfiah diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Bekasi yang dapat dijadikan sebagai teladan dikarenakan masyarakatnya yang agamis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersih, taat dan disiplin. Agamis merupakan ciri-ciri luhur yang menjadi semangat nilai kerohanian masyarakat Kabupaten Bekasi. Masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki keyakinan, prinsip dan perilaku kehidupan keagamaan yang mantap dan mampu menciptakan keadaan masyarakat yang bermartabat, sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperkuat tatanan kehidupan bermasyarakat. Agamis juga berlaku bagi aparatur dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good giovernance*) dan tidak koruptif dalam merancang dan mengimplementasikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengaturan dan pembangunan sarana publik.

- Visi **“Unggul”** secara harfiah mengandung pengertian lebih dalam sesuatu hal dibandingkan dengan yang lain atau bermutu baik. Dalam pengertian ini dapat dimaknai bahwa Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang lebih baik dari wilayah kabupaten lain di Indonesia terutama pada sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata. Selain itu, unggul dimaksudkan bahwa Kabupaten Bekasi mampu mengangkat dan menonjolkan potensi dari hasil pembangunan selama ini, sehingga lebih baik dari daerah lainnya.

Selanjutnya yang menjadi point penting dalam visi tersebut adalah “**Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata”** mengandung pengertian bahwa fokus pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi adalah keempat bidang tersebut sebagaimana diperoleh dari hasil analisa potensi kewilayahan. Namun bidang yang lain juga tetap dikembangkan dan dimaksimalkan guna mendukung pengembangan keempat bidang utama tersebut.

Industri yang dimaksud disini adalah industri yang ramah lingkungan baik skala kecil, menengah maupun besar dengan menumbuhkembangkan kawasan-kawasan industri yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan. Selain itu industri ini pun harus mampu mendukung sektor pertanian sebagai salah satu basis masyarakat dengan mengembangkan agroindustri. Agroindustri yang dimaksud merupakan kegiatan yang berperan menciptakan nilai tambah, menghasilkan produk untuk dipasarkan/digunakan/dikonsumsi, meningkatkan daya simpan, menambah pendapatan, serta menarik pembangunan sektor pertanian sebagai sektor penyedia bahan baku. Optimalisasi nilai tambah dicapai dengan pola industri yang berintegrasi langsung dengan dunia usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian. Dengan adanya agro industri yang mengembangkan sektor pertanian dari hulu hingga hilir diharapkan mampu mendorong sektor pertanian yang secara trend menurun terus menerus setiap tahunnya.

Perdagangan menurut pengertian adalah pertukaran atau jual beli barang dan jasa yang mempunyai alas hak yang sah. Melalui bidang perdagangan yang berbasis potensi lokal untuk pelayanan skala kecil dan menengah dengan memberdayakan usaha kecil dan menengah diharapkan mampu menggerakkan perekonomian dan minat investasi di wilayah Kabupaten Bekasi. Terlebih jika dilihat trend setiap tahunnya sektor perdagangan mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya sektor industri dan perumahan. Perdagangan dan jasa dikembangkan agar mampu mendukung penguatan daya saing global. Perdagangan diarahkan untuk memperkuat efisiensi sistem perdagangan dalam daerah dan secara nasional, memperkuat posisi daerah dalam aktivitas perdagangan serta berbagai kegiatan kerja sama perdagangan regional, global dan multilateral, pengembangan citra produk spesifik daerah yang berkualitas nasional dan internasional dan mampu mendorong integrasi kegiatan ekonomi lokal untuk memperkuat ketahanan ekonomi secara nasional.

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang membentuk siklus pertumbuhan ekonomi mendasar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bekasi. Wilayah Bekasi, Karawang dan Purwakarta merupakan salah satu lumbung penghasil padi terbesar untuk wilayah Jawa Barat dan Indonesia. Pertanian yang merupakan ekonomi mendasar di Wilayah Kabupaten Bekasi lambat laun bergeser dikarenakan posisi Kabupaten Bekasi yang masuk dalam rencana PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional 20 tahun mendatang. Kondisi tersebut membuat beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi mulai menghitung nilai ekonomis tanah di Kabupaten Bekasi antara penggunaan sebagai lahan pertanian atau menjadi lahan industri. Kondisi pertanian di Kabupaten Bekasi harus dipikirkan secara menyeluruh untuk masa waktu 20 tahun yang akan datang jika ingin tetap dikembangkan karena kondisi

sarana dan prasarana pertanian yang ada saat ini khususnya irigasi pertanian di Kabupaten Bekasi sudah sangat berat untuk direnovasi sehingga komitmen terbesar untuk mensukseskan pengembangan pertanian di Kabupaten Bekasi adalah penguatan anggaran untuk perbaikan seluruh saluran irigasi agar pertanian di Kabupaten Bekasi dapat menjadi sektor yang bisa menggerakkan kembali ekonomi mayarakat Kabupaten Bekasi.

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi. Berdasarkan pengertian tersebut, Kabupaten Bekasi dapat mengembangkan pariwisata berbasis sektor industri yang menjadi daya tarik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Namun realitas pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi saat ini dianggap masih dalam bentuk skenario/wacana, meskipun pada kenyataannya bidang ini dapat menjadi pundi-pundi efektif dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Pembangunan pariwisata jangka panjang diarahkan tidak saja pada pengembangan produk wisata, aksesibilitas serta sarana prasarana fisik, namun tidak boleh melupakan dukungan program-program yang bersifat fisik dan nonfisik antara lain : peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan peran teknologi informasi kepariwisataan dalam upaya menarik investor serta studi dampak kepariwisataan. Pengembangan produk pariwisata Kabupaten Bekasi baik wisata alam maupun wisata buatan adalah untuk ditawarkan kepada pasar baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, khususnya produk wisata buatan yang berupa pariwisata industri yang memperlihatkan mekanisme produksi suatu barang industri dengan memanfaatkan kawasan-kawasan industri yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan kualitas perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi lokal sebagai wilayah yang didominasi perairan laut serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya setempat (budaya bangsa).

Visi Kabupaten Bekasi tersebut terdiri atas 7 (tujuh) misi yaitu :

1. Meningkatkan Peran Serta dan Pembinaan Institusi Keagamaan Dalam Pembangunan di Segala Bidang.
2. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bekasi yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasarnya Secara Layak.
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Ditingkat Lokal, Tingkat Nasional dan Global Dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata Dengan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan.
4. Mewujudkan Tata Ruang Dan Infrastruktur Wilayah Yang Handal Dan Terintegrasi Serta Lingkungan Hidup Yang Asri dan Berkelanjutan;
5. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Memiliki Etos Kerja Dan Produktivitas Yang Tinggi;
6. Mewujudkan Supremasi Hukum Dan Ketertiban Yang Berkeadilan;
7. Mengembangkan Prasarana Dan Sarana Publik Secara Terpadu Dan Penuh Inovasi Yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat Secara Adil Dan Merata;

Visi tersebut mengakomodasikan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai subyek utama, disertai dengan dimensi yang komprehensif (spiritual, emosional, fisik, intelektual) dan tujuan pembangunan yang jelas.
2. Keseimbangan struktural, antara sektor primer dan sekunder, kekuatan ekonomi pada daya saing, pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
3. Industri kecil, menengah dan industri besar secara sinergis menjadi sektor basis, artinya menjadi penggerak utama *(primer mover*) pembangunan ekonomi.
4. Berkelanjutan sebagai arah perubahan atau arah pembangunan yang akan dituju, arah tersebut meliputi :
   a. Kelestarian ekosistem untuk menunjang kehidupan yang sehat berupa kebutuhan udara bersih, air bersih dan bebas dari bahan beracun berbahaya. Dengan demikian kegiatan industri dan agribisnis harus mengurangi dan mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkannya;
   b. Pembangunan yang berkeadilan antarkelompok masyarakat, antarwaktu (generasi sekarang dan yang akan datang) dan antarwilayah (wilayah kabupaten dan desa);
   c. Pemberdayaan masyarakat *(empowering),* terutama kelompok masyarakat marjinal dan kelompok masyarakat miskin *(poorest of the poor),* yang sebagian besar terdiri dari anak-anak dan wanita;
   d. Memberdayakan lembaga masyarakat sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

4.1.1. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bekasi 20 (dua puluh) tahun ke depan, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran Serta Institusi Keagamaan Dalam Pembangunan Disegala Bidang

Dalam upaya melahirkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang "**Agamis**" sesuai dengan Visi Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025, maka kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Bekasi perlu ditingkatkan melalui institusi keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan, pesantren, yayasan sosial serta mengoptimalkan keberadaan tempat peribadatan seperti masjid, mushola, langgar, gereja, pura dan wihara di Kabupaten Bekasi, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama yang dianut serta memupuk kesadaran masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menjalankan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama.

Peran serta institusi keagamaan lebih dititikberatkan pada pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Bekasi agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian peran institusi keagamaan dalam mencetak masyarakat yang "**Agamis**" dan "**Unggul**" sangat besar. Pembangunan Kabupaten Bekasi sangat ditentukan oleh subjek pembangunannya yaitu masyarakat Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu jika

masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki nilai-nilai keagamaan yang tinggi, maka pembangunan di segala bidang dapat tercapai.

2. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak

Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui upaya mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Bekasi secara progresif dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pencari kerja serta menerapkan kebijakan *Affirmative* pada unit-unit yang beroperasi di Kabupaten Bekasi terhadap pekerja Lokal. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dengan jumlah dan harga terjangkau melalui upaya pengendalian harga dan menjamin lancarnya distribusi barang kebutuhan pokok sepanjang tahun. Menyiapkan Pelayanan Publik Yang representatif, cepat, murah dan mudah melalui pelayanan prima dengan kualitas sarana dan prasarana aparatur yang maju dan modern. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar sehingga dapat melayani seluruh lapisan dan kelompok masyarakat dan bisa menjadi rujukan serta dapat dibanggakan.

Masyarakat yang mandiri merupakan masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan, oleh karena itu dalam pembangunan kemandirian perlu memberikan peran kepada masyarakat dalam bentuk memberikan peluang dan memfungsikan lembaga kemasyarakatan, desa dan kelurahan dalam pelaksaanaan pembangunan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya, setiap orang harus bekerja dan peran pemerintah adalah bagaimana meningkatkan ketersediaan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya tenaga kerja lokal yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Namun demikian, masyarakat yang telah memiliki pekerjaan dan pendapatan perlu disediakan kebutuhan dasar yang layak dan terjangkau termasuk menyediakan infrastruktur dasar seperti listrik, air, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik serta kebutuhan penunjang bagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi wilayah yang sangat luas dari utara hingga selatan maka Kabupaten Bekasi harus mengutamakan pelayanan dan penyediaan kebutuhan dasar secara merata sejalan dengan upaya meningkatkan kualitasnya.

Masyarakat yang sejahtera yang sudah terpenuhi kebutuhan dasar kehidupannya akan memberikan harapan bagi usia hidup yang lebih lama, terutama dalam mencegah meningkatnya kematian bayi lahir dan ibu yang melahirkan. Dalam jangka panjang perlu upaya meningkatkan umur harapan hidup seluruh penduduk Kabupaten Bekasi menjadi 70 tahun. Sejalan dengan itu menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 10/1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu (AKI) berkurang menjadi 50/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi kurang menjadi 3%, mengendalikan penyakit menular yang berbasis masyarakat perkotaan dan lintas batas. Termasuk kelompok masyarakat yang rentan dan miskin perlu diberikan perhatian yang lebih dengan cara meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan kelompok masyarakat rawan sosial. Tugas utama pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai mitra terdepan yang berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai Ibukota Negara adalah bagaimana menyediakan pelayanan publik yang paling dasar (*basic need*) secara cepat, mudah, representatif dan berwawasan modern.

3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Tingkat Lokal, Tingkat Nasional Dan Global Dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian Dan Pariwisata Dengan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan

Perekonomian yang tangguh dapat dicapai melalui peningkatan iklim investasi yang sehat dan iklim berusaha yang kondusif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Iklim investasi dan berusaha yang kondusif berarti adanya kemudahan dalam melakukan investasi dan usaha, baik investor besar maupun kecil, domestik maupun mancanegara. Masih luasnya sektor pertanian yang merupakan potensi ekonomi memerlukan peningkatan kualitas petani dan kualitas hasil produksi pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung proses peningkatan kualitas tersebut. Peningkatan kualitas petani ini sangat penting dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk revitalisasi sektor agribisnis. Pencapaian daya saing dilakukan melalui peningkatan proses produksi yang terstandarisasi secara internasional dan instrumen kebijakan yang tepat.

Meningkatkan peran sektor jasa dan perdagangan untuk menunjang agribisnis dan industri. Upaya-upaya seperti peningkatan kualitas dan aksesibilitas jasa dan perdagangan, meningkatkan kegiatan ecotourism, agrowisata dan wisata industri, dapat menunjang industri dan pariwisata. Artinya, pemerintah Kabupaten Bekasi tidak hanya memikirkan pengembangan industri, tetapi juga menjangkau aspek pasar melalui peningkatan aksesibilitas perdagangan, jasa dan pariwisata.

Menggali potensi ekonomi daerah, mengembangkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing serta sehat dengan memanfaatkan kedekatan geografis dengan Ibukota Jakarta melalui pengembangan potensi ekonomi daerah yang menjadi sektor unggulan seperti industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dalam konteks lokal, nasional, regional maupun internasional nantinya. Menciptakan kerjasama penguatan ekonomi dalam upaya membentuk sinergitas ekonomi dan kebijakan usaha dengan wilayah lainnya. Mewujudkan kepastian hukum untuk kepentingan investasi domestik dan investasi asing melalui penyusunan peraturan baik peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lebih menjamin kepastian hukum bagi pekerja dan bagi pelaku usaha dan penegakan hukum untuk kepentingan pengembangan investasi.

Kondisi geografis yang strategis dan banyak potensi yang dimiliki Kabupaten Bekasi merupakan karunia dari Allah SWT, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat dunia yang serba terbuka, Kabupaten Bekasi tidak bisa berdiri sendiri, oleh sebab itu perlu menciptakan kerjasama baik lokal, nasional, regional maupun internasional dalam segala bidang. Dengan demikian disamping potensi yang ada terus dikembangkan, perlu membangun jaringan ekonomi yang lebih luas untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan investasi yang menarik dan kompetitif, dengan dukungan kepastian hukum untuk kepentingan investasi domestik dan investasi asing.

Makna pembangunan yang berkeadilan adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh yang mengarah kepada peningkatan pembangunan untuk daerah tertinggal, program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, akses terhadap berbagai pelayanan dasar sosial beserta sarana dan prasarananya

ditingkatkan dan berkelanjutan serta menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan adanya diskrimasi dalam penyelenggaraan pembangunan.

Menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi terutama penguatan ekonomi masyarakat pada bidang Industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata. Menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk investasi dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Bekasi melalui peningkatan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan rasa aman di lingkungan masyarakat dan terjaminnya keamanan dan kenyamanan pelaku usaha dalam berinvestasi. Menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan meningkatkan hasil guna sumber daya alam baik sumber daya yang dapat diperbaharui maupun sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.

Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap lingkungan bagi seluruh pelaku pembangunan termasuk mengurangi jumlah lahan kritis, dan upaya ini dilakukan secara terus-menerus. Menjaga sinergi antara sektor publik dan privat untuk mengakselerasikan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi dan wilayah eksternal sekitarnya melalui upaya menjaga dan meningkatkan kordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan antar daerah dan antar sektor (publik dan privat). Mewujudkan pemerataan pembangunan diseluruh Kabupaten Bekasi melalui upaya meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan sarana dan prasarana antar kecamatan dan seluruh desa.

Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pengembangan potensi daerah melalui upaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah, meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, meningkatkan peran sektor Industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan membangun pusat-pusat Industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata yang berbasis kekuatan lokal (*Local Core Bussiness*) bagi kepentingan pembangunan yang lebih baik, meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh wilayah guna terciptanya pemerataan pembangunan dan munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kabupaten Bekasi.

Investasi dan kegiatan ekonomi hanya dapat berjalan bila ada situasi dan kondisi yang aman, upaya menciptakan lingkungan yang aman, dan kondusif untuk investasi perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Untuk itu perlu menjaga sinergi antara sektor publik dan privat untuk mengakselerasikan perekonomian daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan, dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Potensi dan keunggulan daerah direncanakan dan dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat dan peningkatkan ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pengembangan potensi daerah. Dengan semakin berkembangnya dan pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah, dalam jangka panjang diharapkan terjadi peningkatan PDRB Kabupaten Bekasi dari sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata yang cukup signifikan.

4. Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah Yang Handal dan Terintegrasi Serta Lingkungan Hidup Yang Asri dan Berkelanjutan

Sebagai daerah yang memiliki banyak industri, dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bekasi perlu menyertakan aspek pengelolaan lingkungan sebagai dampak dari industri itu sendiri, mulai dari perencanaan sampai pemanfaatannya. Namun demikian, industri yang ada selain harus berwawasan lingkungan, juga mampu mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata yang mengarah kepada pemerataan ekonomi masyarakat. Faktor pendukung utama dari pembangunan adalah tersedianya sistem infrastruktur yang handal, terpadu dan efisien dalam pemahaman infrastruktur yang handal artinya tepat guna dan berdaya guna, terintegrasi dengan faktor pendukung lainnya dan efisien yang bermakna sesuai kebutuhan.

Sementara itu, permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh faktor manusia adalah terkait dengan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan, antara lain kurangnya disiplin masyarakat dan dunia usaha dalam membuang sampah, limbah industri, pendirian rumah hunian di bantaran sungai dan pendirian bangunan liar yang kurang mentaati peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Bekasi memiliki potensi banjir apabila musim hujan tiba. Apabila terlambat dalam penanganannya dapat menimbulkan banjir yang menyebabkan kerusakan yang sangat besar termasuk sarana dan prasarana pemerintah.

Selain itu, terjadi pula peningkatan kepadatan lalu lintas di Kabupaten Bekasi yang setiap tahunnya bertambah sangat signifikan dan akibat dari banyaknya kendaraan bermotor menimbulkan masalah yaitu meningkatnya angka polusi udara di Kabupaten Bekasi. Banyak pula kendaraan bermotor dari daerah lain yang melintasi wilayah sepanjang Kabupaten Bekasi yang merupakan daerah perlintasan. Masalah penurunan kualitas udara sehat dan bersih di Kabupaten Bekasi juga diperparah dengan berkurangnya pepohonan di wilayah perkotaan sebagai akibat beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan perindustrian. Selain itu diperparah pula dengan berkurangnya daerah penyangga yang berada diluar kewenangan Kabupaten Bekasi akibat pengalihan lahan untuk perumahan dan perindustrian seperti Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan beberapa wilayah sekitarnya yang juga memberikan kontribusi menurunkan kualitas udara.

Begitu juga dengan Kondisi Kualitas air di Kabupaten Bekasi yang semakin lama semakin menurun dikarenakan pencemaran dari buangan limbah rumah tangga maupun limbah industri yang tidak mengindahkan aturan pembuangan dan pengolahan limbah yang benar terhadap kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga berdampak pada kondisi air sumur penduduk, air sungai maupun air tanah. Sementara sumber air dari hulu, kondisi airnya seringkali bercampur lumpur akibat gerusan tanah karena erosi dan penggundulan vegetasi di perbukitan dan hutan. Secara kuantitas distribusi air minum melalui sistem jaringan air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Untuk menjawab persoalan mengenai kualitas air di Kabupaten Bekasi, maka dalam *Millennium Development Goals* direncanakan adanya peningkatan akses air minum dalam Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) dan non perpipaan. Cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Bekasi yang menggunakan SPAM baru mencapai

± 60 persen sedang sisanya dilayani dari non perpipaan (Non SPAM) yang terlindungi.

5. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Memiliki Etos Kerja Dan Produktivitas Yang Tinggi

Pengertian institusi pemerintahan daerah yang profesional mengarah pada penerapan *the right man on the right place*. Hal ini didukung oleh sistem organisasi yang efektif dengan sasaran yang terukur. Institusi pemerintahan yang berwibawa mengarah pada bagaimana hukum dan perundang-undangan dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Amanah berarti penyelenggaraan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Transparan berarti penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Sedangkan akuntabel terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai hukum yang berlaku.

Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang memahami diri dan lingkungannya, termasuk memiliki tingkat empati yang tinggi sehingga mampu memahami orang lain, saling menghargai, dan saling menghormati. Produktif dan partisipatif merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam membangun Kabupaten Bekasi. Masyarakat yang demokratis, produktif, dan partisipatif diwujudkan melalui misi ini dengan menjadikan nilai-nilai moral sebagai filter.

Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat agar mampu mengisi dan melaksanakan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah. Mendorong pemerataan kesempatan kerja melalui upaya meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat Kabupaten Bekasi yang berkualitas dengan memperhatikan fasilitas dan tenaga pendukung di bidang pendidikan baik kualitas maupun kuantitasnya. Meningkatkan kualitas lulusan melalui program peningkatan mutu dan manajemen pengelolaan pendidikan serta peningkatan relevansi pendidikan terhadap pasar kerja yang berorientasi pada bidang industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata agar masyarakat Kabupaten Bekasi jangan hanya jadi penonton dibandingkan penduduk pendatang, yang merantau dengan berbekal ilmu yang lebih spesifik sehingga apabila ada penawaran dengan syarat keilmuan tertentu maka para pendatang syarat keilmuan tertentu tersebut dapat diterima dan menjadi pekerja di pusat-pusat bisnis Kabupaten Bekasi. Menerapkan budaya disiplin untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manisia (SDM) Kabupaten Bekasi melalui upaya penerapan *Reward and Punishment* di Lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat yang dititikberatkan pada disiplin terhadap perundang-undangan seperti lalu lintas, ketaatan dalam pemanfaatan ruang/lahan, budaya bersih, budaya antri, dan taat pajak serta ketaatan terhadap nilai dan norma susila dalam kehidupan sehari-hari.

Mengembangkan sikap profesional, meningkatkan etos kerja melalui penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya dan didukung dengan sistem penggajian yang berbasis kinerja. Menyiapkan dan mengembangkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam rangka melaksanakan pelayanan prima, serta mengupayakan penerapan standarisasi terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Mengembangkan merit sistem untuk peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan karir berbasis kinerja dan sistem *recruitment by expertise*. Tenaga kerja yang bermutu dan berdaya saing melalui peningkatan mutu tenaga kerja lokal yang dibina oleh BLK (Balai Latihan Kerja), lembaga pelatihan profesional, maupun

melalui pendidikan formal dan informal baik di dalam negeri maupun diluar negeri serta dilakukan peningkatan wawasan kewirausahaan pada pelaku usaha kecil dan menengah.

Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan hal penting dalam menyongsong era globalisasi yang kian menghampiri terutama persiapan menghadapi pasar ASEAN tahun 2015. Dalam jangka panjang, peningkatan daya saing hanya dapat dicapai jika sumber daya manusia berpendidikan, berdisiplin, memiliki sikap profesionalisme, etos kerja dan produktivitas yang tinggi. Pendidikan masyarakat yang tinggi, disiplin dan etos kerja akan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Sebagai upaya pokok untuk mewujudkan kinerja dan produktivitas dapat dimulai dari peningkatan kesadaran akan arti pentingnya pendidikan dan nilai arsip serta pemahaman akan nilai sejarah dan budaya sebagai pelajaran penting dalam merancang masa depan yang lebih baik.

6. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Ketertiban Yang Berkeadilan

Tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Bekasi menjadi pilar utama dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintahan yang kuat harus dimaknai dengan kuatnya supremasi hukum. Pemerintah daerah senantiasa mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan tertib. Produk hukum daerah harus disusun secara rinci dan tidak bertentangan dengan sumber hukum diatasnya. Pemerintah daerah bekerjasama dengan DPRD sebagai mitra terdepan yang akan menjalankan kontrak sosial dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Gangguan keamanan dalam bentuk berbagai variasi kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat, harus diminimalisir. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

Pembangunan pada sektor keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum beserta institusi terkait dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dicapai melalui pembangunan kompetensi pelayanan inti, pembinaan SDM, pemenuhan kebutuhan sarana utama serta membangun pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum. Peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme jaring pengaman masyarakat yang berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat akan mendukung meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, juga akan mengurangi gangguan keamanan serta menghapuskan potensi konflik sosial.

7. Mengembangkan Prasarana Dan Sarana Publik Secara Terpadu dan Penuh Inovasi Yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat Secara Adil Dan Merata

Sebagai salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga dan transit bagi seluruh masyarakat yang bekerja di Jakarta. Hampir sebagian dari seluruh penduduk di Kabupaten Bekasi bekerja di Jakarta sehingga pemerintah daerah harus memikirkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung mobilitas ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota haruslah memiliki program yang bertujuan untuk mensejajarkan kemajuan dan pembangunan khususnya di bidang sarana dan prasarana agar sejajar dengan ibukota Jakarta.

Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien, penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan serta pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui *political trading* yang saling menguntungkan, menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda angkutan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, menyelaraskan semua peraturan daerah baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkenan, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan dan pengoperasiaannya, menghilangkan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa, mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks *global services*, membangun fasilitas angkutan publik untuk daerah perkotaan.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan ruang publik perlu diperluas dan melibatkan peran aktif masyarakat termasuk para pengusaha.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

Bagian ini memuat arah pembangunan yang ingin diwujudkan dalam 20 tahun ke depan serta sasaran pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam RPJM ke-1, RPJM ke-2, RPJM ke-3, RPJM ke-4 dan RPJM ke-5

5.1. ARAH PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan Visi Kabupaten Bekasi **"Masyarakat Agamis Yang Unggul Dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian Dan Pariwisata"** sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kabupaten Bekasi yang maju dan sejahtera adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan dalam sasaran- sasaran pokok pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran Serta dan Pembinaan Institusi Keagamaan Dalam Pembangunan Disegala Bidang

(1) Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bekasi yang sehat secara fisik, intelektual, emosional dan spiritual.
(2) Peningkatan pemahaman ajaran agama dikalangan umat beragama melalui pendidikan agama dan dakwah.
(3) Pengembangan sarana dan prasarana keagamaan dan pendidikan keagamaan.
(4) Peningkatan pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan non pendidik keagamaan.
(5) Terciptanya toleransi antar umat beragama yang berimplikasi pada terwujudnya kerukunan antar umat beragama.
(6) Meningkatnya partisipasi umat beragama dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak

(1) Tersedianya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medis lainnya. Terlayaninya seluruh lapisan dan kelompok masyarakat baik di daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan dan fasilitas kesehatan hingga ke wilayah terpinggir dari Kabupaten Bekasi dan jika memungkinkan anggaran, pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menyediakan pusat pelayanan kesehatan yang berskala lokal, nasional dan mungkin regional sebagai rujukan bagi daerah lainnya.
(2) Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air bersih, pengolahan sampah perkotaan dan perdesaan, angkutan, perumahan, keamanan, dan sanitasi lingkungan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan kualitas kehidupan masyarakat.

(3) Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk usia kerja dan kesempatan untuk membuka lapangan kerja baru guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan tujuan mendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi yang berorientasi pada sektor Industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan harapan dapat mengurangi tingkat pengangguran dari tahun ke tahun, meningkat pula kualitas sumber daya manusia pencari kerja serta menerapkan kebijakan *affirmative* pada unit-unit yang melakukan usaha skala besar di daerah terhadap pekerja lokal.

(4) Terwujudnya kelestarian sumber daya hayati dan lingkungan bagi upaya menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan penduduk. Berkurangnya kerusakan lingkungan akibat menurunnya kualitas lingkungan dengan melibatkan semua pihak terkait baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

(5) Tersedianya kebutuhan dasar masyarakat dengan jumlah dan harga terjangkau melalui upaya pengendalian harga dan menjamin lancarnya distribusi barang kebutuhan pokok sepanjang tahun, dan pengembangan potensi daerah lainnya seperti pertanian dan pengembangan perikanan darat menjadi kegiatan ekonomi produktif guna mendukung sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata.

(6) Terwujudnya pelayanan publik yang prima, cepat, murah dan mudah melalui pelayanan yang modern dan dengan dukungan sarana dan prasarana dan sistem yang berkualitas, maju dan modern.

(7) Terkelolanya kawasan tersisa untuk pertanian dan perikanan darat yang ada di Kabupaten Bekasi guna pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Bekasi dan mengambil kebijakan dengan menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai “wilayah transit” bagi masuknya seluruh produk-produk termasuk kebutuhan pokok ke Ibukota Jakarta dengan harapan pada masa yang akan datang manajemen pengelolaan masuknya produk-produk kebutuhan pokok ke Ibukota sudah menggunakan manajemen yang berorientasi lingkungan, dengan maksud barang-barang yang masuk ke Ibukota adalah barang-barang dengan produk yang sudah bebas dari dan menjadi polusi.

(8) Terkendalinya perkembangan dan distribusi penduduk pada kawasan potensial baik kawasan potensial Industri, kawasan potensial perdagangan, kawasan potensial pertanian dan kawasan potensial pariwisata untuk pengembangan permukiman dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan.

(9) Meningkatnya kualitas pelayanan medis baik di rumah sakit maupun di puskesmas dengan dukungan ketersediaan tenaga medis dan para medis yang profesional, memadai dan berkualitas dengan sarana dan prasarana yang maju dan modern. Tersedianya akses pelayanan kesehatan masyarakat dengan harga terjangkau termasuk harga obat dan perbekalan kesehatan.

(10) Meningkatnya angka harapan hidup dan status gizi dan didukung dengan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular secara berkesinambungan seperti demam berdarah, HIV/AIDS dan penyakit menular berbahaya lainnya.

(11) Meningkatnya kesadaaran untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, terwujudnya sistem informasi kesehatan yang optimal, cepat, akurat dan valid sehingga dapat mempercepat penentuan kebijakan dan intervensi yang perlu dilakukan.

3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Ditingkat Lokal, Tingkat Nasional dan Global Dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian Dan Pariwisata Dengan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan;

Dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing, pembangunan diarahkan untuk mengembangkan industri, perdagangan dan pertanian yang diarahkan pada potensi pariwisata dengan dukungan akomodasi dan transportasi yang baik. Dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dengan ciri memiliki pondasi yang kokoh serta mampu secara nyata memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara berkeadilan, maka diperlukan strategi dan kebijakan ekonomi dengan arahan sebagai berikut:

(1) Meningkatnya produktivitas dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong peningkatan investasi dalam skala besar maupun kecil, pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing, modernisasi Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), peningkatan nilai tambah produksi, pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan global untuk mendapatkan input dan jalur pemasaran produksi, pemanfaatan optimal kerjasama strategis bagi kemajuan ekonomi, pengembangan riset sebagai salah satu basis pengambilan keputusan.

(2) Terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam sistem distribusi yang dapat menjamin kepastian berusaha dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong perluasan kesempatan berusaha secara adil termasuk untuk mendapatkan akses pada sumberdaya ekonomi, terujudnya sistem tata niaga yang kondusif tanpa tumpang tindih regulasi, persaingan yang sehat dan perlindungan yang layak bagi Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

(3) Pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya manusia lokal secara optimal dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong pengembangan industri, perdagangan dan pertanian yang diarahkan untuk pengembangan pariwisata, pengembangan pola kemitraan, pengembangan pola produksi berbasis masyarakat dan pengembangan sumber daya energi alternatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

(4) Terwujudnya struktur ekonomi yang industrialis diiringi mantapnya perdagangan, jasa dan transportasi serta pemantapan bidang pertanian dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong terarahnya pengembangan SDM dan IPTEK kepada industri yang ramah lingkungan, pengembangan sentra perdagangan dan penetapan struktur perwilayahan pariwisata, perkembangan sektor pertanian serta perkembangan sektor jasa dan pariwisata selaras dengan perkembangan ekonomi dan tercapainya sistem terpadu perindustrian dan perdagangan dengan dukungan sarana transportasi yang bersifat internasional.

(5) Terwujudnya pembangunan pertanian, perikanan dan peternakan berkelanjutan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong jaminan bagi intensifikasi pengolahan lahan pertanian, peningkatan ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur pendukung bagi peningkatan produktivitas, jaminan ketahanan pangan dan taraf hidup petani yang layak, reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan jaminan mutu produk, pengembangan sentra-sentra agribisnis dalam suatu kawasan terpadu secara luas mulai dari

level perencanaan sampai dengan pemanfaatannya serta penganekaragaman hasil industri pertanian, perikanan dan peternakan.

(6) Berkembangnya pengusaha daerah dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong prioritas keikutsertaan pengusaha daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan, prioritas kepemilikan pengusaha daerah dalam berbagai aset.

(7) Seiring dengan pergeseran peranan sektor pertanian ke sektor Industri dan sektor perdagangan, angkutan dan komunikasi terus dikembangkan dan kedua sektor ini merupakan *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Bekasi.

(8) Terpenuhinya pasokan listrik (elektrifikasi) yang memadai, handal dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan rumah tangga, bisnis khususnya dibidang industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata serta kebutuhan publik lainnya. Terselenggaranya pelayanan air bersih bagi masyarakat perkotaan dan daerah cepat tumbuh serta pengadaan dan pengembangan sarana sumber air bersih bagi kebutuhan masyarakat pedesaan.

(9) Tersedianya produk hukum di bidang investasi dan penanaman modal serta perlindungan usaha ekonomi kerakyatan dengan koordinasi bersama semua pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Meningkatnya investasi domestik dan investasi asing serta tersedianya peraturan yang lebih menjamin kepastian hukum bagi pekerja dan pelaku usaha serta didukung dengan penegakan hukum yang berorientasi kepada kepentingan nasional dan daerah.

(10) Meningkatnya kualitas dan etos kerja sumber daya manusia dalam semua bidang terutama di sektor unggulan yaitu Industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata agar mampu mengikuti perkembangan dan sejajar dengan daerah lain dengan dukungan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan karater dan budaya Kabupaten Bekasi.

(11) Meningkatnya kompetensi tenaga kerja lokal dan tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatnya sistem informasi pasar kerja. Seluruh perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Bekasi menerapkan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja sebagaimana diatur oleh Undang-undang dan Organisiasi Tenaga Kerja Internasional (ILO).

(12) Tersedianya sarana dan prasarana pendidkan Kejuruan dan Lembaga Diklat Ketenagakerjaan yang memfokuskan pembinaan di bidang Industri, perdagangaan, pertanian dan pariwisata yang memadai baik melalui kerjasama pelatihan, pengembangan lembaga dan lainnya. Tersedianya pegawai teknis ketenagakerjaan seperti mediator, instruktur, pengawas tenaga kerja dan lainnya. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan diarahkan kepada peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar sosial beserta sarana dan prasarananya ditingkatkan dan berkelanjutan serta menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan adanya diskrimasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif dan perspektif gender.

(13) Pembangunan diarahkan untuk terciptanya konsolidasi pada berbagai aspek kehidupan lokal yang dapat diukur dengan adanya hukum, profesionalitas penyelenggara pembangunan dan masyarakat sipil yang yang mandiri dan berkeadilan gender, akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan serta terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi.

(14) Pembangunan diarahkan untuk menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif berarti adanya kemudahan dalam melakukan investasi dan usaha, baik investor besar maupun kecil, domestik maupun mancanegara, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Hal ini misalnya dapat dilakukan melalui kebijakan publik yang terkait dengan perizinan.

(15) Tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong tercapainya taraf hidup ekonomi masyarakat, berkurangnya pengangguran dengan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menurunnya jumlah penduduk miskin serta kemampuan fiskal daerah yang tinggi sasaran. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (PDRB) selama Tahun 2005- 2025.

(16) Ditetapkannya wilayah Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan perkembangan ekonomi nasional dalam bentuk kebijakan pemerintah dalam menetapkan kawasan strategis nasional.

(17) Tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru diseluruh wilayah yang merata terutama Industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata yang berbasis kekuatan lokal dan industri.

(18) Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata dengan didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan dan kesenian serta infrastruktur perekonomian lainnya yang berkualitas sekaligus mengadakan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata dan meningkatkan aksessibilitas dari dan ke objek dan daya tarik wisata dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi daerah.

(19) Terwujudnya pembangunan infrastruktur pelabuhan, dermaga dan sarana perhubungan yang mendukung perekonomian di Kabupaten Bekasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

4. Mewujudkan Tata Ruang Dan Infrastruktur Wilayah Yang Handal dan Terintegrasi Serta Lingkungan Hidup Yang Asri Yang Berkelanjutan

(1) Pembangunan prasarana dan sarana diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan akomodasi dan transportasi yang berkualitas dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi dan akomodasi yang telah ada, pembangunan prasarana dan sarana transportasi baru, peningkatan jaringan transportasi inter dan antar model yang terpadu serta peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan dan transportasi.

(2) Penyediaan dan peningkatan penyaluran air bersih dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan cakupan pelayanan air bersih, terpeliharanya sumber air baku secara berkesinambungan dan peningkatan instalasi pengolahan air bersih berbasis pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan dan pembangunan listrik dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kapasitas pelayanan listrik, pemanfaatan sumber energi alternatif serta terciptanya sistem pemeliharaan efektif dan efisien.

(4) Pemeliharaan dan pembangunan pendidikan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan, pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.
(5) Pemeliharaan dan pembangunan kesehatan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan, pembangunan sistem rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pelayanan yang responsif.
(6) Pemeliharaan dan pembangunan telematika dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan cakupan pelayanan dan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas telematika, peningkatan peranan swasta dalam penyediaan layanan pengembangan dan peningkatan pembangunan perumahan serta permukiman dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan dan pemeliharaan perumahan dan permukiman, perluasan akses pembiayaan dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan peranan swasta. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang prasarana dan sarana adalah terwujudnya pengembangan dan peningkatan transportasi yang terpadu untuk mendukung percepatan aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Bekasi.
(7) Terimplementasinya tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi secara fungsional.
(8) Terkelolanya sumber daya alam serta terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

5. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Memiliki Etos Kerja Dan Produktivitas Yang Tinggi

Pembangunan diarahkan untuk mendorong terwujudnya *Good Local Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip partisipasi.

(1) Pembangunan diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong peningkatan perangkat hukum di daerah tanpa pengecualian, peningkatan tertib hukum dan budaya hukum.
(2) Pembangunan diarahkan untuk menciptakan transparansi dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong pengembangan sistem informasi manajemen, peningkatan penyediaan informasi dan komunikasi, peningkatan keakuratan serta kevalidan data dan informasi.
(3) Pembangunan diarahkan untuk menciptakan prinsip akuntabilitas dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong peningkakan sistem prestasi kerja pegawai negeri sipil, meningkatkan profesionalitas dan moralitas pegawai negeri sipil dan mengembangkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bekasi.
(4) Pembangunan diarahkan untuk menciptakan prinsip partisipasi dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan partisipatif di Kabupaten Bekasi, meningkatkan keterlibatan kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik serta meningkatkan kebijakan publik yang aspiratif masyarakat.

(5) Meningkatnya kualitas hidup sumberdaya manusia termasuk perempuan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sehingga mampu memberikan peranan dan kontribusi dalam pembangunan daerah dan tidak menjadi beban pembangunan.

(6) Meningkatnya kualitas pendidikan yang didukung oleh penataan sistem dan manajemen pendidikan serta pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dilihat dari jumlah dan persentase lulusan, persentase lulusan yang melanjutkan pendidikan tinggi dan persentase lulusan yang mampu masuk ke pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja.

(7) Dilaksanakannya penerapan *reward and punishment* di lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dititikberatkan pada disiplin terhadap perundang-undangan seperti tertib lalu lintas, ketaatan dalam pemanfaatan ruang/lahan, budaya bersih, budaya antri, dan taat pajak serta perundang-undangan.

(8) Berkembangnya sikap profesional bagi aparatur dan masyarakat untuk meningkatkan etos kerja. Penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya didukung dengan sistem penggajian yang berbasis kinerja. Terwujudnya sistem dan berkembangnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam rangka pelayanan prima kepada masyarkat. Terwujudnya penerapan standarisasi terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

(9) Terwujudnya merit sistem dalam peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan karier berbasis kinerja dan sistem *recruitment by expertise*. Terwujudnya tenaga kerja yang bermutu dan berdaya saing melalui peningkatan mutu tenaga kerja lokal.

(10) Tertatanya kelembagaan, perangkat dan kewenangan antara pihak keamanan dengan pihak terakaitt sehingga keamanan masyarakat dapat terjamin, dan terwujudnya rasa aman di lingkungan masyarakat dan kemitraan antara pihak keamanan dan masyarakat.

(11) Tersedianya pendidikan unggulan pada sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata yang sesuai dengan kondisi daerah dan tersedianya pendidikan dasar dan menengah yang murah tapi berkualitas dan mudah diakses serta pendidikan gratis bagi masyarakat miskin atau rawan sosial.

6. Mewujudkan Supremasi Hukum Dan Ketertiban Yang Berkeadilan;

(1) Pembangunan yang berkeadilan diawali dengan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan perindustrian terbesar di Indonesia harus di lindungi dan diatur pola pengembangannya baik oleh pihak investor maupun pekerja dengan supremasi hukum yang jelas.

(2) Penerbitan produk hukum daerah yang berpihak kepada masyarakat.

(3) Pembangunan politik yang ditujukan bagi terwujudnya demokrasi yang berdasarkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

(4) Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban mendasar dengan profesionalitas penyelenggara pemerintahan yang akuntabel, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

7. Mengembangkan Prasarana Dan Sarana Publik Secara Terpadu Dan Penuh Inovasi Yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat Secara Adil Dan Merata;

(1) Pembangunan pemerintahan pada saat ini berorientasi kepada pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan bertanggungjawab serta jelas secara hukum. Sehingga dimasa yang akan datang pengembangan sarana publik menjadi prioritas terdepan yang dimulai dari pemerintahan terendah di tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten.

(2) Pengembangan investasi yang terus berkembang di Kabupaten Bekasi membutuhkan akses sarana publik yang cukup pula sehingga investor harus dibantu dalam memberikan akses bagi pengembangan bisnis di Kabupaten Bekasi. Efek ganda (*multiflier effect*) dari terpenuhinya sarana dan prasarana publik bagi pengembangan investor adalah terserapnya tenaga kerja yaitu masyarakat Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.

5.2 SASARAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN

Agar ada pentahapan yang jelas menuju tercapainya Visi Kabupaten Bekasi, maka ditetapkan sasaran pembangunan lima tahunan pada bidang industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata yang senantiasa dilandasi oleh masyarakat yang unggul sebagai berikut:

Agamis dan Unggul

Agamis dan unggul merupakan dasar pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025. Dengan demikian agamis dan unggul senantiasa mendasari setiap tahapan pembangunan mulai dari tahun 2005-2007, 2007-2012, 2012-2017, 2017-2022 dan 2022-2025.

Masyarakat agamis yang unggul merupakan masyarakat yang memiliki karakter dan kualitas keimanan yang tinggi, sehingga secara konvergen pengertian masyarakat agamis yang unggul adalah masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan karakteristik fisik (sehat dan terampil), Intelektual (cerdas, kreatif dan inofatif), Emosional (mandiri, berbudaya dan demokratis), Spiritual (beriman dan berakhlak mulia). Selanjutnya masyarakat agamis yang unggul tersebut akan menjadi dasar dalam pengembangan bidang industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata.

Bidang Keagamaan :

1. 2005 - 2007 Pemberian kesejahteraan bagi tenaga pendidik keagamaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana keagamaan kepada institusi keagamaan.
2. 2007 – 2012 Terciptanya Trilogi Kerukunan Umat Beragama (inter, antar umat beragama dan pemerintah), terselenggaranya pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas SDM dan fasilitasi kegiatan keagamaan yang mencerminkan sistem tata nilai keagamaan, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan dan pendidikan keagamaan serta peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan non pendidik keagamaan.

3. 2012 – 2017 Terciptanya Trilogi Kerukunan Umat Beragama, penyelenggaraan pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas SDM dan fasilitasinya, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan dan pendidikan keagamaan serta peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan non pendidik keagamaan.

4. 2017 – 2022 Terciptanya Trilogi Kerukunan Umat Beragama, peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik keagamaa dan fasilitasinya, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan dan pendidikan keagamaan secara optimal serta peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan non pendidik keagamaan.

5. 2022 – 2025 Terciptanya Trilogi Kerukunan Umat Beragama dan terwujudnya masyarakat madani yang berbudaya dan berakhlak mulia.

Bidang Industri:

1. 2005 - 2007 Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri dengan memberdayakan industri kecil dan menengah.

2. 2007 – 2012 Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri dengan sumber daya manusia unggul di bidang industri.

3. 2012 – 2017 Kabupaten Bekasi mampu meningkatkan keterlibatan dan daya dukung industri terhadap kebijakan daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan sosial.

4. 2017 – 2022 Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri berstandar mutu internasional dan ramah lingkungan.

5. 2022 – 2025 Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri berdaya saing tinggi dengan mutu internasional dukungan teknologi mutakhir yang ramah lingkungan.

Bidang Perdagangan :

1. 2005 - 2007 Kebupaten Bekasi sebagai Kabupaten perdagangan dengan berbasis ekonomi kerakyatan.

2. 2007 – 2012 Kabupaten Bekasi sebagai Kabupaten perdagangan dengan berbasis masyarakat.

3. 2012 – 2017 Kabupaten Bekasi sebagai kabupaten perdagangan dengan dukungan sistem informasi pelayanan perizinan.

4. 2017 – 2022 Kabupaten Bekasi sebagai kabupaten perdagangan dengan dukungan Jaringan berbasis sistem informasi.

5. 2022 – 2025 Kabupaten Bekasi sebagai Kabupaten perdagangan dengan dukungan jaringan internasional.

Bidang Pertanian :

1. 2005 - 2007 Kabupaten Bekasi sebagai pusat pertanian yang berbasis pada kekuatan lahan pertanian.

2. 2007-– 2012 Kabupaten Bekasi sebagai pusat pertanian yang berbasis pada kekuatan masyarakat petani.

3. 2012 – 2017 Kabupaten Bekasi sebagai pusat pertanian yang didukung dengan penguatan sarana dan prasarana pertanian.

4. 2017 – 2022 Kabupaten Bekasi sebagai pusat pertanian yang mengandalkan kekuatan teknologi ramah lingkungan guna terwujudnya pola-pola pertanian yang maju.

5. 2022 – 2025 Kabupaten Bekasi sebagai pusat pertanian yang mampu berkembang hingga di pasar Jawa Barat, Nasional dan Mancanegara dengan dukungan jaringan perdagangan internasional

Bidang Pariwisata :

1. 2005 - 2007 Kabupaten Bekasi sebagai kabupaten pariwisata berbasis budaya masyarakat.

2. 2007 – 2012 Kabupaten Bekasi sebagai kabupaten pariwisata berbasis budaya dengan dukungan SDA dan industri.

3. 2012 – 2017 Kabupaten Bekasi sebagai kabupaten pariwisata berbasis budaya dengan dukungan wisata industri kreatif.

4. 2017 – 2022 Kabupaten Bekasi sebagai kabupaten pariwisata berbasis budaya dan industri dengan dukungan sistem informasi manajemen yang unggul.

5. 2022 – 2025 Kabupaten Bekasi sebagai kabupaten pariwisata berbasis budaya dan industri dengan dukungan jaringan market internasional.

Selanjutnya Sasaran Pembangunan Lima Tahunan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan tahapan tersebut di atas.

1. RPJM Daerah Pertama (2005-2007)

Indikator Pencapaian Keberhasilan :

Periode ini menjadi periode pertama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025. Oleh karena itu indikator pencapaian keberhasilan hanyalah berupa pemaparan arah pembangunan pada Tahun 2005 hingga 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah (POLDAS dan PROPEDA) Kabupaten Bekasi Tahun 2002-2006 sebagai berikut :

a. Membangun sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, kualitas kehidupan beragama dan ketahanan sosial budaya melalui peningkatan kesejahteraan rakyat, kependudukan, kesehatan, agama, kebudayaan, kesenian, pariwisata, kedudukan dan peranan perempuan, pemuda dan olahraga.

b. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi daerah yang adil dan berkelanjutan.

c. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta melaksanakan supremasi hukum melalui peningkatan fungsi pemerintahan dan penegakan hukum.

d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kehidupan demokrasi melalui keamanan dan ketertiban serta politik.

e. Mewujudkan otonomi daerah, meningkatkan kapasitas daerah dan kesiapan dalam menghadapi era globalisasi.

f. Mewujudkan penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas melalui penataan ruang wilayah, dan sumber daya alam serta lingkungan hidup.

2. RPJM Daerah Kedua (2007-2012) tidak jauh dari sasaran:

”Terwujudnya Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri dengan sumber daya manusia yang unggul di bidang industri, pusat perdagangan dengan berbasis masyarakat, pusat pertanian yang berbasis pada kekuatan masyarakat petani dan pusat pariwisata berbasis budaya dengan dukungan sumber daya alam dan industri”.

Indikator Pencapaian Keberhasilan :

Periode ini menjadi periode kedua dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, sebagian indikator pencapaian keberhasilan hanyalah berupa pemaparan prioritas pembangunan pada Tahun 2007 hingga 2010 berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2012 dengan harapan akan menjadi kelanjutan pada periode perencanaan pembangunan selanjutnya. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2010 adalah sebagai berikut :

Tahun I : Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui perbaikan tata kelola pemerintahan

Tema pembangunan ini menekankan agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki program dan kegiatan yang sinergis dan mendukung tercapainya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas harus mulai diterapkan, dan tentunya peningkatan kesejahteraan aparat segera direalisasikan. Peningkatan pelayanan publik juga mengedepankan pembangunan fisik antara lain pembangunan jalan kabupaten, irigasi teknis, irigasi ½ teknis serta pelayanan air bersih. Dalam tahun pertama ini pula dilakukan proses konsolidasi agar semua stakeholder dapat berjalan secara sinergis.

Tahun II (2008 – 2009) : Pemberdayaan Masyarakat

Tema pembangunan ini menekankan agar semua SKPD memiliki program dan kegiatan yang sinergis dan mendukung untuk tercapainya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tahun III (2009 – 2010) : Pemantapan Ketahanan Pangan

Tema pembangunan ini menekankan agar semua SKPD memiliki program dan kegiatan yang sinergis dan mendukung tercapainya ketahanan pangan yang kokoh di Kabupaten Bekasi.
Sedangkan alat ukur untuk konfirmasi dasar kegiatan keseharian pemerintahan dan pembangunan seperti :

a. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur tentang Kewenangan/urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bekasi menurut PP Nomor 38 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
b. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
c. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Bekasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007.
d. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur tentang Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD.
e. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.
f. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang Mengatur tentang Pajak dan Retribusi di Kabupaten Bekasi.
g. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) yang mengatur tentang Mekanisme penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) di Kabupaten Bekasi.
h. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) teknis yang mengatur tentang Hubungan Kerja Bupati dan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah baik Unsur Staf, Lini maupun Auxilary, Kepegawaian, Keuangan, Aset, Kecamatan, Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Produk hukum di atas menjadi payung awal bagi Pemerintah Daerah dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan visi pembangunan di atas, karena konsep awal untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi melalui sektor industri adalah penguatan tingkat sumber daya manusia yang tinggal di Kabupaten Bekasi, karena begitu pesatnya pusat-pusat Industri yang akan berdiri di Kabupaten Bekasi sehingga menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar mengubah pola pikir yang ada saat ini bahwa : *"Masyarakat Kabupaten Bekasi Yang Selama Ini Hanya Menjadi Penonton, Mulai Sekarang Harus Menjadi Pemain Dalam Setiap Pusat Industri Yang Ada Di Kabupaten Bekasi Yaitu Dengan Memulai Komitmen Mendirikan Pusat-Pusat Pendidikan Dasar, Menegah, Atas/Kejuruan Dan Mungkin Perguruan Tinggi Pada Sektor-Sektor Industri Yang Ada Dan Akan Di Bangun Di Kabupaten Bekasi"*.

Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi yang kuat akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga diharapkan kekuatan kedua yang akan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi pada sektor perdagangan menjadi acuan pembangunan selanjutnya. Jika diperhatikan dari kaca mata posisi Kabupaten Bekasi yang berbatasan langsung dengan kemajuan dan pola perdagangan Jakarta yang sudah maju dan berorientasi pasar bebas saat ini, maka mau tidak mau Kabupaten Bekasi pasti mengikuti pola perdagangan bebas. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Bekasi harus membuat produk hukum yang berpihak kepada masyarakat dan melakukan program-program serta melakukan revitalisasi pasar-pasar desa dan kecamatan agar visi yang dirumuskan di atas dapat terlaksana karena sektor perdagangan di Kabupaten Bekasi harus diperhatikan sehingga sektor perdagangan yang akan dikembangkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi haruslah berbasis pada masyarakat lokal. Sektor industri dan perdagangan serta pertanian harus diperhatikan begitu juga dengan sektor pariwisata yang juga menjadi salah satu ikon dari Visi Kabupaten Bekasi. Pariwisata di Kabupaten Bekasi pada dasarnya dalam pengelolaannya sama dengan pariwisata yang dikembangkan di daerah lain, namun begitu setiap daerah juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain dan ini menjadi kekuatan yang akan dikembaangkan oleh Kabupaten Bekasi.

Pariwisata di Kabupaten Bekasi memiliki potensi pengembangan pada kekuatan Budaya gabungan antara Budaya Sunda yang menunjukkan Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat dan Budaya Betawi yang mana daerah Kabupaten Bekasi berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai Ibukota. Selain itu kekuatan sumber daya alam juga diperkuat dengan pengembangan area wisata pantai di Kabupaten Bekasi yang wilayahnya langsung berhadapan dengan laut.

Pariwisata yang akan dikembangkan di Kabupaten Bekasi adalah pariwisata industri. Oleh kerena itu Pemerintah Kabupaten Bekasi harus menyusun dan menginventarisir wilayah-wilayah Industri yang ada di Kabupaten Bekasi yang akan dijadikan tempat wisata baik dalam pemilihan bahan untuk membuat produk hingga proses kerja industri dalam produksi sebuah produk, dan kebijakan ini menjadi sebuah kelanjutan program bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Bekasi dan menjadi tantangan baru bagi kepala daerah yang akan memimpin Kabupaten Bekasi agar bisa mewujudkan visi yang telah ditetapkan bersama dengan wakil rakyat Kabupaten Bekasi.

Pertanian di Kabupaten Bekasi yang dulu tatanannya sudah baik perlahan-lahan sudah mulai tidak terkendali lagi dikarenakan perkembangan sektor perindustrian sehingga mau tidak mau pemerintah Kabupaten Bekasi harus bekerja keras untuk memperjuangkan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Bekasi sebelum melanjutkan ke pembangunan pertanian lanjutan.

Dalam Bidang Pendidikan, pembangunan dititikberatkan pada penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Pembangunan pendidikan memprioritaskan pada peningkatan APM SMP dan MTs, APK SMA/SMK/MA, APK pendidikan tinggi dan mutu pendidikan serta sertifikasi guru.

Dalam Bidang Kesehatan, pembangunan dititikberatkan pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit baik yang bersumber dari binatang maupun manusia, pembangunan sarana kesehatan yang memadai, serta melakukan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media.

Dalam Bidang Keagamaan, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama yang memiliki keyakainan yang sama, maupun kerukunan antar umat beragama yang berbeda keyakinan melalui upaya dialog secara rutin antar juga inter umat beragama dalam rangka meningkatkan rasa toleransi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi. Selain itu dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama, dilakukan upaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan serta fasilitasi kegiatan keagamaan kepada lembaga-lembaga keagamaan di Kabupaten Bekasi.

Dalam Bidang Ketenagakerjaan, pembangunan dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ketenagakerjaan serta merintis kurikulum pelatihan tenaga kerja yang kompetitif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga, pembangunan dititikberatkan pada upaya menumbuhkan jiwa patriotisme pemuda sehingga dapat meningkatkan kualitas pemuda sebagai sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing dan berwawasan kebangsaan. Selain itu, mulai dirintis pelatihan bagi pemuda yang ingin menjadi relawan penanggulangan bencana dan kesadaran bela negara dengan bantuan aparat keamanan setempat. Sedangkan dalam bidang olahraga, pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang memadai.

Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pembangunan dilaksanakan untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan yang berbasis kemandirian ekonomi serta peningkatan peran gender dalam pembangunan.

Dalam Bidang Informatika dan Telekomunikasi, pembangunan dititikberatkan pada penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi penerapan *e-government*. Implementasi telekomunikasi dan pelayanan pos lainnya terus ditingkatkan sehingga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.

Dalam Bidang Sosial dan Budaya, pembangunan dititikberatkan pada pembinaan akhlak yang mulai dilakukan dengan pembinaan nilai agama dan pendidikan akhlak agar menjadi manusia yang berbudaya. Selain itu, dilaksanakan pembinaan terhadap lembaga agama dan organisasi masyarakat termasuk sanggar seni. Pembangunan pada bidang sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi serta penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dalam Bidang Pembangunan Manusia, pembangunan terus ditingkatkan sehingga umur harapan hidup seluruh penduduk Kabupaten Bekasi menjadi 69 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 16/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 76/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi Buruk menjadi 2-2,5%.

Dalam Bidang Industri, pembangunan dititikberatkan pada upaya peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha dengan memberdayakan pelaku dan produk lokal, mengembangkan industri yang potensial dan memberdayakan industri kecil dan menengah sebagai penopang perekonomian Kabupaten Bekasi.

Dalam Bidang Pergadangan, pembangunan diarahkan melalui peningkatan konsolidasi dan jaringan market lokal berbasis masyarakat. Pembangunan bidang perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri, menata distribusi barang secara optimal serta meningkatkan arus ekspor ke luar wilayah Kabupaten Bekasi.

Dalam Bidang Pariwisata, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan serta mulai melakukan promosi wisata Kabupaten Bekasi ke luar wilayah Kabupaten Bekasi sehingga dapat mendatangkan wisatawan domestik potensial.

Dalam Bidang Pertanian, pembangunan diarahkan pada peningkatan infrastruktur pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, menciptakan budaya pertanian yang kondusif, peningkatan produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani khususnua dan masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya.

Dalam Bidang Peternakan dan Perikanan, pembangunan difokuskan pada pengembangan perikanan secara komersial, pengembangan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan, pengembangan jaring usaha/distribusi hasil peternakan dan perikanan serta pengembangan usaha pengolahan hasil peternakan dan perikanan.

Dalam Bidang UMKM pembangunan dititikberatkan pada pemberdayaan industri kecil dan menengah agar mandiri melalui peningkatan SDM pelaku UMKM, penguatan kelembagaan, peningkatan akses pasar serta pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan UMKM.

Dalam Bidang Investasi, pembangunan dititikberatkan pada pembenahan pelayanan dengan menyempurnakan proses keimigrasian, pabean, perijinan, pajak dan tenaga kerja serta memberikan kepastian hukum terutama bagi para investor dan mulai memberikan insentif kepada investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Bekasi sehingga terjadi pertumbuhan sektor ekonomi baru melalui kegiatan industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis Industri. Selain itu mulai diciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif dengan dukungan infrastruktur wilayah yang ada.

Dalam Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Alam pembangunan dititikberatkan pada pemantauan dan evaluasi serta optimalisasi usaha pertambangan dan pemanfaatan air tanah termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan steakholder lainnya dalam hal pengawasan. Dalam bidang SDA migas, mulai diupayakan peningkatan, monitoring dan evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari hasil minyak dan gas sehingga keuangan daerah terus meningkat.

Dalam Bidang Lingkungan Hidup, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi dengan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan swasta.

Dalam Bidang Pemerintahan dan Aparatur, pada tahap ini mulai dilaksanakan penataan birokrasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai menyediakan sarana pendukung di pusat pemerintahan yang representatif, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kantor untuk mendukung pelayanan publik dan akselerasi perekonomian daerah. Dalam penyelenggaran pemerintahan mulai dilakukan *reward and punishment* di lingkungan aparatur sehingga pelayanan publik dapat meningkat.

Dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban, pembangunan dititikberatkan pada sinkronisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaran pemerintahan serta pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.

Dalam Bidang Hukum, pembangunan diprioritaskan pada penataan hukum dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Dalam Bidang Pelayanan Publik, pembangunan dititikberatkan pada pemberian pelayanan secara optimal kepada masyarakat melalui pelayanan satu pintu yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).

Dalam Bidang Infrastruktur, pembangunan dititikberatkan pada penyediaan infrastruktur dasar melalui penyediaan sarana dan parasarana pemerintahan dan aparatur pemerintah agar pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Dalam Bidang Pemukiman, pembangunan ditujukan terutama untuk menyediakan perumahan serta melakukan penataan lingkungan pemukiman khususnya di perkotaan, kecamatan dan desa melalui program percepatan pengembangan pedesaan dan kecamatan.

Dalam Bidang Penataan Ruang Wilayah, pembangunan ditujukan pada Program Perwujudan Struktur Ruang, Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, Prasarana Energi, Prasarana Sumber Daya Air, Prasarana Telekomunikasi, Prasarana Permukiman, Perwujudan Pola Ruang, Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis Kabupaten Bekasi.

3. **RPJM Daerah Ketiga (2012-2017) tidak jauh dari sasaran :**
   ”Terwujudnya Kabupaten Bekasi yang mampu meningkatkan keterlibatan dan daya dukung industri terhadap kebijakan daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan sosial, pusat perdagangan dengan dukungan sistem informasi pelayanan perijinan, pusat pertanian yang didukung dengan penguatan sarana dan prasarana pertanian dan pusat pariwisata berbasis budaya dengan dukungan wisata industri kreatif”

Indikator Pencapaian Keberhasilan :

Berlandaskan hasil dari pelaksanaan, pencapaian dan kondisi serta sebagai keberlanjutan RPJM ke-1 dan RPJM ke-2, maka RPJM ke-3 ditujukan untuk memantapkan penataan kembali penyelenggaraan pemerintahan dengan menekankan kepada peningkatan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sumberdaya alam dengan menyiapkan pemanfaatan ilmu dan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional, nasional dan global. Periode ini diprioritaskan untuk melanjutkan penataan organisasi pemerintahan daerah, memantapkan sistem, membina dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan agar lebih mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menumbuhkembangkan kegiatan industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis Industri.

Melaksanakan pembangunan dengan berdasarkan perencanaan daerah, baik pambangunan jangka panjang maupun rencana tata ruang. Rencana tata ruang sudah menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan periode berikutnya. Mengembangkan kawasan yang memiliki potensi dan terus melakukan pembinaan masyarakat Kabupaten Bekasi agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya.

Dalam Bidang Pendidikan, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga guru melalui pendidikan dan latihan yang terprogram dan kontinu sesuai dengan standar. Pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun tetap dijalankan sambil mempersiapkan program wajib belajar 12 tahun. Pembangunan pendidikan tetap memprioritaskan pada peningkatan APM SMP dan MTs, APK SMA/SMK/MA, APK pendidikan tinggi, dan mutu pendidikan serta sertifikasi guru. Fasilitas pendidikan terus ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya secara merata di seluruh wilayah bagi semua jenjang pendidikan termasuk melanjutkan pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah memanfaatkan perpustakaan sebagai bagian pendidikan yang terintegrasi. Menerapkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di seluruh jenis dan jenjang sekolah terus ditingkatkan, sejalan dengan terus meningkatkan jumlah guru yang memenuhi standar nasional dan bersertifikasi.

Dalam Bidang Kesehatan, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang terus dilakukan melalui pengendalian penyakit yang bersumber dari binatang dan menular langsung serta meningkatkan terus upaya pencegahannya yang disejalankan dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas. Menjalankan sistem informasi kesehatan secara bertahap di Puskesmas, RSUD, RS Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan Provinsi secara berjenjang. Selain itu, terus membangun sarana dan prasarana kesehatan dan mulai melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara murah, mudah dan gratis yang pelaksanaannya dibebankan dan ditanggung pembiayaannya secara bersama antara pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak lainnya. Terus menyediakan tenaga medis yang merata di semua pusat pelayanan kesehatan.

Dalam Bidang Keagamaan, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama untuk meningkatkan toleransi antar dan inter umat beragama. Pada tahap ini diberikan pelayanan pendidikan agama yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi sehingga peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai agama sudah pada taraf implementasi.

Dalam Bidang Ketenagakerjaan, mulai menata organisasi ketenagakerjaan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan dititikberatkan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing yang diarahkan pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal. Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit. Daya saing Kabupaten Bekasi semakin meningkat yang dilihat semakin berperannya tenaga kerja daerah, dunia usaha dan dalam pergaulan ekonomi regional dan nasional.

Dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga, pembangunan dilanjutkan melalui peningkatan kualitas pemuda sebagai sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing dan berwawasan kebangsaan terus dilakukan baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun dengan menyediakan fasilitas olahraga serta pemberian beasiswa bagi yang berprestasi dan atau dari keluarga yang tidak mampu.

Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pembangunan diprioritaskan pada pengembangan lembaga sosial masyarakat dalam menangani masalah anak dan perempuan, peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta peningkatan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Bidang Informatika dan Telekomunikasi, pembangunan informatika dan telekomunikasi dilaksanakan melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mampu memberikan manfaat bagi penerapan *e-government* serta melanjutkan implementasi atas sistem aplikasi dan telematika lainnya, penguasaan telekomunikasi melalui layanan internet, web, hp dan sebagainya terus meningkat terutama bagi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan akses informasi dari dan ke luar daerah. Implementasi telekomunikasi dan pelayanan pos lainnya terus diperluas baik jaringan telekomunikasi dan pelayanan pos antar wilayah di Kabupaten Bekasi, juga jaringan dengan daerah lain sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik.

Dalam Bidang Sosial dan Budaya, pembangunan ditujukan pada peningkatan peran lembaga agama dan organisasi masyarakat termasuk sanggar seni dan budaya terus ditingkatkan pembinaannya, sehingga masyarakat semakin memiliki kesadaran akan akar budayanya. Terus melakukan pendataan terhadap berbagai peninggalan budaya sunda baik berupa peninggalan sejarah maupun dalam bentuk naskah tulisan yang terdapat di daerah Kabupaten Bekasi maupun di tempat lain. Mencegah agar peninggalan budaya Sunda tidak punah dan hilang ditelan masa dan dapat melakukan revitalisasi peninggalan budaya Sunda yang mengalami kerusakan dan kepunahan. Jiwa keteladanan di masyarakat terus ditingkatkan, khususnya pemberian penghargaan kepada tokoh dan masyarakat yang berprestasi. Pendidikan dan pembinaan nilai agama dan budaya terus ditingkatkan baik bentuk dan metodenya pada semua jenjang pendidikan dan lembaga kemasyarakatan maupun pemerintahan. Pendidikan akhlak, budi pekerti dan budaya daerah (Budaya Sunda) tidak saja dimasukan dalam kurikulum pendidikan yang bersifat muatan lokal pada pendidikan dasar (SD dan SMP) tapi juga pendidikan

menengah (SMA/SMK). Terus memberdayakan peran dan fungsi lembaga keagamaan dan lembaga adat dan kesenian agar kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kesenian tradisional dan aset kebudayaan tetap terjaga. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan karakter dan budaya masyarakat Kabupaten Bekasi, semakin meningkatnya pelaksanaan demokrasi yang beretika dan santun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin efektif menuju masyarakat sipil yang madani.

Penanganan penyakit sosial seperti prostitusi dan perdagangan orang menjadi perhatian, dengan mengharapkan partisipasi masyarakat melalui lembaga agama, organisasi masyarakat, keluarga serta lingkungan pendidikan. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi terus meningkat yang ditandai dengan semakin meningkatnya indikator pembangunan manusia seperti meningkatnya pendapatan dan daya beli, menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, menurunnya jumlah dan tingkat pengangguran dengan semakin berkembangnya lapangan kerja dan meningkatnya peluang usaha masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat sejalan dengan semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pengelolaan sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal.

Meningkatnya kesejahteraan sejalan dengan semakin terkendalinya pertumbuhan penduduk yang memberikan peluang lebih baik bagi peningkatan pelayanan dasar masyarakat, menurunnya kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar kawasan dan daerah, semakin meningkatnya hasil pembangunan dari perkembangan Kabupaten Bekasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya kesejahteraan ditandai dengan semakin tingginya usia harapan hidup yang didukung dengan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi anak dan ibu hamil serta tersedianya jaminan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan semakin meningkatnya pemanfaatan asuransi kesehatan bagi penduduk.

Terus menjamin tersedianya kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara pengadaan dan pendistribusian bahan kebutuhan pokok yang terencana.

Dalam Bidang Pembangunan Manusia, pembangunan terus ditingkatkan sehingga umur harapan hidup seluruh penduduk Kabupaten Bekasi menjadi 70 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 15/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 75/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi Buruk menjadi 1-2%.

Dalam Bidang Industri, pembangunan terus ditingkatkan agar kualitas dan kuantitas industri kecil lebih mandiri dan kesejahteraan pelaku usaha ekonomi kecil dan masyarakat mulai meningkat. Pengembangan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan terus ditingkatkan. Data potensi sumber daya industri tersedia dengan baik dan dapat diakses dengan mudah sehingga mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui semua sektor.

Dalam Bidang Perdagangan, pembangunan dilaksanakan dengan terus melakukan upaya peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha, disertai dengan peningkatan pengawasan barang dan jasa dan peningkatan standar dan kualitas produksi dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan

pengembangan ekonomi kreatif serta terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dan penguatan daya saing ekspor.

Dalam Bidang Pariwisata, pembangunan dilaksanakan dengan terus meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis wisata yang akan dikembangkan dan selanjutnya dibina serta diberdayakan oleh tenaga-tenaga pariwisata lokal agar lebih profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi dan pro pembangunan daerah dengan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. Terus dilakukan promosi wisata di Kabupaten Bekasi ke negara sumber wisatawan potensial luar negeri maupun dalam negeri dengan metode yang efesien dan efektif sesuai kebutuhan. Meningkatkan kerja sama promosi dan pembinaan kepada pelaku jasa pariwisata baik dalam dan luar negeri. Di bidang perdagangan dan pariwisata mulai memanfaatkan potensi dan disejalankan pembinaannya baik dari peralatan, teknologi dan permodalan serta pemasaran hasil. Pembangunan sektor perdagangan dan pariwisata dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dan terus melakukan pengembangan potensi dan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dan disejalankan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

Dalam Bidang Pertanian, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan mutu hasil pertanian melalui pengembangan teknologi dari hulu sampai ke hilir. Dengan demikian, pada tahap ini dibutuhkan pengelolaan kualitas rantai produksi yang efektif dan efisien, standarisasi dan sertifikasi produk, peningkatan mutu, kelembagaan penunjang yang efisien serta survei kepuasan konsumen.

Dalam Bidang Peternakan dan Perikanan, pembangunan diarahkan pada pengembangan produktivitas peternakan dan perikanan komersial, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan jejaring usaha peternakan dan perikanan, penguatan pasar produk peternakan dan perikanan serta pengembangan usaha permodalan peternakan dan perikanan.

Bidang UMKM, pembangunan dilaksanakan dengan meningkatkan peran koperasi, juga pelaku UKM yang berkualitas dan sentra-sentra UMKM yang mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global dan mewujudkan pariwisata yang mendukung ekonomi daerah serta didukung oleh pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang handal. Dalam bidang usaha mikro dan kecil terus dilakukan penataan, pembinaan dan pemberdayaan UMKM Industri kecil secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam Bidang Investasi, pembangunan dilaksanakan dengan terus menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif dengan membangun infrastruktur wilayah yang lengkap dan modern dan mewujudkan peraturan kebijakan yang menjamin keamanan untuk kepentingan investasi. Semakin meningkatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang politik dan hukum dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang baik dan dasar hukum untuk memperkuat kelembagaan demokrasi yang semakin berkembang. Terus melakukan pembenahan pelayanan dengan menyempurnakan proses keimigrasian, pabean, perijinan, pajak dan tenaga kerja. Kepastian hukum terus ditingkatkan terutama bagi para investor dan terus memberikan insentif kepada investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Bekasi. Melaksanakan peraturan kebijakan investasi yang menarik dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bekasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Alam, perlu disusun peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan umum dan perda air tanah yang disejalankan dengan optimalisasi potensi sumber daya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi pengusahaan pertambangan dan pemanfaatan air tanah termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan steakholder lainnya dalam pengawasan. Terus dilakukan optimalisasi pengawasan dan monitoring usaha pertambangan dan air tanah. Dalam bidang SDA migas, terus melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan migas dan melaksanakan program *community development* secara efektif dan berkesinambungan. Dalam sektor sumber daya energi perlu dipikirkan pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bekasi dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga listrik nasional agar dapat mendukung pertumbuhan industri di Kabupaten Bekasi baik industri kecil, sedang dan besar dengan menggunakan inovasi dan kreatifitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang kelistrikan dan energi terus melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan listrik berdasarkan pemetaan kebutuhan listrik, meningkatkan cakupan pelayanan listrik terutama di daerah yang cepat tumbuh, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak.

Dalam Bidang Lingkungan Hidup, pembangunan ditandai dengan peningkatan kemajuan pembangunan yang didukung oleh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian lingkungan hidup dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Sumberdaya hayati tidak dieksploitasi dengan sembarangan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah. Terus memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan dan menumbuhkan kawasan ekonomi khusus serta melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi dengan melaksanakan Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup dan pengendaliannya serta didukung dengan semakin meningkat dan berkembangnnya infrastruktur lingkungan hidup. Terus meningkatkan peran serta *stakeholders* (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam pengendalian dampak lingkungan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengelola lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan.

Dalam Bidang Pemerintahan dan Aparatur, pembangunan diarahkan pada semakin efektifnya lembaga pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik. Tersedianya perangkat pemerintahan yang didukung dengan jumlah pegawai yang memadai serta tenaga guru dan paramedis dan pelayanan lainnya yang seimbang. Terus meningkatkan dan menyediakan sarana pendukung dipusat pemerintahan yang representatif, meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas kantor untuk mendukung pelayanan publik dan akselerasi perekonomian daerah. Dalam penyelenggaran pemerintahan terus dilakukan *reward and punishment* di lingkungan aparatur sehingga pelayanan publik dapat meningkat dan sudah melaksanakan SPM dan SOP untuk setiap jenis pelayanan. Kinerja sudah mulai diterapkan dengan disertai penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur pemerintah daerah yang didahului dengan penetapan standar kinerja utama. Terus melakukan penataan organisasi pemerintahan daerah, memfungsikan sistem, membina dan mengembangkan kemampuan aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan tugas-tugas perencanaan, pembangunan dan pelayanan publik secara lebih baik.

Dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban, pembangunan diarahkan pada meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pelatihan relawan inti penanggulangan bencana dan kesadaran bela negara terus ditingkatkan, menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar intelejen dengan pimpinan daerah terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kerukunan beragama, persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam Bidang Hukum, pembangunan ditandai dengan semakin meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat dibidang hukum dan perundang-undangan, meningkatnya etos kerja dan kinerja dalam melaksanakan pembangunan oleh masyarakat dan pemerintah.

Dalam Bidang Pelayanan Publik, ditujukan pada pemberian pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebagai pengayom dan pelayan dengan dukungan peningkatan kesejahteraan yang proporsional dan adil.

Dalam Bidang Infrastruktur, pembangunan dilaksanakan dengan terus menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan dan meningkatkan sarana parasarana pemerintahan dan aparatur pemerintah agar pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip manajemen modern. Pembangunan pelabuhan di Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari sistem transportasi antar wilayah. Dalam periode ini, Kabupaten Bekasi telah menyediakan dokumen tatanan transportasi wilayah baru yang harus dijadikan agenda bagi Provinsi Jawa Barat yang nantinya perlu mendapat kebijakan pemberian bantuan dana penguaatan sistem transportasi darat/laut/udara di Kabupaten Bekasi. Pengembangan di wilayah Kabupaten Bekasi yang langsung berbatasan dengan DKI Jakarta mulai dilakukan dengan pembangunan infrastruktur dasar dan terus melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik daerah maupun pusat dalam pengembangan kawasan bersama JABODETABEK. Dalam bidang transportasi jalan mulai menyediakan fasilitas sarana lalu lintas angkutan jalan dan membangun terminal AKDP serta menyediakan angkutan darat yang murah dan efisien terutama bagi pekerja dan anak sekolah. Semakin berkembangnya pembangunan infastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan, kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan.

Dalam Bidang Pemukiman, pembangunan terus ditingkatkan terutama untuk pelayanan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman khususnya di perkotaan dan perdesaan yang tertinggal dan masuk kategori tertinggal dan *slum* dengan program percepatan pembangunan desa dan program pengembangan kecamatan. Meningkatkan penurunan persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terkordinasi dan terintegrasi.

Dalam Bidang Penataan Ruang Wilayah, pembangunan dititkberatkan pada program program lanjutan dari tahap ke-2 yaitu Program Perwujudan Struktur Ruang, Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, Prasarana Energi, Prasarana Sumber Daya Air, Prasarana Telekomunikasi, Prasarana Permukiman, Perwujudan Pola Ruang, Kawasan Budidaya dan Kawasan Strategis Kabupaten.

4. RPJM Daerah Tahap ke-4 (2017-2022) tidak jauh dari sasaran:

”Terwujudnya Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri berstandar mutu internasional dan ramah lingkungan, pusat perdagangan dengan dukungan jaringan berbasis sistem informasi, pusat pertanian yang mengandalkan kekuatan teknologi ramah lingkungan guna terwujudnya pola-pola pertanian yang maju dan pusat pariwisata berbasis budaya dan industri dengan dukungan sistem informasi manajemen yang unggul.”

Berlandaskan pada hasil pelaksanaan, pencapaian dan kondisi dan sebagai kelanjutan dari RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan kepada peningkatan daya saing ekonomi yang berlandaskan kepada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas baik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus. Pada periode ini, diprioritaskan untuk terus melanjutkan penataan, pembinaan dan pengembangan organisasi pemerintahan daerah. Lembaga pemerintahan mulai menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip penyelenggaraan manajemen modern, baik dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan maupun pelayanan publik. Meningkatkan mutu dan kualitas perangkat pemerintahan yang didukung dengan jumlah pegawai yang memadai serta didukung dengan pemakaian teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bekasi dengan tetap menumbuhkembangkan kegiatan industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis industri. Mewujudkan industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di Kabupaten Bekasi semakin maju dan terus berkembang yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita penduduk. PDRB yang meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya peran dan kontribusi lapangan usaha sektor jasa dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Bekasi. Peranan sumber daya manusia semakin meningkat dalam mengelola sumberdaya bagi kepentingan pembangunan dalam rangka persiapan untuk mengelola sendiri dengan diawali transfer teknologi.

Pembangunan jangka menengah sudah memperhatikan rencana jangka panjang maupun rencana tata ruang. Rencana tata ruang sudah menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penataan kelembagaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, pembangunan dan pelayanan publik.

Pembangunan wilayah terus berkembang sejalan dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan ekonomi. Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat sejalan dengan semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pengelolaan sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal serta berkembangnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi didukung dengan pengembangan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan akan listrik dan air bersih semakin meningkat pelayanannya terutama di perkotaan dan daerah yang cepat tumbuh. Pengembangan sumber energi listrik dan sumber air bersih semakin meningkat baik dengan dilaksanakan sendiri maupun dengan kerjasama dengan pihak lain.

Terus mengembangkan potensi perindustrian, perdagangan, pertanian dan pariwisata serta terus melakukan pembinaan masyarakat agar semakin berdaya dalam mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan produktivitasnya. Pembinaan tenaga lokal baik dari peralatan, teknologi dan permodalan dan pemasaran hasil terus dilakukan. Pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas yang terpadu, dengan terus melakukan pengembangan potensi dan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dan disejalankan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian.

Dalam Bidang Pendidikan, perhatian tetap dititikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga guru melalui pendidikan dan latihan sesuai dengan standar. Pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun tetap dijalankan sambil melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Pembangunan pendidikan tetap memprioritaskan pada peningkatan APM SMP dan MTs, APK SMA/SMK/MA, APK pendidikan tinggi dan mutu pendidikan serta sertifikasi guru. Fasilitas pendidikan terus ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya secara merata di seluruh wilayah terutama daerah yang cepat tumbuh bagi semua jenjang pendidikan termasuk melanjutkan pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu.

Dalam Bidang Kesehatan, pembangunan masih dititikberatkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan baik dengan pengendalian penyakit yang bersumber dari binatang dan menular langsung maupun terus meningkatkan upaya pencegahannya yang disejalankan dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dalam upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) dan peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi ibu dan anak. Sistem informasi kesehatan sudah terlaksana dengan baik dalam sistem yang terpadu mulai dari Puskesmas, RSUD Kabupaten Bekasi dan RS Provinsi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan Provinsi secara berjenjang.

Dalam Bidang Keagamaan, sejalan dengan semakin beragam dan meningkatnya karakter dan budaya masyarakat di Kabupaten Bekasi, terus dilakukan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai agama di seluruh lapisan masyarakat dengan kaderisasi yang terencana. Dalam rangka melanjutkan fungsi Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) maka dilakukan evaluasi dan revitalisasi fungsi FKUB sebagai wadah berkumpulnya tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai konflik yang ditemui dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Pada tahap ini, mulai disediakan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan yang bermutu dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.

Dalam Bidang Ketenagakerjaan, terus menata organisasi dan kelembagaan balai latihan kerja yang dimulai dengan melengkapi sarana dan prasarana latihan kerja, menyediakan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis IT, dan konsultasi ketenagakerjaan secara online. Peningkatan status BLK menjadi Pusat Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang diakui. Melaksanakan peraturan yang komprehensif dibidang ketenagakerjaan dan mengembangkan peningkatan mutu tenaga kerja melalui penyediaan tenaga instruktur kewirausahaan yang profesional dan merencanakan untuk memfungsikan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pembinanaan dan pelatihan tenaga kerja. Terus melakukan *up grade* sarana dan prasarana sejalan dengan terus melakukan pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah. Melaksanakan peningkatan mutu tenaga kerja serta mulainya upaya untuk menetapkan status BLK dan memfungsikan BLK yang ada.

Dalam Bidang pemuda dan Olah Raga, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas pemuda untuk mewujudkan pemuda yang produktif, berdaya saing dan berwawasan kebangsaan serta berakhlak melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan maupun dengan meningkatkan kualitas sarana pembinaan dan pengembangan bakat dan keterampilan. Dalam bidang olahraga, selain mengembangkan olah raga prestasi, pengembangan olah raga tradisional dan olah raga masyarakat juga dilakukan pada periode RPJMD ke-4 ini. Dengan demikian, cita-cita Kabupaten Bekasi untuk meraih prestasi dalam bidang olah raga dalam skala regional dan nasional dapat terealisasi.

Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pembangunan diarahkan pada pemberdayaan perempuan yang berbasis ekonomi, pendidikan dan kesehatan, mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan peran gender dalam pembangunan Kabupaten Bekasi.

Dalam Bidang Informatika dan Telekomunikasi, pembangunan masih dititikberatkan pada penerapan sistem aplikasi dan telematika lainnya. Penguasaan telekomunikasi melalui layanan internet, web, hp dan sebagainya terus meningkat terutama bagi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan akses informasi dari dan ke luar daerah. Implementasi telekomunikasi dan pelayanan pos lainnya terus diperluas sampai ke wilayah lain di Kabupaten Bekasi dalam skala nasional. Terus melakukan pembangunan berdasarkan perencanaan yang terarah dan sistematis, dengan memanfaatkan data dan kemajuan teknlogi informasi. Teknologi informasi yang ada diharapkan mampu melakukan pengendalian pembangunan berdasarkan sistem pengendalian yang terpadu dan terintegrasi dalam mewujudkan pencapaian kinerja pembangunan yang terfokus.

Dalam Bidang Sosial dan Budaya, pembangunan difokuskan pada pengamalan nilai agama, hukum dan moral serta budaya terus ditingkatkan pada semua lapisan masyarakat baik lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Pendidikan akhlak dan budaya sudah mulai masuk ke perguruan tinggi dengan tetap memantapkan kurikulum pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK). Lembaga keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan semakin memiliki peran dalam memantapkan moral dan akhlak masyarakat. Peninggalan budaya dapat dicegah kemusnahannya dengan membuat manuskrip dan salinan digital serta alat peraga dalam museum daerah. Peningkatan peran museum sejarah terus ditingkatkan sebagai wadah pembelajaran bagi generasi muda.

Dalam Bidang Pembangunan Manusia, pembangunan terus ditingkatkan sehingga umur harapan hidup seluruh penduduk Kabupaten Bekasi menjadi 71 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 13/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 70/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi buruk menjadi 0-1%.

Dalam Bidang Industri, terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil agar mandiri dan pelaku usaha ekonomi kecil dan masyarakat dapat terus berkembang baik jumlah maupun peranannya. Terus mengembangkan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan dan usaha mikro dan kecil ditata, dibina dan diberdayakan secara berkelanjutan. Pembangunan industri diarahkan pada pemantapan industri melalui penguatan potensi industri, perluasan

kesempatan kerja dan optimalisasi pendayagunaan potensi industri Kabupaten Bekasi.

Dalam Bidang Perdagangan, terus dilakukan peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha, dengan tetap disertai oleh peningkatan pengawasan barang dan jasa dan peningkatan standar dan kualitas produksi dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam Bidang Pariwisata, terus meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis objek daerah tujuan wisata yang ada di kabupaten dan membina serta memberdayakan tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi dan pro pembangunan daerah melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. Terus dilakukan promosi wisata Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat ke negara sumber wisatawan potensial luar negeri maupun dalam negeri dengan metode yang efesien dan efektif sesuai kebutuhan. Meningkatkan kerja sama promosi dan pembinaan kepada pelaku jasa pariwisata baik dalam dan luar negeri.

Dalam Bidang Pertanian, sebagai implementasi dari pengembangan pertanian berkelanjutan maka perlu disusun konsep kewilayahan komoditas pertanian tanaman pangan menuju produk pertanian dengan komoditas unggulan sesuai dengan kondisi fisik lingkungan setempat. Untuk mendukung program pengembangan sektor pertanian, maka harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat pertanian dan lembaga-lembaga pertanian yang sesuai seperti pembinaan petugas lapangan dan lembaga keuangan mikro. Di bagian lain, upaya diversifikasi komoditas dan diversifikasi produk untuk pasar domestik dan ekspor terus dilaksanakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kinerja aparat pertanian perlu ditingkatkan. Terus menjamin ketahanan pangan dengan menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau baik dengan cara pengadaan, pendistribusian dan pergudangan bahan kebutuhan pokok yang terencana.

Dalam Bidang Peternakan dan Perikanan, pembangunan diarahkan pada peningkatan produktivitas hasil peternakan dan perikanan melalui pengenalan teknologi dalam bidang peternakan dan perikanan. Melanjutkan pengembangan usaha pengolahan hasil peternakan dan perikanan sehingga lebih memiliki nilai jual. Dengan demikian, potensi peternakan dan perikanan dapat memberikan hasil yang optimal.

Dalam Bidang UMKM, mulai diupayakan pelatihan kewirausahaan dalam bidang usaha ekonomi kecil dan koperasi terutama disektor yang strategis untuk mengurangi tingkat pengangguran. Peran koperasi ditingkatkan sebagai pelaku UKM yang mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global.

Dalam Bidang Investasi, terus meningkatkan infrstruktur pendukung investasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk mengoptimalkan pusat pelayanan satu atap bidang pelayanan atau mungkin menjadi satu pintu yang lebih unggul dan vital. Lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif terus dipelihara dan ditingkatkan terutama dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang lengkap dan modern serta mengeluarkan kebijakan yang menjamin keamanan untuk kepentingan investasi.

Dalam Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Alam, difokuskan pada implementasi perda pengelolaan pertambangan umum dan perda air tanah yang sudah tersusun sebelumnya diharapkan dapat berjalan efektif dan dapat memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan daerah dengan optimalisasi potensi sumber daya mineral, geologi dan air tanah yang terintegrasi. Terus meningkatkan pemantauan dan evaluasi pengusahaan pertambangan dan pemanfaatan air tanah termasuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan *stakeholders* lainnya dalam pengawasan. Dalam bidang SDA migas terus diupayakan peningkatan DBH dari hasil minyak dan gas sehingga keuangan daerah terus meningkat, disejalankan dengan memberikan peran BUMD dalam mengelola sumberdaya alam di daerah. Terus melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan migas dan program *community development* secara efektif dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan sistem hubungan komunikasi organisasi. Konservasi sumber daya mineral (memperpanjang usia penambangan sumber daya mineral), meningkatkan nilai tambah ekonomi sumber daya mineral, menambah lapangan kerja, kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional mulai dirasakan. Dalam bidang sumberdaya alam migas, terus diupayakan meningkat sehingga keuangan daerah terus meningkat. Peran BUMD ditingkatkan dalam mengelola sumberdaya mineral di daerah, baik penambangan maupun pengolahan menjadi bahan industri berbasis sumber daya mineral. Terus melakukan evaluasi dan dan monitoring terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi migas serta program pengembangan masyarakat secara efektif dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan sistem hubungan komunikasi organisasi. Dalam sektor sumberdaya energi, sumberdaya listrik dapat terus terpelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung indusri sumberdaya mineral skala menengah dan besar. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dari industri sumberdaya mineral untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional, nasional dan global. Elektrifikasi bidang kelistrikan dan energi ditingkatkan melalui pemenuhan kebutuhan listrik, meningkatkan cakupan pelayanan listrik yang menjangkau daerah yang cepat tumbuh lainnya, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak.

Dalam Bidang Lingkungan Hidup, peningkatan kemajuan pembangunan terus didukung oleh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian lingkungan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Terus memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan dan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan melaksanakan Standar Baku Mutu Lingkungan Hidup dan pengendaliannya yang didukung oleh meningkat dan berkembangnnya infrastruktur lingkungan hidup serta terus meningkatkan peran serta *stakeholders* (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) dalam Pengendalian dampak Lingkungan.

Dalam Bidang Pemerintahan dan Aparatur, pembangunan diarahkan dengan terus meningkatkan kualitas dan menyediakan sarana pendukung di pusat pemerintahan yang lebih maju dan modern. Meningkatkan kualitas dan fasilitas kantor pelayanan publik yang lebih maju, efesien dan nyaman. *Reward and punishment* menjadi bagian dari pelaksanaan manajemen pemerintahan yang modern didukung dengan penerapan standar kinerja di lingkungan aparatur sehingga pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan SPM dan SOP untuk setiap

jenis pelayanan. Penilaian kinerja diterapkan dengan disertai dengan sistem penggajian yang rasional dan proporsional bagi aparatur pemerintah daerah. Tata pemerintahan sudah terwujud dengan baik dan berwibawa dengan penerapan manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan dan modern. Sarana di pusat pemerintahan telah terpenuhi menurut standar yang ditetapkan baik kualitas yang lebih modern dengan kriteria yang lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan tetap memperhatikan kinerja dan penilaian sudah mengikuti standar kinerja yang mengutamakan manfaat daripada produk, orientasi penyelenggaraan pemerintahan sudah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah.

Dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban, pembangunan diarahkan pada ketentraman dan ketertiban masyarakat ditujukan untuk menciptakan rasa aman, tentram, tidak ada rasa takut dan adanya kepastian hukum. Kesadaran bela negara semakin meningkat, dan tetap melaksanakan pelatihan relawan inti penanggulangan bencana terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nasionalisme dan kerukunan beragama, persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam Bidang Hukum, masyarakat Kabupaten Bekasi telah menjunjung hukum dan perundang-undangan sehingga Hukum dan perundang-undangan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan hubungan antar daerah. Disiplin sudah mulai menjadi bagian budaya daerah yang maju dan menjadi kebanggaan masyarakat untuk menjadi tertib dan berbudaya. Semakin meningkatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang politik dan hukum dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang lebih baik sebagai dasar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah.

Dalam Bidang Pelayanan Publik, dititikberatkan pada pelayanan publik yang semakin baik dan maju dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan peningkatan peran masyarakat sebagai bagian penting dari penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah berorientasi kepada standar pelayanan dan kinerja, sehingga mampu mendukung daya saing daerah sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah daerah.

Dalam Bidang Infrastruktur, pembangunan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas dan sistem jaringan infastruktur ekonomi baik transportasi, perhubungan, kelistrikan, air bersih, telematika dan pemukiman perumahan. Daya saing Kabupaten Bekasi semakin kuat dan kompetitif yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pembangunan semua sektor maupun antar daerah di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dalam Bidang Pemukiman, pembangunan diarahkan dengan terus meningkatkan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman khususnya diperkotaan dan pedesaan *slum* dengan tujuan meningkatkan kualitas perkotaan dan pedesaan yang tertinggal dengan program percepatan pembangunan desa dan program pengembangan kecamatan. Memberikan bantuan pelayanan pemukiman bagi keluarga miskin dan sangat miskin melalui pelaksanaan program pembangunan yang lebih terkordinasi dan terintegrasi.

Dalam Bidang Penataan Ruang Wilayah, pembangunan masih terfokus pada program lanjutan dari tahap ke-2 dan ke 3 yaitu Program Perwujudan Struktur Ruang, Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, Prasarana Telekomunikasi, Prasarana Permukiman, Kawasan Budidaya dan Program Perwujudan Pola Ruang.

5. RPJM Daerah Tahap ke-5 (2022-2025) tidak jauh dari sasaran:

”Terwujudnya Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri berdaya saing tinggi dengan mutu internasional dan didukung teknologi mutakhir yang ramah lingkungan, pusat perdagangan dengan dukungan jaringan internasional, pusat pertanian yang mampu berkembang hingga di pasar Jawa Barat, pulau Jawa, Nasional dan Mancanegara dengan dukungan jaringan perdagangan internasional dan pusat pariwisata berbasis budaya dan industri dengan dukungan jaringan market internasional”

Periode ini merupakan periode terakhir dari RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025. Periode ini menggambarkan apa yang diarahkan dalam arah pembangunan jangka panjang, maka fokus utama pencapaian dalam periode ini adalah mewujudkan tujuan jangka panjang sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berlandaskan pada hasil pelaksanaan, pencapaian dan kondisi sebagai kelanjutan RPJM ke-4, maka RPJM ke-5 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang agamis dan unggul melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing diseluruh wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya. Periode ini disamping melanjutkan apa yang sudah dibuat pada periode sebelumnya, juga menyelesaikan apa yang belum dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tatakelola dan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik sudah berjalan dengan efisien dan efektif mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi dan menganut prinsip manajemen modern. Dalam menjalankan tugasnya, jumlah pegawai aparatur pemerintahan sudah mulai dibatasi sesuai dengan spesisifikasi dan keahlian terutama dengan semakin meningkatnya kemajuan birokrasi dan lembaga yang efisien sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, murah dan efektif.

Dalam Bidang Pendidikan, wajib belajar 12 tahun sudah berjalan dengan efektif dengan tetap memperhatikan pendidikan dasar sejalan dengan peningkatan kualitas dan sebaran pelayanan pendidikan serta manajemen pengelolaan pendidikan yang maju. Kualitas lulusan sekolah disemua tingkatan sudah memiliki daya saing baik untuk memasuki pasar kerja maupun dalam memperoleh peluang meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia tetap dengan mempertimbangkan kemajuan akhlak dan budi pekerti, sehingga sumber daya manusia yang diharapkan tercapai baik kualitas fisik maupun mentalnya. Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat sejalan dengan semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pengelolaan sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan potensi lokal serta berkembangnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi didukung dengan pengembangan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dalam Bidang Kesehatan, sudah dapat meningkatkan angka harapan hidup mencapai 72 tahun sebagaimana yang direncanakan. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas terus dilakukan. Sistem informasi kesehatan sudah terlaksana dengan baik dalam sistem yang terpadu mulai dari Puskesmas, RSUD dan RS Provinsi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan Provinsi secara berjenjang. Kabupaten Bekasi sudah memiliki RSUD minimal tipe B yang dikelola dengan baik dan berkualitas baik.

Dalam Bidang Keagamaan, pembangunan ditandai dengan terwujudnya pengamalan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari secara konsekuen sehingga membentuk budaya masyarakat yang madani dan didukung dengan semakin berkurangnya tindak pelanggaran yang merusak moral dan akhlak. Pembangunan bidang keagamaan di Kabupaten Bekasi diutamakan pada upaya pemantapan kerukunan umat beragama melalui sikap toleransi dan tenggang rasa yang merupakan modal dasar pembangunan Kabupaten Bekasi. Pada tahap ini diberikan peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik keagamaan serta melakukan evaluasi secara komprehensif dan akuntabel terhadap program keagamaan yang sudah dilaksanakan selama 4 (empat) periode RPJMD Kabupaten Bekasi.

Dalam Bidang Ketenagakerjaan, lembaga latihan kerja sudah berfungsi sebagai pusat pelatihan yang kredibel dan menjadi rujukan bagi penetapan standar kompetensi kerja sesuai dengan jenis dan kebutuhan lapangan kerja. Penataan lembaga dan organisasi balai latihan kerja semakin efektif sehingga dapat lebih profesional dan dapat dihandalkan dengan tetap menjalin kerjasama dengan dunia usaha terutama bidang yang sesuai. Pengembangan bursa kerja sudah melalui pemanfaatan kemajuan IT dan ilmu pengetahuan lainnya.

Dalam Bidang pemuda dan Olah Raga, kualitas pemuda dan remaja semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya daya saing penduduk dan daerah, prestasi di bidang olahraga, seni dan ilmu pengetahuan semakin meningkat dengan disertai pelaksanaan *event* di berbagai bidang yang mengembangkan bakat dan kemampuan pemuda dan remaja. Dalam bidang olah raga, pembangunan olah raga diarahkan untuk mempertahankan keunggulan olah raga Kabupaten Bekasi ditingkat regional dan nasional, serta mewujudkan prestasi Kabupaten Bekasi ditingkat internasional.

Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pembangunan ditujukan pada peningkatan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan kemandirian perempuan secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan masalah perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Dalam Bidang Informatika dan Telekomunikasi, pembangunan ditandai dengan telah dimanfaatkannya informatika dan telekomunikasi sudah menjadi bagian penting dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik termasuk penguasaan dan pengembangannya bagi kepentingan nasional dan keamanan daerah. Kemajuan informatika juga dimanfaatkan bagi pendeteksian potensi kekayaan alam dan aspek lain yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Dalam Bidang Sosial dan Budaya, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi terus meningkat yang ditandai dengan terus meningkatnya indikator pembangunan manusia seperti meningkatnya pendapatan dan daya beli, menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, menurunnya jumlah dan tingkat pengangguran dengan semakin berkembangnya lapangan kerja dan meningkatnya peluang usaha masyarakat. Pembangunan wilayah terus berkembang sejalan dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan ekonomi yang stabil. Penyakit sosial seperti prostitusi dan perdagangan orang sudah dapat ditekan seminimal mungkin, sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas pengamalan nilai agama dan moral baik yang dilakukan oleh lembaga agama, organisasi masyarakat, keluarga serta lingkungan pendidikan. Semakin menurunnya persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terkordinasi dan terintegrasi serta semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin yang berubah status ekonomi menjadi penduduk tidak miskin. Lingkungan sosial sudah terjaga dengan kondusif terutama dengan telah terwujudnya pemerataan pembangunan disegala bidang dan seluruh wilayah. Kawasan strategis dan cepat tumbuh terus berkembang sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah, pemerataan dan pemanfaatan sumber daya alam sudah terlaksana dengan adil dan proporsional.

Dalam Bidang Pembangunan Manusia, pembangunan terus ditigkatkan sehingga umur harapan hidup seluruh penduduk Kabupaten Bekasi menjadi 72 tahun termasuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) berkurang menjadi 8/1.000 kelahiran hidup, angka kematian Ibu (AKI) berkurang menjadi 50/100.000 kelahiran hidup dan menurunkan status gizi kurang menjadi 0%.

Dalam Bidang Industri, industri semakin berkembang dan dijadikan motor penggerak ekonomi daerah dengan ditopang oleh sektor lain seperti jasa yang terus meningkat kontribusinya sejalan dengan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan industri diarahkan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta pengelolaan industri yang ramah lingkungan. Pembangunan industri juga ditujukan pada perluasan industri mulai jaringan regional, nasional sampai jaringan internasional.

Dalam Bidang Perdagangan, kegiatannya terus ditingkatkan terutama dalam rangka pemasaran hasil dan produk dari pengolahan potensi daerah, sehingga neraca perdagangan terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan sejalan dengan peningkatan daya saing produk dan pelaku usaha. Standar dan kualitas produksi dalam negeri yang cukup tinggi serta peningkatan legalitas hasil perdagangan yang mampu bersaing di pasaran global serta pemasaran dengan pemanfaatan teknologi dan pembinaan pengembangan ekonomi yang kreatif. Kerjasama dalam negeri dan luar negeri semakin diperkuat serta meningkatnya jaringan distribusi barang.

Dalam Bidang Pariwisata, pembangunannya ditingkatkan untuk mendorong ekonomi daerah serta melibatkan sektor publik dalam pengelolaan objek dan destinasi wisata. Sejalan dengan hal tersebut, peran sektor lain dalam pengembangan pariwisata seperti perhubungan, transportasi dan sektor jasa semakin meningkat. Pada tahap ini dilaksanakan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan yang terintegrasi antara lingkungan, alam dan masyarakat Kabupaten

Bekasi sehingga pariwisata di Kabupaten Bekasi mampu bersaing dalam skala regional, nasional dan internasional.

Dalam Bidang Pertanian, sudah mampu mendukung ketahanan dan kecukupan pangan secara lokal di Kabupaten Bekasi. Untuk mendukung hal tersebut, maka pemantapan pengembangan wilayah berbasis komoditas dan diversifikasi pertanian yang berkelanjutan menjadi titik tolak pembangunan jangka panjang selanjutnya. Hal yang tetap harus mendapat pengendalian yang tegas adalah upaya alih fungsi lahan pertanian ke arah fungsi lain agar tingkat produksi pertanian dapat dipertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan. Ketahanan pangan terus dijaga, baik dengan menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau maupun dengan meningkatkan produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta potensi lainnya. Distribusi tetap terjaga dengan melibatkan sektor terkait dan kerjasama dengan daerah lain serta dukungan pemerintah dan dunia usaha.

Dalam Bidang Peternakan dan Perikanan, pembangunan terus dilakukan dengan mengoptimalkan petani perikanan darat dan laut yang terpadu serta para peternak dengan terus melakukan pengembangan potensi dan pengawasan yang berkelanjutan dan terkoordinasi yang disejalankan dengan pembangunan infrastruktur perekonomian. Tetap melanjutkan pengembangan usaha pengolahan hasil peternakan dan perikanan sehingga lebih memiliki nilai jual sehingga potensi peternakan dan perikanan dapat memberikan hasil yang optimal.

Dalam Bidang UMKM, pembangunan tahap terakhir ini difokuskan pada pemantapan UMKM di Kabupaten Bekasi melalui terbentuknya KUKM yang kompetitif, pengembangan struktur KUKM serta perluasan lapangan pekerjaan melalui peningkatan peran KUKM.

Dalam Bidang Investasi, pada periode RPJMD terakhir ini Kabupaten Bekasi diarahkan sebagai daerah tujuan utama investasi dalam skala nasional dan internasional.

Dalam Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Alam, potensi pertambangan yang ada dikelola dengan tetap memperhatikan kelestariannya, karena pertambangan sebagai sumber daya yang terbatas maka eksploitasi yang berlebihan akan memberikan keterbatasan persediaan bagi generasi yang akan datang. Pengawasan dan monitoring serta penegakan hukum sektor pertambangan sudah berjalan dengan efektif. Demikian juga pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah dikendalikan dengan mempertimbangkan prinsip kelestariannya.

Dalam sektor sumber daya energi dan sumber daya listrik, dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan kemampuannya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi industri berbasis sumber daya mineral dalam skala kecil, menengah dan besar baik dalam kualitas dan kuantitasnya mengingat persaingan global semakin kompetitif.

Pengelolaan pertambangan sumberdaya mineral dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, konservasi sumberdaya mineral ditingkatkan (umur penambangan sumber daya mineral diperpanjang). Kelestarian lingkungan dipertahankan dan ditingkatkan karena perda pertambangan sumber daya mineral dan air tanah dapat berjalan sangat efektif. Pengawasan dan

monitoring serta penegakan hukum di sektor pertambangan sumberdaya mineral dan air tanah dikendalikan dengan mempertimbangkan kelestariannya.

Elektrifikasi bidang kelistrikan dan energi ditingkatkan melalui pemenuhan kebutuhan listrik, meningkatkan cakupan pelayanan listrik yang menjangkau terutama di daerah yang cepat tumbuh dengan meningkatkan sarana dan prasarana pembangkit listrik dan bekerjasama dengan semua pihak.

Dalam Bidang Lingkungan Hidup, peningkatan kemajuan pembangunan terus didukung oleh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pelestarian lingkungan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan terus diwujudkan untuk mempersiapkan daya dukung lingkungan pada periode berikutnya, dan untuk itu pengawasan terus dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Dalam Bidang Pemerintahan dan Aparatur, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah berorientasi kepada standar pelayanan dan kinerja, sehingga mampu mendukung daya saing daerah sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah daerah.

Dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban, pembangunan ditujukan bagi pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bekasi sehingga masyarakat Kabupaten Bekasi dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan nyaman serta penguatan tata kelola perlindungan masyarakat yang beradasarkan hak asasi manusia. Wawasan kebangsaan semakin meningkat dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang hakiki serta tingkat perbedaan dan konflik yang semakin minim.

Dalam Bidang Hukum, masyarakat Kabupaten Bekasi masih menjunjung hukum dan perundang-undangan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan hubungan antar daerah secara konsekuen. Disiplin sudah menjadi bagian budaya daerah yang maju dan telah menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Dalam Bidang Pelayanan Publik, pelayanan yang diberikan semakin baik dan maju dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan peningkatan peran masyarakat sebagai bagian penting dari penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemantapan kinerja pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel disemua bidang.

Dalam Bidang Infrastruktur, pembangunan infrastruktur dasar sudah dilaksanakan menurut standar pelayanan minimal dan optimal, sehingga tingkat pelayanan bagi masyarakat tercapai dengan optimal. Sejalan dengan hal tersebut, terus melakukan peningkatan kualitas dan peningkatan peran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasana publik. Sarana perhubungan terus dipelihara dan kualitasnya terus ditingkatkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi nyaman, aman, cepat dan mudah serta efesien.

Dalam Bidang Pemukiman, pembangunan terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas rumah dan meningkatkan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman baik perkotaan maupun pedesaan serta melengkapi sarana prasarana perumahan yang lebih baik sehingga tercipta kawasan pemukiman yang manusiawi dan berbudaya.

Dalam Bidang Penataan Ruang Wilayah, pada periode terakhir ini pembangunan masih berfokus pada program program lanjutan tahap sebelumnya yaitu Program Prasarana Telekomunikasi, Kawasan Budidaya dan Program Perwujudan Pola Ruang.

BAB VI
PENUTUP

Bagian ini menjelaskan penegasan tentang peranan RPJP Daerah dalam Pembangunan Daerah.

RPJP Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2005-2025 ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi masyarakat, dunia usaha dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bekasi. RPJP Daerah juga akan menjadi pedoman umum bagi penyusunan RPJM Daerah periode lima tahunan dan pedoman bagi Kepala daerah dalam penyampaian Visi dan Misi serta program Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang selama 20 tahun ke depan.

Disamping itu RPJP Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten Bekasi dan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha. Terwujudnya pencapaian apa yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang ini tidak saja ditentukan oleh rencana yang sudah disusun, akan tetapi sangat ditentukan oleh komitmen dan sikap mental penyelenggara pemerintahan dan dukungan masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu dokumen RPJP Daerah ini akan bermanfaat jika pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara bersama-sama berkeinginan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang daerah ini.

Perubahan RPJP Daerah dapat dilakukan paling cepat sekali lima tahun dan atau setelah lima tahun berlakunya dengan alasan yang disepakati oleh pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paling lambat enam bulan sebelum RPJP Daerah ini berakhir, Kepala Daerah yang melaksanakan pada akhir periode wajib menyusun dan menyelesaikan RPJP Daerah periode berikutnya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

H. SA'DUDDIN